RENCANA STRATEGIS

BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

Tahun 2015–2019

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan – www.bpiw.pu.go.id

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12110 Telp. (021)7246487 Fax. (021)29305345

Jakarta, 28 September 2016

Kepada yang terhormat :

1. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
2. Para Kepala Bappeda seluruh Indonesia

di Tempat

Perihal : **Rencana Strategis Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Tahun 2015-2019**

SURAT EDARAN

Nomor:

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13.1/PRT/M/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019, perlu menetapkan Rencana Strategis Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Tahun 2015-2019 dengan Surat Edaran Kepala Badan sebagai berikut:

a. UMUM

Yang dimaksud dengan Rencana Strategis Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang selanjutnya disebut Renstra Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah adalah dokumen perencanaan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

b. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Keuangan Negara
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan
12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
13. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang
15. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015
16. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019
18. Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 8)
19. Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 16)
20. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 494/PRT/M/2005 tentang Kebijakan Strategi Nasional Pengembangan Perkotaan
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi Dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, Beserta Rencana Rincinya
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota
26. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional.
27. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 tahun 2014 tentang Penyusunan dan Penelahaan Rencana Strategis K/L 2015-2019

28. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.02/2014 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelahaan RKA-K/L
30. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2015 tentang Pedoman Umum Implementasi Konstruksi Berkelanjutan pada Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang PUPR
31. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2015 tentang Penggunaan Sumber Daya Air
32. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13.1/PRT/M/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian PUPR 2015-2019
33. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

c. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

1. Renstra Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat meliputi uraian tentang amanat undang-undang, tugas, fungsi dan kewenangan, peran, kondisi dan tantangan, isu strategis, visi dan misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, program, kegiatan dan target capaian, yang dilengkapi dengan pendanaan, indikator *output*, dan *outcome* Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah.

2. Renstra Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan acuan untuk menyusun Rencana Kerja Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah yang dijabarkan lebih lanjut oleh setiap Pusat/Unit Eselon II di lingkungan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dalam penyusunan program 5 (lima) tahun masing-masing Pusat/Unit Eselon II.

d. RUANG LINGKUP

1. Program, kegiatan, dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Renstra Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat harus sesuai rencana Tata Ruang Wilayah kota/kabupaten/provinsi/nasional.

2. Perwujudan program, kegiatan, dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan di dalam Renstra Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini akan dicapai melalui pembiayaan yang bersumber dari sumber pendanaan APBN Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah ataupun sumber pendanaan lainnya bila dibutuhkan.

e. PELAKSANAAN DAN PEMANTAUAN

Sekretaris Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kepala Pusat Perencanaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kepala Pusat Pemograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, dan Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Renstra Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagai acuan untuk menyusun Rencana Kerja Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah yang dijabarkan lebih lanjut oleh setiap Pusat/Unit Eselon II di lingkungan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dalam penyusunan program 5 (lima) tahun masing-masing Pusat/Unit Eselon II.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 28 September 2016

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Ir. Rido Matari Ichwan, MCP

<u>Tembusan disampaikan kepada yth.</u>:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (sebagai laporan);
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

KATA PENGANTAR

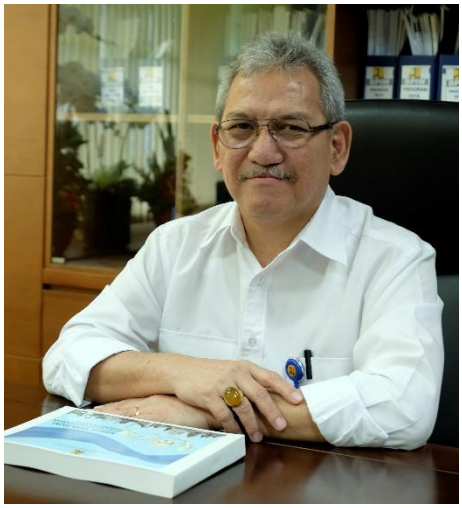

Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun 2015-2019 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, serta kerangka pendanaan pembangunan yang berdasarkan pada Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra Kementerian dan Lembaga 2015-2019 telah ditetapkan. Renstra Kementerian PUPR 2015–2019 menjabarkan arah kebijakan yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 yang didalamnya juga memuat Agenda Nasional Presiden Republik Indonesia ke-7 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025 sesuai Undang-Undang No. 17 Tahun 2007. Renstra Kementerian PUPR 2015-2019 menjadi acuan bagi seluruh Unit Organisasi yang berada di bawah Kementerian PUPR dalam melaksanakan pembangunan bidang PUPR serta menyusun Renstra Unit Kerja Eselon I.

Dinamika perubahan lingkungan strategis berkenaan dengan adanya perubahan susunan Kementerian berdasarkan Peraturan Presiden No. 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja, Peraturan Presiden No. 7 tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara, dan Peraturan Presiden No. 15 tahun 2015 tentang Kementerian PUPR yang mengamanatkan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang PUPR, serta adanya penyesuaian struktur organisasi kementerian sebagai konsekuensi dari implementasi ketentuan Peraturan Presiden No. 135 Tahun 2014 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara yang menjadi titik tolak penyusunan arah kebijakan dan strategi bidang PUPR tahun 2010–2014. Hal ini juga menjadi titik tolak penyusunan arah kebijakan dan strategi tahun 2015-2019 Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) dalam menterpadukan infrastruktur bidang PUPR dengan pengembangan wilayah antar sektor, antar daerah, dan antar pemerintahan. Renstra BPIW harus menjadi acuan seluruh unit kerja di lingkungan BPIW dalam menyusun dokumen perencanaan, pemrograman dan

penganggaran, serta evaluasi (RENJA-KL, RKA-KL, dan LAKIP) masing-masing unit kerja secara berjenjang mulai dari Unit Kerja Eselon II sampai dengan Unit Kerja terkecil.

Akhirnya, atas izin Allah SWT dan segala upaya dari seluruh jajaran BPIW, diharapkan upaya pencapaian target dapat menyukseskan Renstra Kementerian PUPR dalam mendukung program Pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan, membuka peluang kerja, meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, dan juga berkontribusi positif terhadap upaya pelestarian lingkungan hidup dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

Jakarta, 28 September 2016

KEPALA BADAN
PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

RIDO MATARI ICHWAN

DAFTAR ISI

SURAT EDARAN KEPALA BPIW ii
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI viii

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Kondisi Umum Pembangunan Infrastruktur bidang PUPR 1
1.2 Kondisi Pengembangan Wilayah 2
1.2.1 Keterpaduan Perencanaan, Pemograman dan Penganggaran Pembangunan bidang PUPR dengan Pengembangan Wilayah 2
1.2.2 Keterpaduan Pelaksanaan Pembangunan bidang PUPR dengan Pengembangan Wilayah 2
1.3 Potensi dan Permasalahan 3
1.4 Dasar Hukum 4

BAB II TUJUAN, SASARAN STRATEGIS, DAN SASARAN PROGRAM 7
2.1 Tujuan 7
2.2 Sasaran Strategis dan Sasaran Program 8

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN 11
3.1 Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Nasional 11
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Keterpaduan Pembangunan Bidang PUPR dengan Pengembangan Wilayah 12
3.2.1 Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah 12
3.2.2 Strategi 19
3.3 Kerangka Regulasi 25

3.4 Kerangka Kelembagaan 26

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 31

4.1 Program dan Target Kinerja 31

4.2 Kerangka Pendanaan 36

BAB V PENUTUP 39

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum Pembangunan Infrastruktur bidang PUPR

Pembangunan Infrastruktur memiliki kontribusi yang besar dalam mewujudkan pemenuhan hak dasar rakyat. Infrastruktur berperan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan daya saing global. Pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR) memegang peranan penting dalam pengembangan wilayah karena tulang punggung suatu wilayah adalah infrastruktur PUPR.

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur PUPR diharapkan sebagai pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan selalu memperhatikan daya dukung agar hasil pembangunan dapat dimanfaatkan oleh generasi sekarang dan diwariskan pada generasi mendatang. Pembangunan berkelanjutan menjadi dasar kerangka memadukan pembangunan infrastruktur bidang PUPR dengan pengembangan wilayah.

Kementerian PUPR mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 121/P tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019 serta Peraturan Presiden Nomor 165 tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) mempunyai tugas dan fungsi penting dalam memadukan pembangunan infrastruktur bidang PUPR dengan pengembangan wilayah antarsektor, antardaerah, dan antarpemerintahan.

Pembangunan infrastruktur bidang PUPR perlu diarahkan untuk mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi wilayah dan bersinergi dengan kelestarian lingkungan. Pembangunan infrastruktur merupakan pemicu terciptanya pusat-pusat pertumbuhan baru. Kota-kota atau pusat permukiman baru dapat menjadi penyeimbang pertumbuhan ekonomi wilayah dan mengurangi disparitas antarwilayah. Selain itu, pembangunan infrastruktur diarahkan untuk mengurangi laju urbanisasi, meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar dan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga stabilitas dan kesatuan nasional.

Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur bidang PUPR perlu berlandaskan pada pendekatan pengembangan wilayah secara terpadu oleh seluruh sektor. Titik tolak keterpaduan tersebut adalah rencana yang sinergis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan melibatkan badan usaha dan masyarakat masyarakat. Rencana sinergis tersebut diharapkan juga mengacu kepada aktivitas ekonomi, sosial, keberlanjutan lingkungan hidup, potensi wilayah dan kearifan lokal, serta rencana tata ruang wilayah, atau dengan kata lain pembangunan wilayah.

1.2 Kondisi Pengembangan Wilayah

1.2.1. Keterpaduan Perencanaan, Pemrograman, dan Penganggaran Pembangunan bidang PUPR dengan Pengembangan Wilayah

Pada periode-periode Renstra Kementerian PU sebelumnya, keterpaduan perencanaan, pemrograman, dan penganggaran pembangunan infrastruktur bidang PUPR diarahkan untuk mencapai target-target pembangunan. Perencanaan, pemrograman, dan penganggaran pembangunan bidang PUPR masih berorientasi sektoral. Meskipun telah dilakukan keterpaduan sektor-sektor di bawah Kementerian PUPR maupun di luar Kementerian PUPR, perencanaan belum terpadu terhadap pengembangan wilayah. Parameter penyaringan program masih didasarkan pada kriteria kesiapan pembangunan masing-masing sektor. Selain itu, penganggarannya pun masih dengan kriteria sektor.

Perencanaan, pemrograman, dan penganggaran pembangunan belum spesifik kepada keterpaduan pembangunan infrastruktur bidang PUPR dengan pengembangan wilayah antarsektor, antardaerah, dan antarpemerintahan. Konsekuensinya, capaian secara spesifik belum dapat disajikan. Kebijakan dan strategi pembangunan infrastruktur PUPR sebelumnya masih belum terpadu dengan pengembangan wilayah yang memperhatikan rencana tata ruang.

1.2.2. Keterpaduan Pelaksanaan Pembangunan bidang PUPR dengan Pengembangan Wilayah

Penyelenggaraan infrastruktur PUPR masih menghadapi kendala dalam mewujudkan pencapaian target-target nasional. Pengentasan kemiskinan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi terhambat akibat dikotomi dan kesenjangan antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Salah satu penyebabnya adalah intervensi pemerintah dalam pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi lebih besar di KBI (Jawa, Sumatera, dan Bali) dibandingkan KTI. Akibatnya, disparitas pembangunan infrastruktur sangat besar. Kontribusi KBI terhadap pendapatan domestik bruto (PDB) nasional lebih besar daripada KTI yang kaya sumber daya alam, laut, dan mineral. Selain itu, penyelengaraan

pembangunan infrastruktur PUPR juga menghadapi beberapa tantangan terutama dalam menyeimbangkan pertumbuhan dan pembangunan.

Pengukuran kinerja keterpaduan Infrastruktur bidang PUPR dengan pengembangan wilayah pada perwakilan kawasan dari 35 Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) telah mulai dilakukan untuk menentukan dasar pengukuran kinerja berkala setiap tahun. Dalam pengukuran tersebut, beberapa kendala ditemui dan akan terus diperbaiki. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa keterpaduan infrastruktur baik di dalam kawasan, antarkawasan, maupun antarWPS masih relatif rendah. Sebagai contoh, hasil pengukuran pengendali banjir di Ambon, dibangun drainase dengan kapasitas debit yang tidak memadai. Saat bangunan air dibuka atau air melimpas, air tidak tertampung sehingga terjadi banjir. Di pulau Bintan telah dibangun sarana dan prasarana air baku yang berkapasitas 110 m^3/detik, tetapi baru dimanfaatkan 10 m^3/detik.

1.3 Potensi dan Permasalahan

Pengembangan wilayah merupakan strategi memanfaatkan serta mengombinasikan faktor internal dan eksternal. Faktor internal berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya teknologi. Sementara, faktor eksternal dapat berupa peluang dan ancaman yang muncul seiring dengan interaksinya dengan wilayah lain. Konsep pengembangan wilayah dapat memberikan kesejahteraan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pengembangan wilayah memberikan kemudahan prasarana dan pelayanan logistik serta menciptakan pusat-pusat produksi. Dalam konteks jangka panjang, pengembangan wilayah dapat mendorong pemanfaatan potensi sumber daya alam dan potensi pengembangan lokal. Lebih lanjut, pengembangan wilayah mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial, termasuk pengentasan kemiskinan, serta upaya mengatasi kendala pembangunan di daerah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan.

Potensi dan keunggulan kawasan dapat memberikan nilai tambah dan kapasitas produksi unggulan di kawasan. Pemberdayaan masyarakat, yang berpotensi mendorong akselerasi investasi industri melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dengan kawasan penyangga, dapat lebih memperoleh dukungan. Selama ini, masyarakat petani, nelayan, peternak, pengrajin kesulitan memasarkan produknya. Kuantitas produk mereka pun relatif rendah.

Namun demikian, masih terdapat permasalahan yang mengemuka pada konsep pengembangan wilayah,di antaranya yaitu:

1) kebijakan, peraturan, standard, dan manual dalam perencanaan, pemrograman, dan penganggaran pembangunan infrastruktur bidang PUPR dengan pengembangan wilayah masih belum terpadu dan sinergis dengan mempertimbangkan aktivitas ekonomi, sosial, dan keberlanjutan lingkungan serta kearifan lokal sebagai keunggulan kompetitif;

2) kepadatan penduduk di Pulau Jawa-Bali merupakan yang tertinggi dengan kepadatan rata-rata diatas 500 jiwa/km^2;
3) secara spasial, wilayah dengan proporsi penduduk miskin yang tinggi terdapat di wilayah Papua dan Nusa Tenggara (lebih dari 30%), sementara terendah di Kalimantan (kurang dari 10%);
4) distribusi ekonomi wilayah Jawa dan Bali mendominasi hingga mencapi 58,8% terhadap nasional, Sumatera 23%, dan Kalimantan 9,3% sisanya kurang dari 10%;
5) keterpaduan antarprogram/antarsektor yang berbeda sumber pendanaan masih belum optimal;
6) minimnya akses serta anggaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk pembangunan pada kawasan yang baru bertumbuh terutama pada kawasan perbatasan/terpencil/tertinggal;
7) belum efektifnya pemanfaatan Rencana Tata Ruang sebagai basis pembangunan wilayah;
8) belum ada penetapan kawasan yang akan dikembangkan dan dukungan fungsi yang dibutuhkan dikaitkan dengan daya dukung, daya tampung, dan lingkungan fisik pendukung fungsi;
9) belum terbangunnya sistem pendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi kawasan baik industri maupun perdagangan yang berbasis potensi sumber daya kawasan serta pemberdayaan masyarakat;
10) belum terpadunya pengelolaan dan pembangunan kawasan baik dalam perencanaan, pemrograman, penganggaran, maupun pelaksanaan pembangunan;
11) kurangnya dukungan lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pemerintahan terkait kompleksitas kawasan dari berbagai dimensi baik sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan; dan
12) kesenjangan antara wilayah perkotaan dan perdesaan yang tinggi dengan indikasi hampir seluruh fasilitas terakumulasi di kawasan perkotaan, sehingga cenderung menimbulkan arus urbanisasi.

1.4 Dasar Hukum

Beberapa peraturan perundangan terkait melandasi arahan pengembangan wilayah di Indonesia, di antaranya yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Keuangan Negara
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan
12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
13. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang
15. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015
16. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019
18. Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 8)
19. Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 16)
20. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi daan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, Beserta Rencana Rincinya
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota
25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional.
26. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 tahun 2014 tentang Penyusunan dan Penelahaan Rencana Strategis K/L 2015-2019
27. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja
28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.02/2014 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelahaan RKA-K/L

29. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2015 tentang Pedoman Umum Implementasi Konstruksi Berkelanjutan pada Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang PUPR
30. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2015 tentang Penggunaan Sumber Daya Air
31. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13.1/PRT/M/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian PUPR 2015-2019
32. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

BAB II

TUJUAN, SASARAN STRATEGIS, DAN SASARAN PROGRAM

2.1 Tujuan

Visi Kementerian PUPR untuk mewujudkan visi pembangunan nasional tahun 2015-2019 sebagaimana yang dimuat dalam Renstra Kementerian PUPR 2015-2019 yaitu:

"Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Handal dalam Mendukung Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong"

Untuk mewujudkan visi Kementerian PUPR tahun 2015-2019, BPIW menjabarkan tujuan disesuaikan dengan peran, tugas, dan fungsi BPIW. Tujuan BPIW disusun untuk mendukung upaya pencapaian target keterpaduan pembangunan infrastruktur bidang PUPR dengan pengembangan wilayah. Tujuan tersebut juga mempertimbangkan pencapaian pembangunan terkait bidang pengembangan infrastruktur wilayah periode tahun 2010-2014, potensi dan permasalahan, serta tantangan utama pembangunan yang dihadapi lima tahun ke depan.

Sesuai mandat yang diemban Kementerian PUPR di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja, amanat RPJMN tahap ketiga, serta perubahan kondisi lingkungan strategis yang dinamis, tujuan BPIW dijabarkan sebagai berikut:

1. Memadukan perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur bidang PUPR dengan pengembangan wilayah antarsektor, antardaerah, dan antarpemerintahan;
2. Memadukan pelaksanaan pembangunan infrastruktur bidang PUPR dengan pengembangan wilayah antarsektor, antardaerah, dan antarpemerintahan; dan
3. Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi keterpaduan pembangunan infrastruktur bidang PUPR dengan pengembangan wilayah yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efiesien, transparan, dan akuntabel serta

peraturan perundangan yang mendukung penyelenggaraan pembangunan infrastruktur wilayah.

2.2 Sasaran Strategis dan Sasaran Program

Tujuan BPIW dapat ditinjau dari sudut pandang pihak yang dilayani (*customers*). Kondisi akhir yang diharapkan pada level pihak yang dilayani adalah meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur bidang PUPR untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, antarsektor, dan antartingkat pemerintahan.

Sasaran strategis adalah kondisi yang hendak dicapai BPIW sebagai penjabaran tujuan. Sasaran strategis mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil program yang dilaksanakan melalui lima kegiatan. Sasaran-sasaran strategis tersebut digambarkan dalam sebuah peta strategi sebagai petunjuk jalan untuk mencapai tujuan BPIW. Peta strategi BPIW dapat dilihat pada Gambar 2.1.

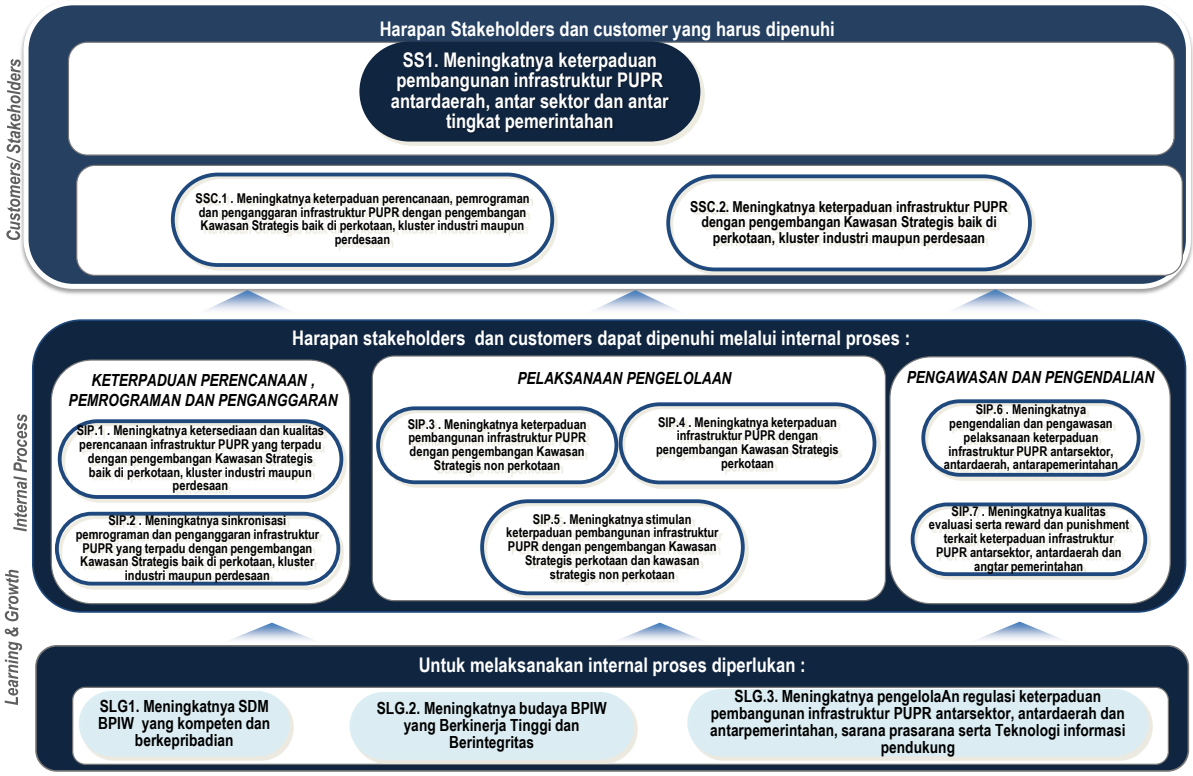

Gambar 2.1 Peta Strategi BPIW

Agar kebutuhan pihak yang dilayani dapat terpenuhi, diperlukan upaya-upaya dalam proses internal (*internal process*) yang harus dilakukan dengan baik untuk mencapai sasaran strategis, yaitu:

1. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas perencanaan infrastruktur PUPR yang terpadu dengan pengembangan kawasan strategis baik di perkotaan, klaster industri, maupun perdesaan;
2. Meningkatnya sinkronisasi pemrograman dan penganggaran infrastruktur PUPR yang terpadu dengan pengembangan kawasan strategis baik di perkotaan, klaster industri, maupun perdesaan;
3. Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR dengan pengembangan kawasan strategis perdesaan;
4. Meningkatnya keterpaduan infrastruktur PUPR dengan pengembangan kawasan strategis perkotaan;
5. Meningkatnya stimulan keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR dengan pengembangan kawasan strategis perkotaan dan kawasan strategis perdesaan;
6. Meningkatnya pengendalian dan pengawasan pelaksanaan keterpaduan infrastruktur PUPR antarsektor, antardaerah, dan antarpemerintahan; dan
7. Meningkatnya kualitas evaluasi, hadiah dan hukuman terkait keterpaduan infrastruktur PUPR antarsektor, antardaerah, dan antarpemerintahan.

Untuk menjamin terlaksananya proses internal yang efektif dan efisien, diperlukan upaya-upaya pengelolaan sumber daya organisasi melalui proses pembelajaran dan pertumbuhan dengan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya SDM (sumber daya manusia) BPIW yang kompeten dan berkepribadian;
2. Meningkatnya budaya organisasi BPIW yang berkinerja tinggi, berintegritas, efektif, efiesien, transparan, dan akuntabel; dan
3. Meningkatnya pengelolaan regulasi keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR antarsektor, antardaerah, dan antarpemerintahan, sarana prasarana serta teknologi informasi pendukung.

Selanjutnya keterkaitan antara tujuan dan sasaran-sasaran strategis BPIW diuraikan sebagai berikut:

1. Tujuan 1: Memadukan perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur bidang PUPR dengan pengembangan wilayah antarsektor, antardaerah, dan antarpemerintahan. Tujuan 1 ini akan dicapai melalui sasaran strategis proses internal:

    a. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas perencanaan infrastruktur PUPR yang terpadu dengan pengembangan kawasan strategis baik di perkotaan, klaster industri, maupun perdesaan;

b. Meningkatnya sinkronisasi pemrograman dan penganggaran infrastruktur PUPR yang terpadu dengan pengembangan kawasan strategis baik di perkotaan, klaster industri, maupun perdesaan

2. Tujuan 2: Memadukan pelaksanaan pembangunan infrastruktur bidang PUPR dengan pengembangan wilayah antarsektor, antardaerah, dan antarpemerintahan. Tujuan 2 ini akan dicapai melalui sasaran strategis proses internal:

   a. Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR dengan pengembangan kawasan strategis perdesaan;

   b. Meningkatnya keterpaduan infrastruktur PUPR dengan pengembangan kawasan strategis perkotaan;

   c. Meningkatnya stimulan keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR dengan pengembangan kawasan strategis perkotaan dan kawasan strategis perdesaan;

   d. Meningkatnya pengendalian dan pengawasan pelaksanaan keterpaduan infrastruktur PUPR antarsektor, antardaerah, dan antarpemerintahan; dan

   e. Meningkatnya kualitas evaluasi serta hadiah dan hukuman terkait keterpaduan infrastruktur PUPR antarsektor, antardaerah, dan antarpemerintahan.

3. Tujuan 3: Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi keterpaduan pembangunan infrastruktur bidang PUPR dengan pengembangan wilayah yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efiesien, transparan, dan akuntabel. Tujuan 3 ini akan dicapai melalui sasaran strategis pembelajaran dan pertumbuhan yaitu:

   1) Meningkatnya SDM BPIW yang kompeten dan berkepribadian;

   2) Meningkatnya budaya organisasi BPIW yang berkinerja tinggi, berintegritas, efektif, efiesien, transparan, dan akuntabel; dan

   3) Meningkatnya pengelolaan regulasi keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR antarsektor, antardaerah, dan antarpemerintahan, sarana prasarana serta teknologi informasi pendukung.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Nasional

Arah kebijakan utama pembangunan wilayah nasional difokuskan untuk mempercepat pemerataan pembangunan antarwilayah. Oleh karena itu, diperlukan arah pengembangan wilayah yang dapat mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di Wilayah Jawa, Bali, dan Sumatera. KTI meliputi Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua.

Arah kebijakan tersebut meliputi beberapa aspek, yaitu;

1. Arah kebijakan pengembangan kawasan strategis. Arah kebijakannya adalah percepatan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah, terutama di luar Jawa (Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua).
2. Arah kebijakan pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan. Arah kebijakannya adalah pengembangan kawasan perkotaan difokuskan untuk membangun kota berkelanjutan dan berdaya saing menuju masyarakat kota yang sejahtera. Sedangkan arah kebijakan pengembangan perdesaan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar serta pembangunan sarana dan prasarana desa.
3. Arah kebijakan peningkatan keterkaitan perkotaan dan perdesaan. Arah kebijakannya adalah peningkatan keterkaitan desa-kota yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara perkotaan dan perdesaan dengan menghubungkan keterkaitan fungsional antara pasar dan kawasan produksi.
4. Arah kebijakan pengembangan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan. Arah kebiajkannya adalah untuk pengembangan daerah tertinggal difokuskan pada upaya pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan pelayanan dasar publik, serta pengembangan perekonomian masyarakat.

5. Arah kebijakan penanggulangan bencana. Arah kebijakannya adalah mengurangi risiko bencana dan meningkatkan ketangguhan menghadapi bencana.
6. Arah kebijakan pengembangan tata ruang wilayah nasional. Arah kebijakannya adalah pengembangan struktur tata ruang dan pengembangan pola ruang.
7. Arah kebijakan dan strategi tata kelola pemerintahan dan otonomi daerah. Arah kebijakannya adalah peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah; peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah; peningkatan kapasitas keuangan daerah; dan pelaksanaan otonomi khusus/daerah istimewa.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Keterpaduan Pembangunan Bidang PUPR Dengan Pengembangan Wilayah

3.2.1 Arah kebijakan pengembangan wilayah

Renstra Kementerian PUPR 2015-2019 telah menetapkan arah kebijakan pembangunna infrastruktur PUPR dan pengembangan wilayah. Pembangunan infrastruktur tidak hanya dititikberatkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah. Kelestarian lingkungan perlu diperhatikan dengan memperhatikan daya dukung suatu wilayah yang ingin dikembangkan. Hal ini mengingat pembangunan infrastruktur merupakan pemicu terciptanya pusat-pusat pertumbuhan baru. Lahirnya kota-kota baru dapat menjadi penyeimbang pertumbuhan ekonomi wilayah dan mengurangi kesenjangan antar wilayah. Ilustrasi kesenjangan pertumbuhan ekonomi antar pulau di Indonesia ditampilkan pada Gambar 3.1.

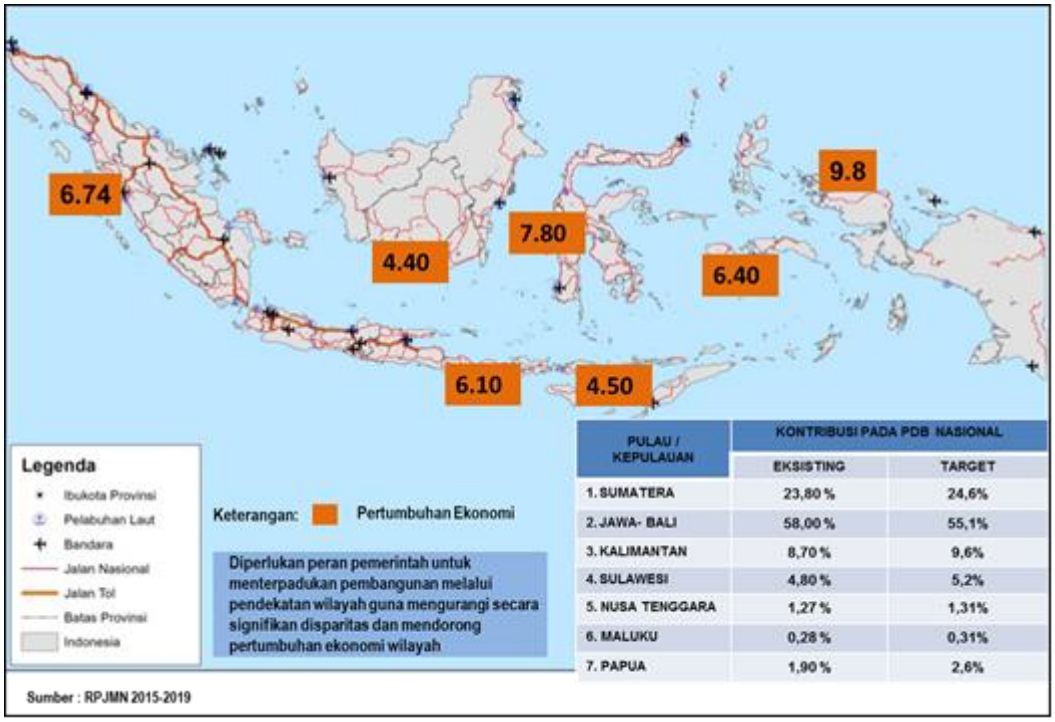

PULAU / KEPULAUAN	KONTRIBUSI PADA PDB NASIONAL	
	EKSISTING	TARGET
1. SUMATERA	23,80 %	24,6%
2. JAWA- BALI	58,00 %	55,1%
3. KALIMANTAN	8,70 %	9,6%
4. SULAWESI	4,80 %	5,2%
5. NUSA TENGGARA	1,27 %	1,31%
6. MALUKU	0,28 %	0,31%
7. PAPUA	1,90 %	2,6%

Gambar 3. 1 Sebaran Pertumbuhan Ekonomi Pada Pulau-Pulau/Kepulauan

Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk mendukung pengurangan disparitas antarwilayah (perkotaan, pedesaan, dan perbatasan). Selain itu, pembangunan infrastruktur juga diarahkan untuk mengurangi urbanisasi dan perkembangan permukiman di perkotaan yang tidak terkontrol (*urban sprawl*), peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar, serta peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur mampu menjaga stabilitas dan kesatuan nasional.

Pembangunan infrastruktur perlu dilandaskan pada pendekatan pengembangan wilayah secara terpadu oleh seluruh sektor. Titik tolak pendekatan tersebut adalah rencana yang sinergi dan mengacu kepada aktivitas ekonomi, sosial, keberlanjutan lingkungan hidup, potensi wilayah dan kearifan lokal, serta rencana tata ruang wilayah. Pembangunan wilayah perlu didukung oleh kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta melibatkan swasta dan masyarakat.

Dalam konteks pengembangan wilayah, untuk memudahkan pengelolaan di wilayah Indonesia yang sangat luas, pengembangan wilayah dibagi menurut wilayah pulau/kepulauan. Setiap pulau/kepulauan memiliki potensi tersendiri. Potensi atau tema pengembangan wilayah per pulau/kepulauan tersebut yaitu sebagai berikut:

1) **Pulau Sumatera.** Tema besar pengembangan wilayah Pulau Sumatera adalah: pintu gerbang perdagangan internasional; industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, timah, bauksit, dan kaolin; lumbung energi nasional, termasuk pengembangan energi terbarukan biomassa; hilirisasi komoditas batu bara; dan percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim (kelautan).

2) **Pulau Jawa.** Tema besar pengembangan wilayah Pulau Jawa adalah: sebagai lumbung pangan nasional; sebagai salah satu pintu gerbang destinasi wisata terbaik dunia; sebagai pendorong sektor industri dan jasa nasional; dan percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim (kelautan).

3) **Pulau Papua.** Tema besar pada wilayah Pulau Papua adalah: percepatan pengembangan industri komoditas lokal perkebunan, peternakan, kehutanan; percepatan pengembangan ekonomi kemaritiman; percepatan pengembangan hilirisasi industri pertambangan, migas dan tembaga; penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah dan masyarakat; percepatan pengembangan pariwisata budaya dan alam; peningkatan kawasan konservasi dan daya dukung lingkungan; dan pengembangan kawasan ekonomi inklusif dan berkelanjutan berbasis wilayah kampung masyarakat adat.

4) **Pulau Kalimantan.** Tema besar pada pengembangan wilayah Pulau Kalimantan adalah: mempertahankan fungsi kalimantan sebagai paru-paru dunia; salah satu lumbung pangan nasional; pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, dan karet; dan lumbung energi nasional dengan pengembangan hilirisasi komoditas batu bara, bauksit, bijih besi, gas alam cair, pasir zirkon, dan pasir kuarsa.

5) **Pulau Bali dan Nusa Tenggara.** Tema Besar pada pengembangan wilayah Pulau Bali adalah: sebagai lumbung pangan nasional; sebagai salah satu pintu gerbang destinasi

wisata terbaik dunia; sebagai pendorong sektor industri dan jasa nasional; dan percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim (kelautan). sedangkan tema besar pada pengembangan wilayah Kepulauan Nusa Tenggara adalah: pintu gerbang pariwisata ekologis; pengembangan industri perikanan, garam, dan rumput laut; pengembangan industri berbasis peternakan sapi dan perkebunan jagung; dan pengembangan industri mangan, dan tembaga.

6) **Kepulauan Maluku.** Tema besar pada pengembangan wilayah Kepulauan Maluku adalah: produsen makanan laut dan lumbung ikan nasional; pengembangan industri berbasis komoditas perikanan; pengembangan industri pengolahan berbasis nikel, dan tembaga; dan pariwisata bahari.

7) **Pulau Sulawesi.** Tema besar pada pengembangan wilayah Pulau Sulawesi adalah: pengembangan industri berbasis rotan, aspal, nikel, bijih besi, dan gas bumi; pintu gerbang perdagangan internasional dan kawasan timur; lumbung pangan nasional dengan pengembangan industri kakao, padi, dan jagung; pengembangan industri berbasis logistik; dan percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri perikanan dan pariwisata bahari.

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran strategis Kementerian PUPR, dilakukan perencanaan, pemrograman, dan pembangunan infrastruktur PUPR melalui pendekatan pembangunan wilayah yang dituangkan dalam 35 Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). Pengembangan berbasis WPS merupakan suatu pendekatan pembangunan yang memadukan antara pengembangan wilayah dengan "*market driven*", yang mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan infrastruktur berkelanjutan. Gambar 3.2 menampilkan Esensi WPS yang memiliki kawasan industri dan perkotaan.

Pengembangan WPS memiliki beberapa asas. Asas pertama yaitu efisiensi yang berbasis daya dukung, daya tampung, dan fungsi lingkungan fisik terbangun pada wilayah yang dikembangkan. Asas selanjutnya adalah manfaat dalam skala ekonomi serta sinergitas dalam menyediakan infrastruktur transportasi. Pengembangan WPS diharapkan mampu meningkatkan konektivitas dalam lingkup nasional maupun internasional, mengurangi kesenjangan antara pasokan dan kebutuhan energi terbarukan untuk tenaga listrik, pemenuhan kebutuhan layanan dasar permukiman yang layak bagi masyarakat, mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh serta meningkatan keandalan dan keberlanjutan layanan sumber daya air baik untuk pemenuhan air minum, sanitasi, dan irigasi guna menunjang ketahanan air dan pangan. Pengembangan WPS diharapkan juga mempertimbangkan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) pada setiap WPS.

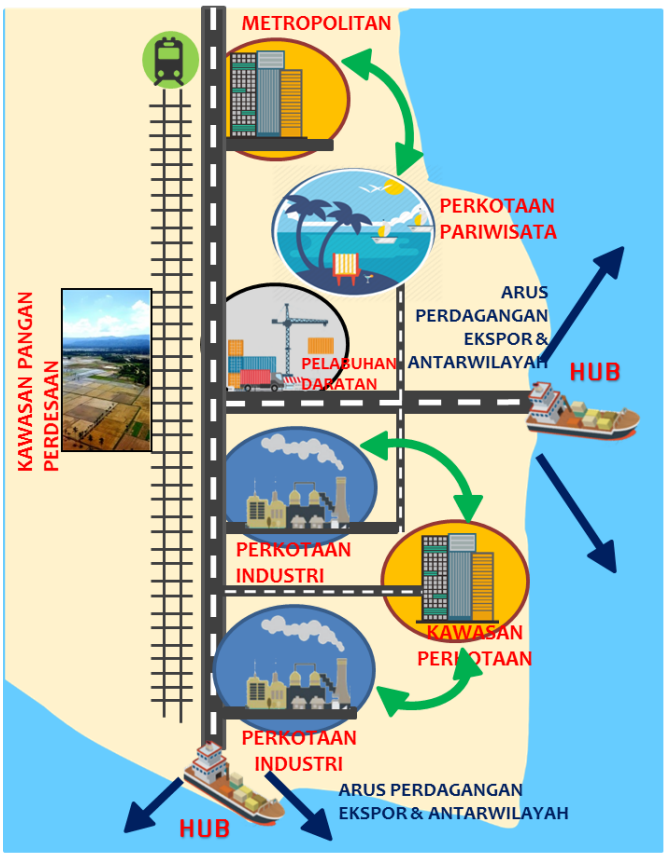

Gambar 3. 2 Esensi Wilayah Pengembangan Strategis

Esensi pengembangan WPS yaitu pembangunan infrastruktur wilayah setiap WPS diarahkan untuk mempercepat pembangunan fisik di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kawasan sesuai dengan klasternya. Wilayah yang diutamakan adalah WPS di luar Jawa (Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua). Cara yang dapat dilaksanakan untuk mempercepat pembangunan tersebut yakni memaksimalkan keuntungan aglomerasi, menggali potensi dan keunggulan daerah, serta meningkatkan efisiensi dalam penyediaan infrastruktur dalam kawasan, antarkawasan, maupun antarWPS.

Pendekatan ini merupakan integrasi dari pendekatan sektoral, regional, dan makro ekonomi. Setiap WPS akan dikembangkan dengan mempertimbangkan potensi dan keunggulannya melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan, industri manufaktur, industri pangan, industri maritim, dan atau pariwisata antara lain dengan:

1. Pemenuhan pelayanan dasar bagi seluruh lapisan masyarakat serta mendukung kawasan perbatasan, pulau-pulau terluar, daerah tertinggal, dan daerah-daerah yang kapasitas pemerintahannya belum cukup memadai dalam memberikan pelayanan publik terkait infrastruktur PUPR;

2. Mendorong pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi termasuk ekonomi maritim dan peningkatan pemanfaatan potensi ekonomi dan sumber daya sebagai penggerak utama pertumbuhan dalam rangka percepatan dan perluasan pengembangan

ekonomi di masing-masing pulau dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan daerah melalui:

a. Pengembangan sentra ekonomi, pembangunan kawasan metropolitan baru di luar Pulau Jawa dan Bali sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang diarahkan menjadi pusat investasi dan penggerak pertumbuhan ekonomi bagi wilayah sekitarnya guna mempercepat pemerataan pembangunan di luar Jawa;

b. Pengembangan kemaritiman/kelautan dengan memanfaatkan sumber daya kelautan dan jasa maritim, yaitu peningkatan produksi perikanan, pengembangan energi dan mineral kelautan, pengembangan kawasan wisata bahari, industri maritime, dan perkapalan;

c. Pengembangan kota otonom di luar Pulau Jawa dan Bali khususnya di KTI sebagai pengendali arus urbanisasi ke Pulau Jawa yang diarahkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi bagi wilayah sekitarnya serta menjadi percontohan perwujudan kota berkelanjutan;

d. Pembangunan kota baru publik yang mandiri dan terpadu di sekitar kota atau kawasan perkotaan metropolitan di luar Pulau Jawa dan Bali yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah serta diarahkan sebagai pengendali urbanisasi di kota atau kawasan perkotaan metropolitan di luar Pulau Jawa-Bali.

e. Peningkatkan keterkaitan pembangunan kota-desa, dengan memperkuat pusat-pusat pertumbuhan perkotaan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) atau Pusat Kegiatan Wilayah (PKW).

3. Mempercepat pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan fokus pada PKSN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan (dengan membangun kota lintas batas yang diharapkan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan sebagai halaman depan negara yang berdaulat, berdaya saing, dan aman); serta membangun kawasan perkotaan dan perdesaan dengan mempertimbangkan RTRW melalui pengembangan untuk pengentasan daerah tertinggal.

4. Meningkatkan peran dan fungsi sekaligus perbaikan manajemen pembangunan, pemberian bimbingan teknis dan penerapan standard pelayanan minimal (SPM) di 35 WPS untuk diarahkan sebagai pusat kegiatan berskala global guna meningkatkan daya saing dan kontribusi ekonomi.

5. Penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana dengan meningkatkan kapasitas pengendali daya rusak air serta meningkatkan kapasitas masyarakat dalam rangka mengurangi indeks risiko bencana pada wilayah yang memiliki indeks risiko bencana tinggi untuk mengurangi kerugian ekonomi akibat kejadian bencana di masa mendatang.

Selanjutnya pembangunan infrastruktur PUPR pada setiap WPS akan dipadukan dengan sasaran pokok dan program nasional sebagai berikut:

Pertama, dengan pengembangan 10 (sepuluh) Kawasan Srategis Pariwisata Nasional (KSPN) Prioritas di antaranya di Pulau Sumatera (Danau Toba dan Tanjung Kelayang); Pulau Jawa (Kepulauan Seribu, Tanjung Lesung, Borobudur, dan Bromo-Tengger-Semeru); Kepulauan Nusa Tenggara (Mandalika dan Labuan Bajo); Pulau Sulawesi (Wakatobi); dan Kepulauan Maluku (Morotai).

Kedua, dipadukan dengan program pengembangan Kawasan Industri Prioritas (KIP), di antaranya di Pulau Sumatera (Kuala Tanjung, Sei Mangkei, dan Tanggamus); Pulau Jawa (Sayung, Kendal, dan JIIPE); Kalimantan (Ketapang, Landak, Batulicin, dan Jorong); Pulau Sulawesi (Palu, Morowali, Bantaeng, Bitung, dan Konawe); Kepulauan Maluku (Halmahera Timur); dan Pulau Papua (Teluk Bintuni).

Ketiga, dipadukan dengan program pengembangan perkotaan Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) di Pulau Sumatera, Pulau Jawa-Bali, Kepulauan Nusa Tenggara, Pulau Kalimantan, Kepulauan Maluku, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua.

Keempat, dipadukan dengan program pengembangan Tol Laut (pelabuhan *hub* dan pelabuhan *feeder*) yang di antaranya di Pulau Sumatera (Malahayati, Belawan, Kuala Tanjung, Teluk Bayur, Panjang, Batu Ampar, Jambi: Talang Duku, dan Palembang: Boom Bar); Pulau Jawa (Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Tanjung Emas); Pulau Kalimantan (Sampit, Banjarmasin, Samarinda, Balikpapan, Kariangau, dan Pontianak); Pulau Bali dan Nusa Tenggara (Kupang); Pulau Sulawesi (Makassar, Pantoloan, Kendari, dan Bitung); Kepulauan Maluku (Ternate: A. Yani dan Ambon); dan Pulau Papua (Sorong dan Jayapura). Jalur rencana pelabuhan *hub* dan *feeder* ditampilkan pada Gambar 3.4.

Kelima, dipadukan dengan program-program lain yang membutuhkan infrastruktur bidang PUPR.

Di dalam WPS, dibutuhkan Keterpaduan perencanaan dan kesinkronan program (fungsi, lokasi, waktu, besaran, dan dana) antara infrastruktur dengan pengembangan berbagai kawasan strategis baik perkotaan, industri, maritim/pelabuhan, pariwisata, dan *hinterland* perdesaan. Hal ini dimaksudkan agar wilayah tersebut dapat berkembang menjadi wilayah yang kawasan pertumbuhannya saling terhubungkan, sebagai strategi untuk meningkatkan/menciptakan spesialisasi, komplementaritas (saling isi), sinergi dan skala ekonomi wilayah, serta membentuk kawasan perkotaan polisentris sebagai aglomerasi antar kawasan pertumbuhan/kota yang bertetangga dengan *hinterland* pedesaannya. Dengan demikian, wilayah-wilayah yang memiliki daya saing tinggi dapat disiapkan untuk meningkatkan daya saing Indonesia secara global.

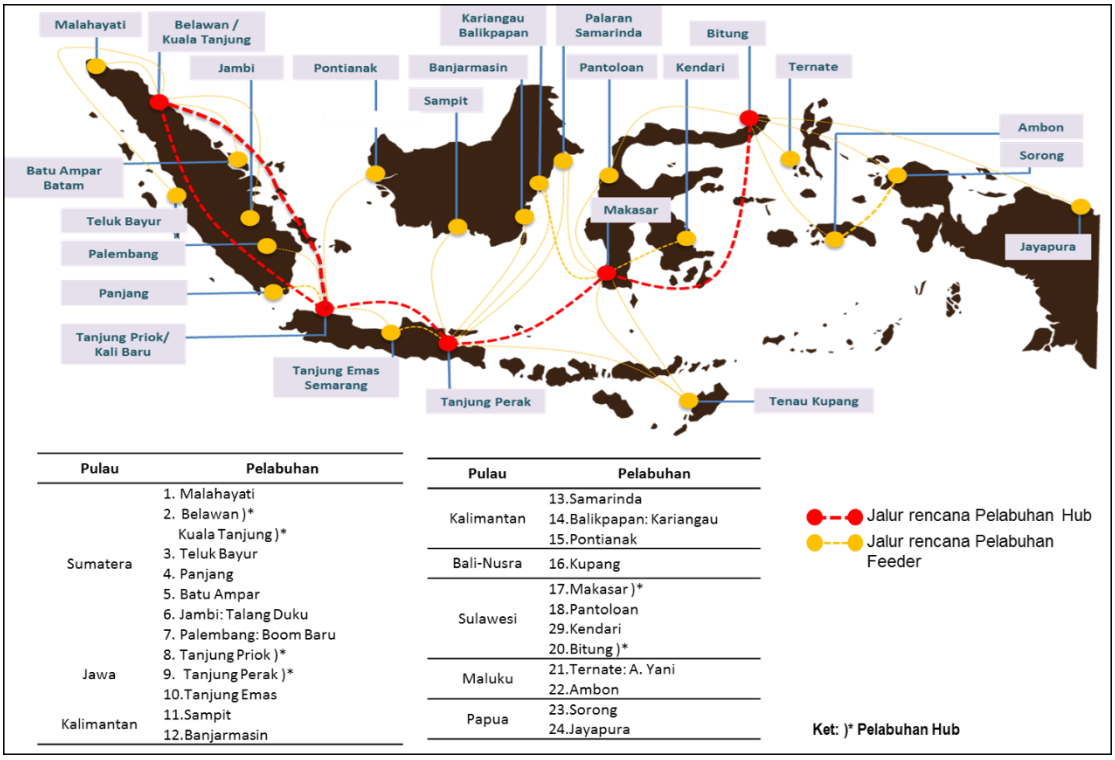

Pulau	Pelabuhan
Sumatera	1. Malahayati 2. Belawan)* Kuala Tanjung)* 3. Teluk Bayur 4. Panjang 5. Batu Ampar 6. Jambi: Talang Duku 7. Palembang: Boom Baru 8. Tanjung Priok)*
Jawa	9. Tanjung Perak)* 10.Tanjung Emas
Kalimantan	11.Sampit 12.Banjarmasin

Pulau	Pelabuhan
Kalimantan	13.Samarinda 14.Balikpapan: Kariangau 15.Pontianak
Bali-Nusra	16.Kupang
Sulawesi	17.Makasar)* 18.Pantoloan 29.Kendari 20.Bitung)*
Maluku	21.Ternate: A. Yani 22.Ambon
Papua	23.Sorong 24.Jayapura

Sumber: RPJMN 2015-2019

Gambar 3.3 Jalur Rencana Pelabuhan *Hub* dan Pelabuhan *Feeder*

Ilustrasi arah WPS seluruh pulau ditampilkan pada Gambar 3.4. Setiap wilayah pulau/kepulauan tersebut dipilah ke dalam 35 WPS yang dikelompokkan ke dalam 4 kelompok, yaitu: Kelompok WPS pusat pertumbuhan terpadu; kelompok WPS pusat pertumbuhan sedang berkembang; dan kelompok WPS pertumbuhan baru. Ke-35 WPS tersebar di seluruh pulau dan kepulauan yaitu: Pulau Sumatera (6 WPS), Pulau Sulawesi (5 WPS), Pulau Kalimantan (4 WPS), Kepulauan Maluku (2 WPS), Pulau Bali-Nusa Tenggara (5 WPS), Pulau Papua (4 WPS), Pulau Jawa (8 WPS), dan Pulau-Pulau Kecil Terluar (1 WPS).

Dalam hal pengembangan WPS, kawasan perkotaan diharapkan menjadi salah satu pusat pertumbuhan yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah. Renstra Kementerian PUPR 2015-2019 telah menetapkan arah kebijakan pengembangan kawasan perkotaan yaitu membangun kota berkelanjutan dan berdaya saing menuju masyarakat kota yang sejahtera berdasarkan karakter fisik, potensi ekonomi, dan budaya lokal. Pengembangan kawasan perkotaan diharapkan berperan dalam mengelola urbanisasi dengan baik, mengatasi penjalaran permukiman yang tidak teratur, serta menyediakan infrastruktur dasar yang layak untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan kawasan perkotaan dilaksanakan dengan menterpadukan perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR di kawasan perkotaan dengan pengembangan wilayah antarsektor, antardaerah, dan antartingkat pemerintahan.

Pengukuran aspek-aspek yang terkait pengembangan WPS diperlukan untuk mengukur keberhasilan WPS. Aspek-aspek tersebut meliputi pengurangan gap pertumbuhan antara kawasan yang sudah berkembang dengan yang belum berkembang, tingkat keterpaduan

perencanaan dan pemrograman dengan pelaksanaan (deviasi), tingkat sinkronisasi program (waktu, fungsi, lokasi, dan besaran), disparitas kebutuhan dengan pemrograman, serta tingkat pemberian bimbingan teknis kepada pemerintah daerah. Informasi arah pembangunan WPS seluruh pulau sebagaimana pada peta WPS diuraikan pada Lampiran II.

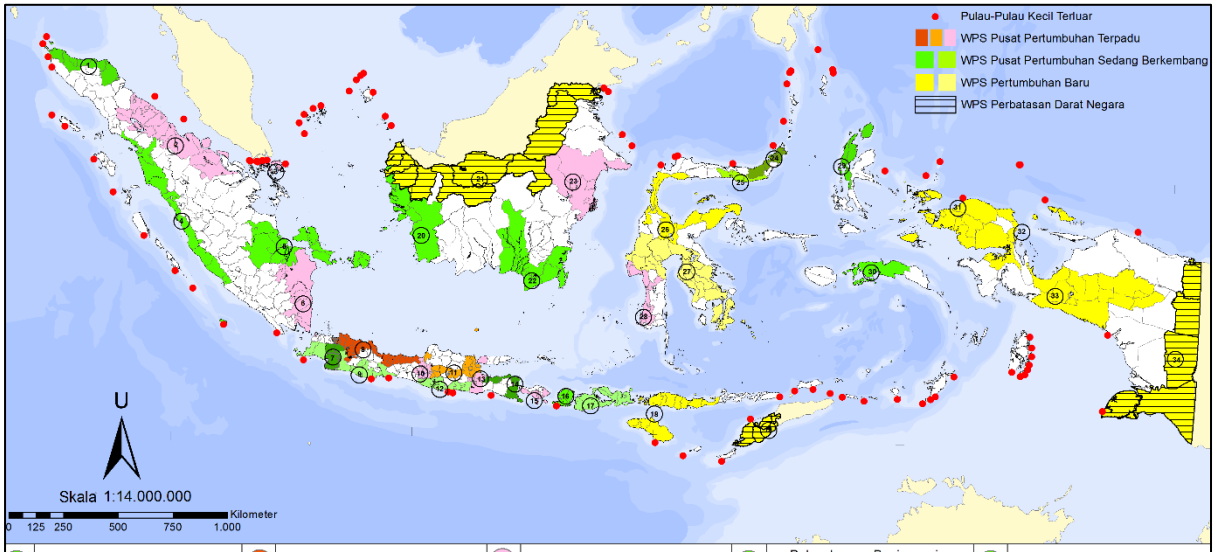

1	Sabang-Banda Aceh-Langsa	8	Jakarta-Cirebon-Semarang	15	Gilimanuk-Denpasar-Padang Bay	22	Palangkaraya-Banjarmasin-Batulicin	29	Ternate-Sofifi-Daruba
2	Medan-Tebing Tinggi-Dumai-Pekanbaru	9	Tanjung Lesung-Sukabumi-Pangandaran-Cilacap	16	Tanjung-Mataram-Mandalika	23	Balikpapan-Samarinda-Maloy	30	Ambon-Masohi
3	Batam-Tanjung Pinang	10	Yogyakarta-Solo-Semarang	17	Sumbawa Besar-Dompu-Bima	24	Bitung-Manado-Amurang-Kotamobagu	31	Sorong-Manokwari
4	Sibolga-Padang-Bengkulu	11	Semarang-Surabaya	18	Waingapu-Labuan Bajo-Ende-Maumere	25	Gorontalo-Kotamobagu	32	Biak-Manokwari-Bintuni
5	Jambi-Palembang-Pangkal Pinang-Tanjung Pandan	12	Yogyakarta-Prigi-Blitar-Malang	19	Kupang-Atambua	26	Palu-Banggai	33	Nabire-Enarotali-Wamena
6	Merak-Bakauhuni-Bandar Lampung-Palembang-Tanjung Api-Api	13	Malang-Surabaya-Bangkalan	20	Ketapang-Pontianak-Singkawang-Sambas	27	Mamuju-Makale-Palopo-Kendari-Bau bau-Wangi wangi	34	Jayapura-Merauke
7	Jakarta-Bogor-Ciawi-Sukabumi	14	Surabaya-Pasuruan-Banyuwangi	21	Temajuk-Sebatik	28	Makassar-Pare Pare-Mamuju	35	Pulau-Pulau Kecil Terluar

Gambar 3. 4 Wilayah Pengembangan Strategis

3.2.2 Strategi

Pengembangan wilayah pada tahun 2015-2019 ditujukan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan wilayah antara KBI dan KTI. Cara-cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi kesenjangan tersebut yaitu percepatan dan pemerataan pembangunan wilayah dengan menekankan keunggulan kompetitif perekonomian daerah berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia berkualitas, penyediaan infrastruktur, serta meningkatkan kemampuan ilmu dan teknologi secara terus menerus. Untuk mendorong pengembangan wilayah tersebut perlu adanya keterpaduan pembangunan baik antarsektor, antarwilayah, antarkawasan, maupun antarpemerintahan. Keterpaduan pembangunan infrastruktur bidang PUPR dengan pengembangan wilayah meliputi perencanaan, pemrograman, dan pelaksanaan pembangunan akan diwujudkan melalui strategi sebagai berikut:

1. Meningkatkan keterpaduan pembangunan infrastruktur bidang PUPR antardaerah, antarsektor, dan antartingkat pemerintahan, dengan sasaran program sebagai berikut:

    1) Meningkatnya keterpaduan perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR dengan pengembangan kawasan strategis baik di perkotaan, klaster industri, maupun perdesaan, yang akan dicapai melalui:

a. Perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek, meliputi:
   a) Penyusunan kebijakan teknis keterpaduan perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur PUPR dengan pengembangan wilayah;
   b) Penyusunan strategi nasional pengembangan perkotaan;
   c) Penyusunan rencana terpadu pembangunan infrastruktur PUPR 7 pulau/kepulauan;
   d) Penyusunan skema pembiayaan infrastruktur PUPR;
   e) Penyusunan indeks rasio infrastruktur;
   f) Evaluasi dampak manfaat keterpaduan infrastruktur; dan
   g) Perumusan rekomendasi dukungan infrastruktur pada sektor yang terkait PUPR.

b. Pemrograman jangka menengah dan jangka pendek, meliputi:
   a) Sinkronisasi program jangka pendek dalam entitas wilayah (pulau/kepulauan, kawasan strategis, dan kawasan perkotaan);
   b) Evaluasi kinerja keterpaduan; dan
   c) Evaluasi kelayakan/kesiapan program dan kegiatan;

c. Perencanaan penguatan kelembagaan dalam rangka keterpaduan

2) Meningkatnya keterpaduan infrastruktur PUPR dengan pengembangan kawasan strategis baik di perkotaan, klaster industri, maupun perdesaan, yang akan dicapai melalui:

   a. Perencanaan pengembangan kawasan dan koridor
   b. Pengembangan keterpaduan infrastruktur untuk keterpaduan kawasan, meliputi:
      a) Pelaksanaan percontohan/inkubasi pengembangan kawasan;
      b) Pengembangan kota baru dan cerdas (*smart cities*); dan
      c) Peremajaan perkotaan (*urban redelopment/urban renewal*)
   c. Pelaksanaan NSPK pengembangan kawasan strategis dan kawasan perkotaan;
   d. Pelaksanaan dan fasilitasi percepatan pengadaan tanah

2. Strategi-strategi di atas diimplementasikan dalam suatu program pengembangan infrastruktur wilayah, yang meliputi kegiatan:

   1) Kegiatan Dukungan Manajemen Pengembangan Infrastruktur Wilayah;
   2) Kegiatan Perencanaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
   3) Kegiatan Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
   4) Kegiatan Pengembangan Kawasan Strategis Perdesaan; dan
   5) Kegiatan Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan

   Adapun Kegiatan Dukungan Manajemen Pengembangan Infrastruktur Wilayah, mempunyai sasaran sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu sebagai berikut :

   1) Layanan administrasi kepegawaian, melalui:
      a) Pelaksanaan administrasi kepegawaian

2) Layanan perencanaan program anggaran dan evaluasi kinerja serta pengelolaan data informasi, melalui:
   a) Pelaksanaan kegiatan perencanaan program dan anggaran
   b) Pelaksanaan evaluasi kinerja
   c) Pengelolaan layanan data informasi

3) Layanan hukum, kerjasama, dan informasi, melalui:
   a) Pengelolaan produk dan bantuan hukum
   b) Fasilitasi kerjasama
   c) Penyediaan layanan informasi

4) Layanan administrasi keuangan, umum, dan barang milik negara (BMN), melalui:
   a) Penyusunan laporan keuangan
   b) Pengelolaan BMN
   c) Layanan perkantoran
   d) Layanan rumah tangga

5) Layanan perkantoran, melalui:
   a) Penyusunan laporan perkantoran
   b) Layanan tata usaha dan kearsipan

Kegiatan Perencanaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memiliki sasaran sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu sebagai berikut:

1) Kebijakan dan strategi keterpaduan pembangunan infrastruktur wilayah bidang PUPR antarsektor/wilayah yang disusun dan difasilitasi, melalui :
   a) Penyusunan rancangan rekomendasi rumusan kebijakan dan strategi serta pedoman
   b) Finalisasi rancangan rekomendasi rumusan kebijakan dan strategi serta legalisasi
   c) Fasilitasi/sosialisasi

2) Rencana jangka panjang dan rencana strategis pembangunan infrastruktur terpadu bidang PUPR, melalui :
   a) Penyusunan rancangan rencana strategis dan rumusan rencana
   b) Finalisasi rancangan dan legalisasi rencana strategis dan finalisasi rancangan rumusan rencana
   c) Fasilitasi/sosialisasi

3) Rencana induk dan rencana pengembangan infrastruktur bidang PUPR terpadu antarsektor, antarWPS, antartingkat pemerintahan, dan antarpulau yang disusun dan difasilitasi, melalui:
   a) Penyusunan rancangan rencana induk dan rencana pengembangan
   b) Finalisasi rancangan dan legalisasi rencana induk dan rencana pengembangan
   c) Fasilitasi/sosialisasi

4) Layanan data dan informasi pengembangan infrastruktur terpadu bidang PUPR, melalui :
   a) Pengumpulan data dan informasi
   b) Pengolahan data dan informasi
   c) Publikasi data dan informasi

5) Fasilitasi kerjasama regional dan global yang dilaksanakan, melalui:
   a) Pelaksanaan fasilitasi
   b) Monitoring dan evaluasi

6) Rekomendasi hasil analisis dampak dan manfaat keterpaduan pengembangan infrastruktur PUPR, melalui :
   a) Monitoring dan evaluasi
   b) Kajian/analisis

7) Program jangka panjang dan jangka menengah keterpaduan yang telah disinkronisasi, melalui :
   a) Monitoring dan evaluasi
   b) Sinkronisasi
   c) Penyusunan rekomendasi

8) Skema pembiayaan pengembangan yang disusun dan difasilitasi, melalui :
   a) Penyusunan rancangan rumusan
   b) Fasilitasi/sosialisasi

9) Layanan teknis terkait kebijakan teknis perencanaan pengembangan kawasan dan infrastruktur bidang PUPR, melalui:
   a) Pemberian bimbingan teknis
   b) Monitoring dan evaluasi

10) Rekomendasi hasil evaluasi keterpaduan perencanaan, pemrograman, dan pengembangan infrastruktur PUPR dalam kawasan, antarkawasan, dan antarWPS, melalui:
   a) Penyusunan rekomendasi
   b) Monitoring dan evaluasi

11) Layanan perkantoran, melalui :
   a) Penyusunan program dan anggaran
   b) Evaluasi kinerja dan pelaporan
   c) Pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, dan BMN
   d) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga

Adapun Kegiatan Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, mempunyai sasaran sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu sebagai berikut :

1) Pedoman teknis sinkronisasi program jangka pendek dan tahunan keterpaduan pembangunan infrastruktur wilayah bidang PUPR, melalui :
   a) Penyusunan pedoman
   b) Legalisasi pedoman
   c) Fasilitasi dan sosialisasi pedoman

2) Program tahunan keterpaduan yang telah disinkronisasi untuk 35 WPS, melalui :
   a) Penyusunan rumusan program
   b) Fasilitasi dan koordinasi
   c) Pemantauan dan evaluasi

3) Layanan teknis terkait sinkronisasi program jangka pendek dan tahunan keterpaduan pembangunan infrastruktur wilayah bidang PUPR, melalui:
   a) Penyusunan dokumen
   b) Bimbingan teknis
   c) Fasilitasi dan koordinasi

4) Rekomendasi hasil evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan dan program keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang PUPR, melalui :
   a) Penyusunan rekomendasi
   b) Pelaksanaan evaluasi kerja
   c) Fasilitasi dan koordinasi

5) Kinerja pelaksanaan kebijakan dan program keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang PUPR, melalui :
   a) Penyusunan dokumen kebijakan
   b) Pelaksanan evaluasi program
   c) Fasilitasi dan koordinasi

6) Layanan data dan informasi keterpaduan antara pengembangan kawasan dan infrastruktur bidang PUPR, melalui :
   a) Pengelolaan data dan informasi
   b) Penyusunan data program
   c) Pemantauan pembangunan infrastruktur

7) Layanan perkantoran, melalui :
   a) Pembayaran gaji dan tunjangan
   b) Pelaksanaan operasional dan pemeliharaan gedung
   c) Penyediaan peralatan dan mesin kantor
   d) Penyusunan kebijakan dan regulasi

Adapun Kegiatan Pengembangan Kawasan Strategis Perdesaan, mempunyai sasaran sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu sebagai berikut :

1) Kebijakan teknis keterpaduan pengembangan kawasan strategis dan antar kawasan strategis dengan pembangunan infrastruktur bidang PUPR, melalui :

a) Penyiapan materi teknis pedoman/kebijakan
b) Penyusunan pedoman/kebijakan
c) Penyusunan dokumen legal

2) Rencana keterpaduan pengembangan kawasan strategis dan antar kawasan strategis dengan pembangunan infrastruktur bidang PUPR, melalui :
   a) Penyiapan rencana pengembangan kawasan
   b) Perumusan rencana induk inkubasi kawasan
   c) Perumusan *site plan* anjungan cerdas

3) Layanan data dan informasi keterpaduan pengembangan kawasan strategis dengan infrastruktur bidang PUPR, melalui :
   a) Penyusunan layanan data dan informasi
   b) Pemutakhiran layanan data dan informasi

4) Area inkubasi pada kawasan strategis yang dibangun, melalui :
   a) Penyiapan rencana induk area inkubasi
   b) Penyusunan rencana teknis area inkubasi
   c) Perumusan rencana teknis area pengungkit kawasan
   d) Perumusan *site plan* anjungan cerdas
   e) Implementasi fisik anjungan cerdas

5) Fasilitasi pencadangan dan pengadaan tanah yang dilaksanakan untuk 35 WPS, melalui :
   a) Penyiapan pencadangan tanah yang difasilitasi
   b) Perencanaan pengadaan tanah yang difasilitasi
   c) Penentuan lokasi pengadaan tanah untuk area inkubasi di 35 WPS

6) Layanan perkantoran, melalui :
   a) Penyiapan layanan perkantoran
   b) Penyusunan layanan perkantoran

Kegiatan Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan mempunyai sasaran sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu sebagai berikut :

1) Kebijakan teknis keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dengan infrastruktur bidang PUPR, melalui :
   a) Penyiapan kebijakan
   b) Penyusunan kebijakan
   c) Penyusunan dokumen kebijakan
   d) Proses legalisasi

2) Rencana keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dengan infrastruktur bidang PUPR, melalui :
   a) Penyiapan rencana pengembangan
   b) Perumusan rencana pengembangan

3) Layanan data dan informasi keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dengan infrastruktur bidang PUPR, melalui :
   a) Penyiapan layanan data dan informasi
   b) Penyusunan layanan data dan informasi

4) Program jangka pendek keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dengan infrastruktur bidang PUPR, melalui :
   a) Penyiapan sinkronisasi program jangka pendek
   b) Penyusunan sinkronisasi program jangka pendek

5) Area inkubasi pada kawasan perkotaan yang dibangun, melalui :
   a) Penyiapan rencana teknis area inkubasi
   b) Penyusunan rencana teknis area inkubasi
   c) Implementasi rencana teknis area inkubasi

6) Pedoman teknis, rencana, dan program keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dengan infrastruktur bidang PUPR, melalui :
   a) Penyiapan dokumen teknis
   b) Penyusunan dokumen teknis
   c) Implementasi dokumen teknis

7) Layanan teknis keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dengan infrastruktur bidang PUPR, melalui :
   a) Penyiapan layanan teknis keterpaduan
   b) Penyusunan layanan teknis keterpaduan

8) Layanan perkantoran, melalui :
   a) Penyiapan layanan perkantoran
   b) Penyusunan layanan perkantoran

3.3 Kerangka Regulasi

Kerangka Regulasi adalah kebutuhan regulasi yang dapat berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Instruksi Presiden, atau Peraturan Menteri PUPR. Kerangka regulasi diarahkan untuk memfasilitasi, mendorong dan/atau mengatur perilaku penyelenggara pembangunan serta masyarakat termasuk swasta dalam rangka pembangunan infrastruktur bidang PUPR. Kerangka regulasi juga disusun sebagai instrumen untuk memecahkan permasalahan yang penting, mendesak, dan memiliki dampak besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan bidang PUPR serta lebih jauh dalam rangka pencapaian sasaran nasional.

Regulasi mengenai keterpaduan pembangunan infrastruktur bidang PUPR dengan pengembangan wilayah yaitu Peraturan Menteri PUPR Nomor 13.1/PRT/M/2015 tentang Renstra Kementerian PUPR tahun 2015-2019. Regulasi tersebut hanya menjelaskan 35 WPS serta program utama sampai tahun 2019. Regulasi yang masih dibutuhkan yaitu regulasi

yang mengatur setiap WPS serta kawasan-kawasan yang fokus dikembangkan di dalamnya terkait pembangunan infrastruktur bidang PUPR serta kejelasan prioritas program/kegiatan terlebih dengan adanya lintas program/kegiatan nasional. Penyelarasan dengan kerangka regulasi pada Prolegnas terkait keterpaduan infrastruktur dengan pengembangan wilayah juga dibutuhkan demi mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

Regulasi keterpaduan pembangunan infrastruktur bidang PUPR dengan pengembangan wilayah juga dibutuhkan pada tingkat pemerintah pusat. Regulasi tersebut harus dapat memberikan kejelasan peran, fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan. Dengan demikian, permasalahan-permasalahan saat berkoordinasi baik antarsektor, antardaerah, maupun antarpemerintahan dapat dicegah. Integrasi kerangka regulasi ke dalam perencanaan strategis pengembangan wilayah penting sebagai dasar penyusunan peraturan perundang-undangan sesuai kebutuhan masing-masing sektor.

Kerangka regulasi disiapkan untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan bidang PUPR. Kerangka regulasi untuk memampukan BPIW melaksanakan kebijakan dan strateginya antara lain peraturan perundang yang terkait dengan Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur bidang PUPR dengan Pengembangan Wilayah terutama dalam pengkajian dan pengelolaan WPS. Rincian rencana regulasi yang akan disusun dituliskan pada Lampiran I.

3.4 Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan merupakan perangkat kementerian yang meliputi struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara. Kerangka kelembagaan digunakan untuk mendukung Nawacita serta melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian. Kerangka kelembagaan disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Kementerian PUPR ditugaskan untuk mendukung upaya mewujudkan ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi. Lebih lanjut, amanat lain yang diemban Kementerian PUPR yaitu penguatan konektivitas nasional, permukiman yang layak huni dan berkelanjutan, penyediaan jasa konstruksi dan sistem investasi infrastruktur yang memadai, fasilitasi penyediaan rumah, pengusahaan penyediaan pembiayaan, membina SDM konstruksi dan aparatur Kementerian PUPR, pemberdayaan organisasi dinas terkait di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, serta keterpaduan pembangunan infrastruktur dengan pengembangan wilayah antarsektor, antardaerah, dan antarpemerintahan.

Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015, BPIW merupakan salah satu organisasi baru di Kementerian PUPR. BPIW dibentuk sebagai inovasi kelembagaan Kementerian PUPR dengan tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan strategi keterpaduan antara pengembangan kawasan dengan infrastruktur PUPR. Tujuannya adalah untuk menterpadukan pengembangan kawasan dengan infrastruktur PUPR melalui penyusunan kebijakan teknis dan strategi. Sebelum terbentuknya BPIW, tugas perencanaan, pemrograman, dan pengembangan wilayah masih bersifat sektoral, masuk dalam tugas masing-masing direktorat di Kementerian PUPR. Perencanaan (planning) yang

selama ini melekat di beberapa unit kerja seperti di Pusat Kajian Strategis, Biro Perencanaan, Bina Program dan sebagainya, sekarang menjadi tugas utama BPIW. Sejak disatukan menjadi sebuah unit kerja sendiri, maka pengembangan infrastruktur harus selalu terpadu dengan pengembangan kawasan sehingga berbagai hambatan dapat teratasi pasca pengembangan infrastruktur. Lebih lanjut, peran BPIW dalam kerangka manajemen organisasi PUPR ditujukan untuk mencapai sasaran strategis sesuai misi Kementerian PUPR, yaitu untuk meningkatkan keterpaduan perencanaan dan pemrograman pengembangan infrastruktur PUPR (gambar 3.5).

Gambar 3.5 Manajemen Organisasi PUPR dalam Mencapai Sasaran Strategis Sesuai Misi Kementerian PUPR

Tugas utama BPIW tersebut dibagikan kepada empat Pusat dan satu Sekretariat Badan. Pusat melaksanakan tugas substantif penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan strategi, sementara Sekretariat Badan memberikan dukungan administrasi. Keempat Pusat dan satu Sekretariat Badan tersebut adalah (gambar 3.6):

1) Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR.
2) Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR.
3) Pusat Pengembangan Kawasan Strategis.
4) Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan.
5) Sekretariat BPIW.

Keterpaduan pembangunan infrastruktur dengan pengembangan wilayah membutuhkan kerangka kelembagaan sebagai pelaksana program sektor dan lintas sektor agar efektif, efisien dan akuntabel. Kementerian PUPR disusun berdasarkan hubungan internal dan antarlembaga, sumber daya manusia aparatur, tugas, fungsi, kewenangan, peran, kebijakan desentralisasi, dan kelembagaan didasarkan pula pada prinsip-prinsip tata kelola lembaga yang baik.

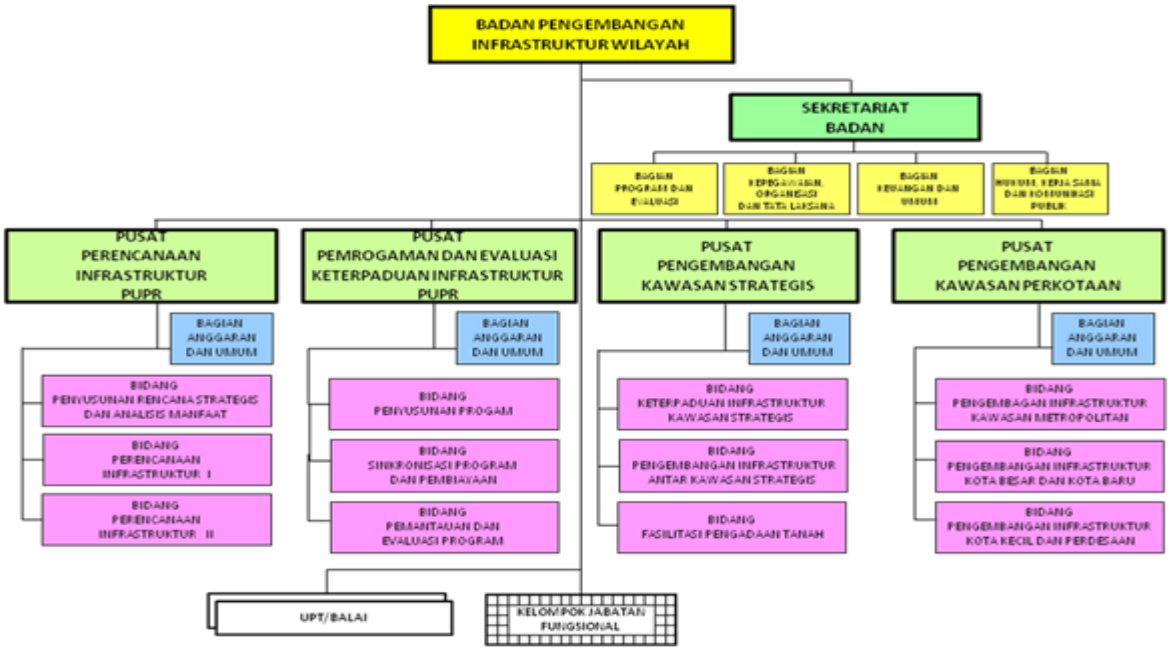

Gambar 3.6 Struktur Organisasi BPIW

Upaya penguatan kapasitas kelembagaan BPIW perlu dilakukan. Penguatan kelembagaan keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR dengan pengembangan wilayah tidak harus diartikan berupa pembentukan unit/wadah baru. Penguatan kapasitas kelembagaan tersebut sangat strategis mengingat kapasitas kelembagaan BPIW akan menjadi pondasi yang kokoh bagi keberhasilan pelaksanaan keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR dengan pengembangan wilayah.

BPIW telah melakukan evaluasi kelembagaan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Pemerintah. Terdapat 3 (tiga) dimensi yang dinilai, yaitu kompleksitas, formalisasi dan sentralisasi. Berdasarkan hasil analisis evaluasi kelembagaan tersebut, nilai evaluasi kelembagaan BPIW adalah sebesar 74,01 yang artinya Organisasi Cukup Efisien, dan secara struktural membutuhkan penyesuaian secara bertahap.

Upaya penguatan kerangka kelembagaan BPIW akan dilakukan dengan mewujudkan lembaga yang berkualitas sehingga terwujud:

1) Tugas dan fungsi yang jelas, kewenangan yang tepat, serta struktur organisasi yang efisien, sehingga terhindar dari adanya duplikasi fungsi, benturan kewenangan, dan inefisiensi belanja operasional;
2) Tatalaksana dan hubungan kerja yang efektif, efisien, transparan dan sinergis; dan
3) Profesionalitas, integritas, dan kinerja SDM aparatur yang mampu melaksanakan visi, misi, tujuan, arah kebijakan, strategi operasional, program, dan kegiatan untuk mencapai sasaran strategis Kementerian PUPR.

Terkait dengan tatalaksana dan hubungan kerja yang efektif, efisien, transparan dan sinergis, BPIW telah mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2008 dan ISO 9001:2015 terkait dengan

pelaksanaan tugas dan fungsi di beberapa unit kerja, antara lain ditampilkan pada gambar 3.7.

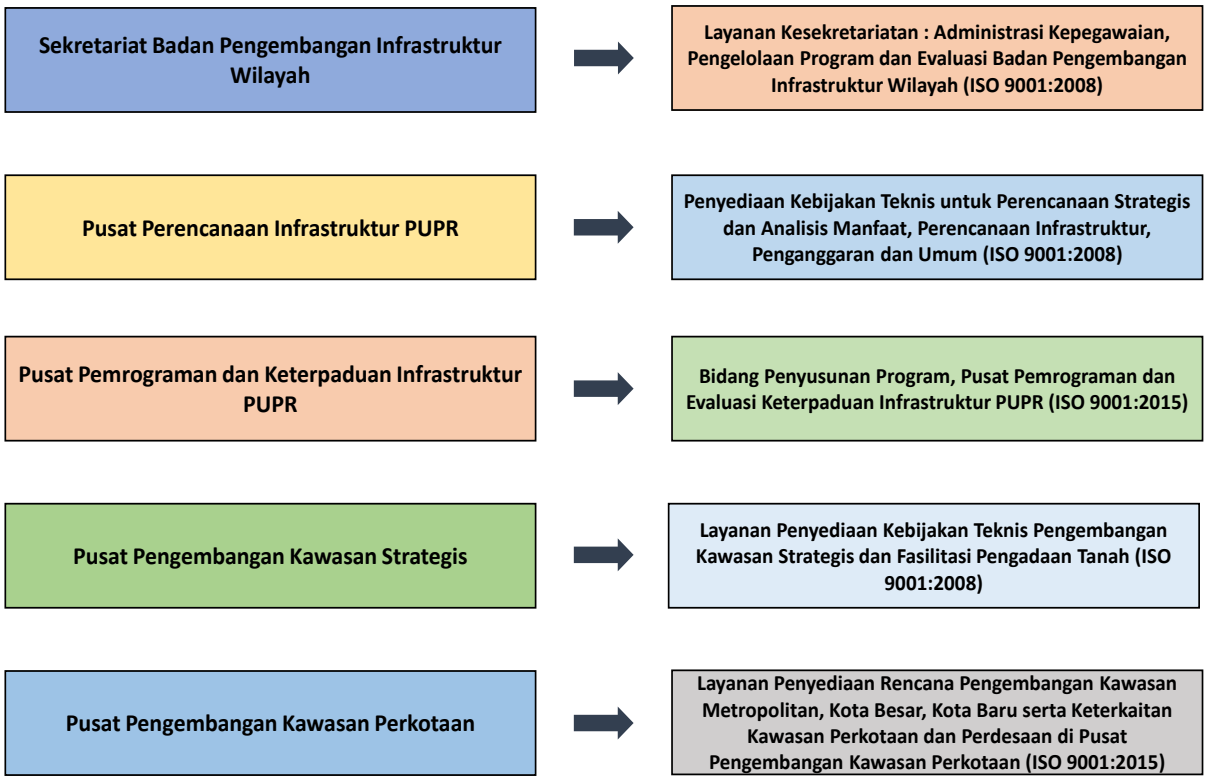

Gambar 3.6 Sertifikasi ISO 9001:2008 dan ISO 9001:2015 di BPIW

Selanjutnya, target tahun 2017 adalah seluruh unit kerja di lingkungan BPIW telah mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2015. Sumber Daya Manusia memegang peran vital dalam jumlah pemenuhan tujuan dan pencapaian sasaran-sasaran BPIW. Sumber daya manusia yang berkualitas dengan jumlah yang memadai menjadi kebutuhan utama BPIW guna mewujudkan tata kelola kelembagaan yang baik. Saat ini, jumlah SDM di BPIW adalah 178 orang dengan status PNS (status per tanggal 1 Desember 2016). Untuk meningkatkan kinerja lembaga, BPIW membutuhkan lebih banyak SDM sebagai dukungan manajemen dengan tetap memperhatikan efektivitas dan efisiensi. Berdasarkan analisa beban kerja yang telah disusun, BPIW membutuhkan pegawai sejumlah 348, sehingga masih ada kekurangan pegawai sejumlah 170 orang (Tabel 3.1).

Tabel 3.1 Struktur Organisasi BPIW

No	Unit Kerja	Kebutuhan	Eksisting (PNS)	Selisih
1	Sekretariat BPIW	71	39	32
2	Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR	71	33	38
3	Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR	62	34	28
4	Pusat Pengembangan Kawasan Strategis	76	37	39
5	Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan	68	35	33
Total Unit Organik		348	178	170

Selain itu, Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) juga diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi unit-unit organisasi di BPIW. Saat ini, keberadaan JFT di BPIW masih sangat terbatas, yaitu sejumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri dari JFT Perencana, Penata Ruang, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan dan Arsiparis. Berdasarkan analisa beban kerja yang telah disusun, BPIW membutuhkan 165 JFT, yang terdiri dari 143 JFT Perencana (jenjang Ahli Pertama, Ahli Muda dan Ahli Madya), 12 JFT Surveyor Pemetaan Tanah (jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda), 5 JFT Arsiparis (jenjang Ahli Pertama) dan 5 JFT Arsiparis (jenjang Terampir).

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Program dan Target Kinerja

Program didefinisikan sebagai instrumen kebijakan yang berisi beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR. Program bertujuan mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, dan/atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan. Nomenklatur program di kementerian PUPR secara umum dikategorikan menjadi 2 (dua) jenis. Kegiatan didefinisikan sebagai bagian dari program yang dilaksanakan oleh satuan kerja setingkat esselon II, yang terdiri dari sejumlah tindakan pengerahan sumber daya, baik berupa personil, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, dan/atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input)* untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa. Nomenklatur program untuk BPIW adalah Program Teknis**,** yang merupakan program Kementerian PUPR, yang menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran/masyarakat (pelayanan eksternal).

Target kinerja dalam hal ini diartikan sebagai target kinerja sasaran, baik sasaran strategis, sasaran program, maupun sasaran kegiatan yang dilengkapi dengan indikatornya. Target kinerja sasaran menunjukkan tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh kementerian yang meliputi program dan kegiatan dalam periode waktu yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan target kinerja baik tingkat kegiatan, program, maupun kementerian didasarkan pada kriteria-kriteria di antaranya:

1. Target menggambarkan angka kuantitatif dan satuan yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja sasaran;
2. Penetapan target sesuai dengan indikator kinerjanya, logis, dan struktur data yang jelas. Dalam hal ini capaian pada tahun 2014 yang merupakan jumlah dari rencana target baru ditambah dengan sisa yang belum tercapai pada periode 2010-2014.

Secara garis besar, Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah, yang meliputi kegiatan-kegiatan, target sasaran Kementerian *(outcome-impact),* sasaran program *(outcome)*, dan sasaran kegiatan (*output*) adalah sebagai berikut **:**

A. Dukungan Manajemen Pengembangan Infrastruktur Wilayah

Kegiatan dan target kinerja manajemen pengembangan infrastruktur wilayah adalah sebagai berikut:

1) Layanan administrasi kepegawaian
   Target : 44 (empat puluh empat) macam layanan perkantoran yang akan diberikan 100% untuk memenuhi kebutuhan selama lima tahun. Target pertahunnya sesuai dengan kebutuhan.

2) Layanan perencanaan program anggaran dan evaluasi kinerja serta pengelolaan data informasi dukungan manajemen
   Target : 27 (dua puluh tujuh) perencanaan program dan anggaran serta 21 (dua puluh satu) layanan data yang akan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan selama lima tahun. Target pertahunnya sesuai dengan kebutuhan.

3) Layanan hukum, kerjasama, dan informasi
   Target : 17 (tujuh belas) produk dan bantuan hukum, 19 (Sembilan belas) fasilitasi kerjasama, serta 18 (delapan belas) layanan informasi yang akan diberikan untuk memenuhi kebutuhan selama lima tahun. Target pertahunnya sesuai dengan kebutuhan.

4) Layanan administrasi keuangan, umum, dan BMN
   Target : 50 (lima puluh) subkegiatan layanan yang akan diberikan 100% untuk memenuhi kebutuhan selama lima tahun. Target pertahunnya sesuai dengan kebutuhan.

5) Layanan perkantoran
   Target : 20 (dua puluh) layanan yang akan diberikan untuk memenuhi kebutuhan selama lima tahun. Target pertahunnya sesuai dengan kebutuhan.

B. Kegiatan Perencanaan Infrastruktur PUPR

Kegiatan dan target kinerja perencanaan infrastruktur PUPR adalah sebagai berikut:

1) Kebijakan dan strategi keterpaduan pembangunan infrastruktur wilayah bidang PUPR antarsektor/wilayah
   Target : 19 (sembilan belas) dokumen rumusan kebijakan dan strategi serta 14 (empat belas) pedoman perencanaan dan pengembangan infrastruktur terpadu bidang PUPR akan diselesaikan untuk memenuhi kebutuhan kebijakan strategi selama lima tahun. Target pertahunnya sesuai dengan kebutuhan.

2) Rencana jangka panjang dan rencana strategis pembangunan infrastruktur terpadu bidang PUPR
   Target : 48 (empat puluh delapan) rencana yang akan diselesaikan untuk memenuhi kebutuhan selama lima tahun. Target pertahunnya sesuai dengan kebutuhan.

3) Rencana induk dan rencana pengembangan infrastruktur bidang PUPR terpadu antarsektor, antarWPS, antar tingkat pemerintahan, dan antarpulau
Target : 64 (enam puluh empat) rencana yang akan diselesaikan untuk memenuhi kebutuhan selama lima tahun. Target pertahunnya sesuai dengan kebutuhan.

4) Layanan data dan informasi pengembangan infrastruktur terpadu bidang PUPR
Target : 14 (empat belas) jenis data yang akan diselesaikan untuk memenuhi kebutuhan selama lima tahun. Target pertahunnya sesuai dengan kebutuhan.

5) Fasilitasi kerjasama regional dan global
Target : 20 (dua puluh) fasilitasi yang akan diselesaikan untuk memenuhi kebutuhan selama lima tahun. Target pertahunnya sesuai dengan kebutuhan.

6) Rekomendasi hasil analisis dampak dan manfaat keterpaduan pengembangan infrastruktur PUPR
Target : 20 (dua puluh) rekomendasi yang akan diselesaikan untuk memenuhi kebutuhan selama lima tahun. Target pertahunnya sesuai dengan kebutuhan.

7) Program jangka panjang dan jangka menengah keterpaduan yang telah disinkroisasi.
Target : 5 (lima) rencana program yang telah ditetapkan yang akan diselesaikan untuk memenuhi kebutuhan selama lima tahun. Target pertahunnya sesuai dengan kebutuhan.

8) Skema pembiayaan pengembangan yang disusun dan difasilitasi
Target : 9 (sembilan) sub kegiatan fasilitasi termasuk skema investasi yang akan diselesaikan untuk memenuhi kebutuhan selama lima tahun. Target pertahunnya sesuai dengan kebutuhan.

9) Layanan teknis terkait kebijakan teknis perencanaan pengembangan kawasan dan infrastruktur bidang PUPR
Target : 4 (empat) jenis layanan teknis yang akan diselesaikan untuk memenuhi kebutuhan selama lima tahun. Target pertahunnya sesuai dengan kebutuhan.

10) Rekomendasi hasil evaluasi keterpaduan perencanaan, pemrograman, dan pengembangan infrastruktur PUPR dalam kawasan, antarkawasan, dan antarWPS
Target : 13 (tiga belas) fasilitasi termasuk rekomendasi yang akan diselesaikan memenuhi kebutuhan selama lima tahun. Target pertahunnya sesuai dengan kebutuhan.

11) Layanan perkantoran
Target : 31 (tiga puluh satu) macam layanan perkantoran yang akan diselesaikan untuk memenuhi kebutuhan selama lima tahun. Target pertahunnya sesuai dengan kebutuhan.

C. Kegiatan Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR

Kegiatan dan target kinerja pemrograman dan evaluasi keterpaduan infrastruktur PUPR adalah sebagai berikut:

1) Pedoman teknis sinkronisasi program jangka pendek dan tahunan keterpaduan pembangunan infrastruktur wilayah bidang PUPR
   Target : 29 (dua puluh sembilan) pedoman teknis yang akan diselesaikan untuk memenuhi kebutuhan selama lima tahun. Target pertahunnya sesuai dengan kebutuhan.

2) Program tahunan keterpaduan yang telah disinkronisasi untuk 35 WPS.
   Target : 170 (seratus tujuh puluh) rumusan yang akan diselesaikan untuk memenuhi kebutuhan selama lima tahun. Target pertahunnya sesuai dengan kebutuhan.

3) Layanan teknis terkait sinkronisasi program jangka pendek dan tahunan keterpaduan pembangunan infrastruktur wilayah bidang PUPR
   Target : 83 (delapan puluh tiga) kegiatan fasilitasi yang akan diselesaikan untuk memenuhi kebutuhan selama lima tahun. Target pertahunnya sesuai dengan kebutuhan.

4) Rekomendasi hasil evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan dan program keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang PUPR
   Target : 98 (sembilan puluh delapan) kegiatan fasilitasi evaluasi termasuk rekomendasi yang akan diselesaikan untuk memenuhi kebutuhan selama lima tahun. Target pertahunnya sesuai dengan kebutuhan.

5) Kinerja pelaksanaan kebijakan dan program keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang PUPR
   Target : 44 (empat puluh empat) kebijakan keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur PUPR yang akan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan selama lima tahun. Target pertahunnya sesuai dengan kebutuhan.

6) Layanan data dan informasi keterpaduan antara pengembangan kawasan dan infrastruktur bidang PUPR
   Target : 32 (tiga puluh dua) jenis data termasuk data keterpaduan yang akan diselesaikan untuk memenuhi kebutuhan selama lima tahun. Target pertahunnya sesuai dengan kebutuhan.

7) Layanan perkantoran
   Target : 100% dari seluruh layanan yang diberikan yang akan diselesaikan memenuhi kebutuhan selama lima tahun. Target pertahunnya sesuai dengan kebutuhan.

D. Kegiatan Pengembangan Kawasan Strategis non Perkotaan

Kegiatan dan target kinerja pengembangan kawasan strategis non perkotaan adalah sebagai berikut:

1) Kebijakan teknis keterpaduan pengembangan kawasan strategis dan antarkawasan strategis dengan pembangunan infrastruktur bidang PUPR
   Target : 18 (delapan belas) pedoman teknis perencanaan dan pemrograman serta 12 (dua belas) kebijakan teknis yang akan diselesaikan untuk memenuhi kebutuhan selama lima tahun. Target pertahunnya sesuai dengan kebutuhan.

2) Rencana keterpaduan pengembangan kawasan strategis dan antarkawasan strategis dengan pembangunan infrastruktur bidang PUPR
   Target : 99 (Sembilan puluh Sembilan) rencana yang akan diselesaikan untuk memenuhi kebutuhan selama lima tahun. Target pertahunnya sesuai dengan kebutuhan.

3) Layanan data dan informasi keterpaduan pengembangan kawasan non perkotaan dengan infrastruktur bidang PUPR
   Target : 10 (sepuluh) layanan data yang dibutuhkan yang akan diselesaikan untuk memenuhi kebutuhan selama lima tahun. Target pertahunnya sesuai dengan kebutuhan.

4) Area inkubasi pada kawasan strategis yang dibangun
   Target : 38 (tiga puluh delapan) rencana teknis area inkubasi dan 31 (tiga puluh satu) area inkubasi yang akan diselesaikan untuk memenuhi kebutuhan selama lima tahun. Target pertahunnya sesuai dengan kebutuhan.

5) Fasilitasi pencadangan dan pengadaan tanah yang dilaksanakan untuk 35 WPS
   Target : 149 (seratus empat puluh sembilan) lokasi yang akan diselesaikan untuk memenuhi kebutuhan selama lima tahun. Target pertahunnya sesuai dengan kebutuhan.

6) Layanan perkantoran
   Target : 25 (dua puluh lima) macam layanan perkantoran yang akan diberikan 100% untuk memenuhi kebutuhan selama lima tahun. Target pertahunnya sesuai dengan kebutuhan.

E. Kegiatan Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan

Kegiatan dan target kinerja pengembangan kawasan strategis perkotaan adalah sebagai berikut :

1) Kebijakan teknis keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dengan infrastruktur bidang PUPR
   Target : 26 (dua puluh enam) kebijakan teknis yang akan diselesaikan untuk memenuhi kebutuhan selama lima tahun. Target pertahunnya sesuai dengan kebutuhan.

2) Rencana keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dengan infrastruktur bidang PUPR
Target : 102 (seratus dua) rencana yang akan diselesaikan untuk memenuhi kebutuhan selama lima tahun. Target pertahunnya sesuai dengan kebutuhan.

3) Layanan data dan informasi keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dengan infrastruktur bidang PUPR
Target : 10 (sepuluh) layanan data yang dibutuhkan yang akan diselesaikan untuk memenuhi kebutuhan selama lima tahun. Target pertahunnya sesuai dengan kebutuhan.

4) Program jangka pendek keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dengan infrastruktur bidang PUPR
Target : 9 (Sembilan) rumusan program yang akan diselesaikan untuk memenuhi kebutuhan selama lima tahun. Target pertahunnya sesuai dengan kebutuhan.

5) Area inkubasi pada kawasan perkotaan yang dibangun
Target : 25 (dua puluh lima) rencana teknis dan 60 (enam puluh) area inkubasi yang akan diselesaikan untuk memenuhi kebutuhan selama lima tahun. Target pertahunnya sesuai dengan kebutuhan.

6) Pedoman teknis, rencana, dan program keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dengan infrastruktur bidang PUPR
Target : 25 (dua puluh lima) pedoman teknis yang dibutuhkan yang akan diselesaikan untuk memenuhi kebutuhan selama lima tahun. Target pertahunnya sesuai dengan kebutuhan.

7) Layanan Teknis keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dengan infrastruktur bidang PUPR
Target : 48 (empat puluh delapan) layanan teknis yang diberikan yang akan diselesaikan untuk memenuhi kebutuhan selama lima tahun. Target pertahunnya sesuai dengan kebutuhan.

8) Layanan perkantoran
Target : 5 (lima) macam layanan perkantoran yang akan diberikan 100% untuk memenuhi kebutuhan selama lima tahun. Target pertahunnya sesuai dengan kebutuhan.

4.2 Kerangka Pendanaan

Investasi pemerintah dalam pembangunan infrastruktur PUPR yang terpadu dengan pengembangan wilayah masih relatif belum sebesar kebutuhan lainnya ataupun dibandingkan dengan negara lainnya. Investasi tersebut sangat penting sebagai bentuk nyata peningkatan kesejahteraan masyarakat. Agar peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud, kerangka pendanaan pembangunan infrastruktur PUPR yang terpadu dengan pengembangan wilayah diarahkan pada kebijakan pembiayaan terpadu. Untuk melaksanakan

arah, kebijakan, strategi, program, dan kegiatan utama pembangunan infrastruktur PUPR diperlukan dukungan kerangka pendanaan yang maksimal. Perhitungan pendanaan harus memperhatikan alokasi pendanaan program (penjumlahan dari alokasi pendanaan kegiatan), alokasi pendanaan kegiatan (penjumlahan dari alokasi pendanaan o*utput*), dan alokasi pendanaan *output* (hasil proyeksi berdasarkan volume target).

Alokasi pendanaan untuk BPIW dalam RPJMN selama 5 tahun adalah sebesar Rp3.467.000.000.000,00. Sedangkan kebutuhan pendanaan berdasarkan perhitungan BPIW dalam Renstra Kementerian PUPR 2015-2019 yaitu sebesar Rp5.385.000.000.000,00. Rincian pendanaan per kegiatan per tahun terdapat pada Tabel 4.1. Setiap tahun Anggaran pada Tabel 4.1 mengalami kenaikan yang disebabkan kuantitas perencanaan pembangunan infrastruktur di tiap wilayah di indonesia akan semakin meningkat. Perencanaan ini akan berupa suatu program yang akan dilaksanakan setiap tahunnya. Selain itu, bila alokasi pendanaan tahun tertentu tidak terpenuhi secara penuh, selisihnya akan diakumulasikan pada anggaran tahun setelahnya.

Berdasarkan hasil perhitungan BPIW, beberapa perbedaan struktur output dan pendanaan Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah dalam renstra dan RPJMN diantaranya disebabkan oleh :

1. Adanya perbedaan struktur organisasi dengan yang tercantum dalam RPJMN yaitu semula terdiri dari 6 unit Eselon II menjadi sebanyak 5 unit Eselon II. Hal ini berpengaruh terhadap struktur keluaran dan targetnya;
2. Adanya muatan pekerjaan pengembangan wilayah strategis termasuk inkubasinya serta fasilitasi pengadaan tanah. Hal ini berimplikasi perlunya penambahan dana.

Kompleksitas yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur PUPR yang terpadu dengan pengembangan wilayah harus diimbangi dengan kapasitas kemampuan dan sumber daya yang salah satunya adalah pendanaan. Pendanaan yang diberikan untuk membangun infrastruktur cenderung menurun tiap tahun. Apabila pada tahun 1992-1994, pembiayaan infrastruktur mencapai 5,34 % dari total Pendapatan Domestik Bruto (PDB), maka tahun 2002 nilainya semakin menurun menjadi hanya 2,33% dari total PDB. Padahal, untuk mencapai pertumbuhan PDB sebesar 6% per tahun, dibutuhkan pembiayaan infrastruktur sebesar 5% per tahun dari total PDB. Sedangkan pada tahun 2005-2009 bidang infrastruktur membutuhkan dana Rp227 triliun, sementara pemerintahan hanya menyediakan Rp127 triliun. Rp98 triliun diharapkan bisa ditutupi dari investasi swasta dan masyarakat sehingga terdapat kekurangan dana Rp9,8 triliun. Sehingga diperlukan skema pembiayaan Kerjasama Pemerintah Swasta (*Public Private Partnership*) serta kerjasama bilateral maupun multilateral.

Tabel 4.1 Rincian Pendanaan per Kegiatan per Tahun

Unit Organisasi	ANGGARAN (JUTA)					
	2015	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**Total**
Sekretariat Badan	140.342	165.000	180.000	190.000	200.000	875.342
Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR	72.380	100.000	137.154	147.154	157.154	613.842
Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR	89.664	120.000	162.154	177.154	192.154	741.126
Pusat Pengembangan Kawasan Strategis	111.210	313.840	408.308	458.308	508.308	1.799.974
Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan	111.904	250.000	300.000	330.000	363.000	1.354.904
Total	**525.500**	**948.840**	**1.187.616**	**1.302.616**	**1.420.616**	**5.385.188**

BAB V
PENUTUP

Renstra BPIW tahun 2015- 2019 merupakan arahan yang akan dijabarkan ke dalam rencana kegiatan unit kerja mandiri di lingkungan BPIW untuk mencapai sasaran strategis Kementerian PUPR dalam mendukung pencapaian sasaran nasional. Proses pencapaian sasaran Renstra PUPR 2015-2019 memerlukan koordinasi, konsolidasi, dan sinergi antarsektor, antardaerah, dan antarpemerintahan agar dapat mencapai kinerja yang maksimal dalam rangka meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan infrastruktur yang lebih merata dan berkelanjutan. Penyelenggaraan infrastruktur PUPR yang terpadu dengan pengembangan wilayah dalam mencapai target-target yang telah disepakati perlu dilandasi dengan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan yang optimal.

Dalam rangka sinergisasi dengan pemerintah daerah, pemerintah akan memberikan perhatian yang lebih besar pada aspek peningkatan kapasitas daerah sehingga kompetensi dan kemandirian pemerintah daerah segera dapat dicapai. Pencapaian saran target rencana strategis BPIW 2015-2019 memerlukan pendanaan yang relatif besar, sehingga diperlukan dorongan untuk meningkatkan kemitraan pemerintah dan swasta yang lebih besar dalam rangka mengembangkan alternatif pembiayaan keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR dengan pengembangan wilayah. Dalam hal ini, tugas BPIW adalah menyiapkan regulasi terkait, membangun iklim yang semakin kondusif dan kompetitif, perbaikan sistem hukum dan kelembagaan, perluasan akses dalam mengurangi risiko investasi, serta mendorong pengembangan inovasi dan teknologi.

Tantangan pembangunan ke depan dalam konteks otonomi daerah adalah bagaimana menemukan formula pembiayaan investasi infrastruktur yang tepat, melalui skema-skema kreatif atau non-konvensional. Berbagai insentif untuk menarik investasi dapat dilakukan terkait kelayakan proyek dan pembiayaan melalui penerapan Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) berupa pemberian dukungan pemerintah, seperti pembebasan tanah atau pembangunan yang sebagian dibangun oleh pemerintah.

Melalui konsistensi pelaksanaan Renstra BPIW tahun 2015-2019 serta peran serta pemerintah, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat, diharapkan dapat mempercepat proses peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, koordinasi dan integrasi baik secara vertikal maupun horizontal yang semakin kuat dalam penyelenggaraan pembangunan bidang PUPR sangat diperlukan. Akhir kata, Renstra BPIW tahun 2015-2019 perlu dijabarkan ke dalam rencana kegiatan unit organisasi dan unit kerja Eselon II atau unit kerja mandiri di lingkungan BPIW secara konsisten.

Lampiran I

KERANGKA REGULASI

TABEL L-1. KERANGKA REGULASI

NO	ARAH KERANGKA DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN, DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET
1	Penyusunan Peraturan Menteri PUPR tentang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur	Penguat/turunan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Materi yang diatur: • Tata cara Penyusunan rencana strategis satminkal dan unit kerja • Tata cara Penyusunan evaluasi pencapaian target Renstra	Kementerian PUPR	Pusat 1 Pusat 2	2016-2019
2	Penyusunan Peraturan Menteri PUPR tentang Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur	Penguat/turunan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Materi yang diatur: • Alur kerja pemrograman infrastruktur PUPR • Alur kerja evaluasi keterpaduan pemrograman PUPR • Pedoman e-sinkronisasi program	Kementerian PUPR	Pusat 1 Pusat 2 Biro PAKLN	2016-2019

3	Penyusunan Peraturan Menteri PUPR tentang Petunjuk Teknis DAK Infrastruktur PUPR	Penguat/turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan Materi yang diatur: • Alur kerja evaluasi usulan DAK • Sistematika penyusunan usulan DAK • Pedoman e-proposal DAK	Kementerian PUPR	Pusat 1 Pusat 2 Biro PAKLN	2016-2019
4	Penyusunan Peraturan Menteri PUPR tentang Pembiayaan Infrastruktur Kerjasama Pemerintah Badan Usaha	Penguat/turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Materi yang diatur: • Petunjuk teknis pelaksanaan KPBU infrastruktur PUPR • Tata kerja model-model KPBU	Kementerian PUPR	Pusat 1 Pusat 2 Direktorat Bina Investasi DJBK	2016-2019
5	Rapermen PUPR tentang Kebijakan dan Strategi Pembangunan Infrastruktur PUPR Jangka Panjang	Dukungan Pencapaian Target Pembangunan Infrastruktur PUPR Jangka Panjang (2015-2025)	Kementerian PUPR	Pusat 1	2016-2019
6	Rapermen PUPR tentang Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur PUPR di Pulau atau Kepulauan	Dukungan Pencapaian Rencana Strategis Kementerian PUPR	Kementerian PUPR	Pusat 1 Pusat 2	2016-2019
7	Rapermen PUPR tentang Pedoman Pembangunan Infrastruktur PUPR Berbasis Kewilayahan	Dukungan Pencapaian Rencana Strategis Kementerian PUPR	Kementerian PUPR	Pusat 1	2016-2019
8	Rapermen PUPR tentang Pedoman Kelembagaan Pengelola Wilayah Pengembangan Strategis (WPS)	Dukungan Pencapaian Rencana Strategis Kementerian PUPR	Kementerian PUPR	Pusat 3	2016-2019

9	Rapermen PUPR tentang Pedoman Evaluasi Kelayakan Pengembangan Wilayah	Dukungan Pencapaian Rencana Strategis Kementerian PUPR	Kementerian PUPR	Pusat 1	2016-2019

Lampiran II

PROGRAM DI 35 WPS

TAHUN 2015 – 2019

PETA SEBARAN
WILAYAH PENGEMBANGAN STRATEGIS (WPS)

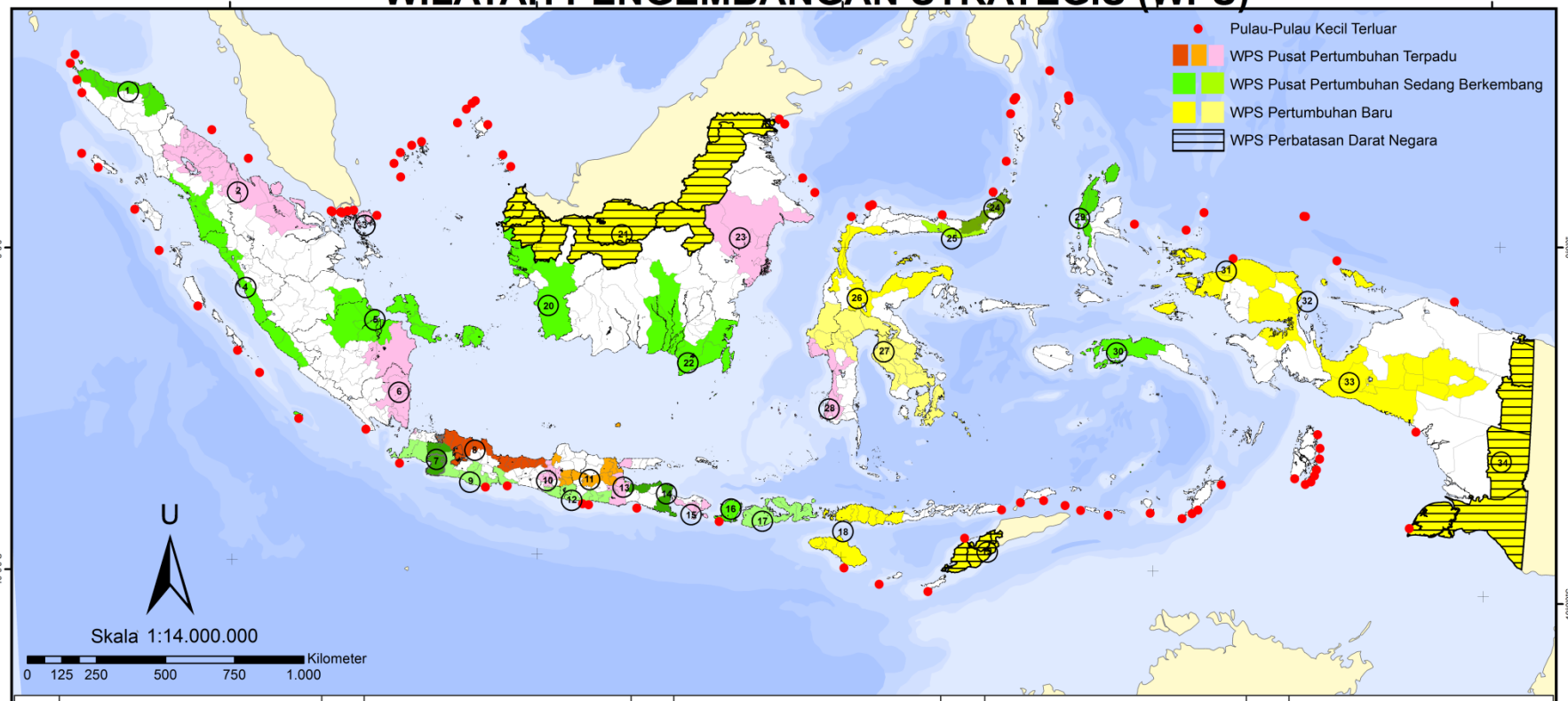

1	Sabang-Banda Aceh-Langsa	8	Jakarta-Cirebon-Semarang	15	Gilimanuk-Denpasar-Padang Bay	22	Palangkaraya-Banjarmasin-Batulicin	29	Ternate-Sofifi-Daruba
2	Medan-Tebing Tinggi-Dumai-Pekanbaru	9	Tanjung Lesung-Sukabumi-Pangandaran-Cilacap	16	Tanjung-Mataram-Mandalika	23	Balikpapan-Samarinda-Maloy	30	Ambon-Masohi
3	Batam-Tanjung Pinang	10	Yogyakarta-Solo-Semarang	17	Sumbawa Besar-Dompu-Bima	24	Bitung-Manado-Amurang-Kotamobagu	31	Sorong-Manokwari
4	Sibolga-Padang-Bengkulu	11	Semarang-Surabaya	18	Waingapu-Labuan Bajo-Ende-Maumere	25	Gorontalo-Kotamobagu	32	Biak-Manokwari-Bintuni
5	Jambi-Palembang-Pangkal Pinang-Tanjung Pandan	12	Yogyakarta-Prigi-Blitar-Malang	19	Kupang-Atambua	26	Palu-Banggai	33	Nabire-Enarotali-Wamena
6	Merak-Bakauhuni-Bandar Lampung-Palembang-Tanjung Api-Api	13	Malang-Surabaya-Bangkalan	20	Ketapang-Pontianak-Singkawang-Sambas	27	Mamuju-Makale-Palopo-Kendari-Bau bau-Wangi wangi	34	Jayapura-Merauke
7	Jakarta-Bogor-Ciawi-Sukabumi	14	Surabaya-Pasuruan-Banyuwangi	21	Temajuk-Sebatik	28	Makassar-Pare Pare-Mamuju	35	Pulau-Pulau Kecil Terluar

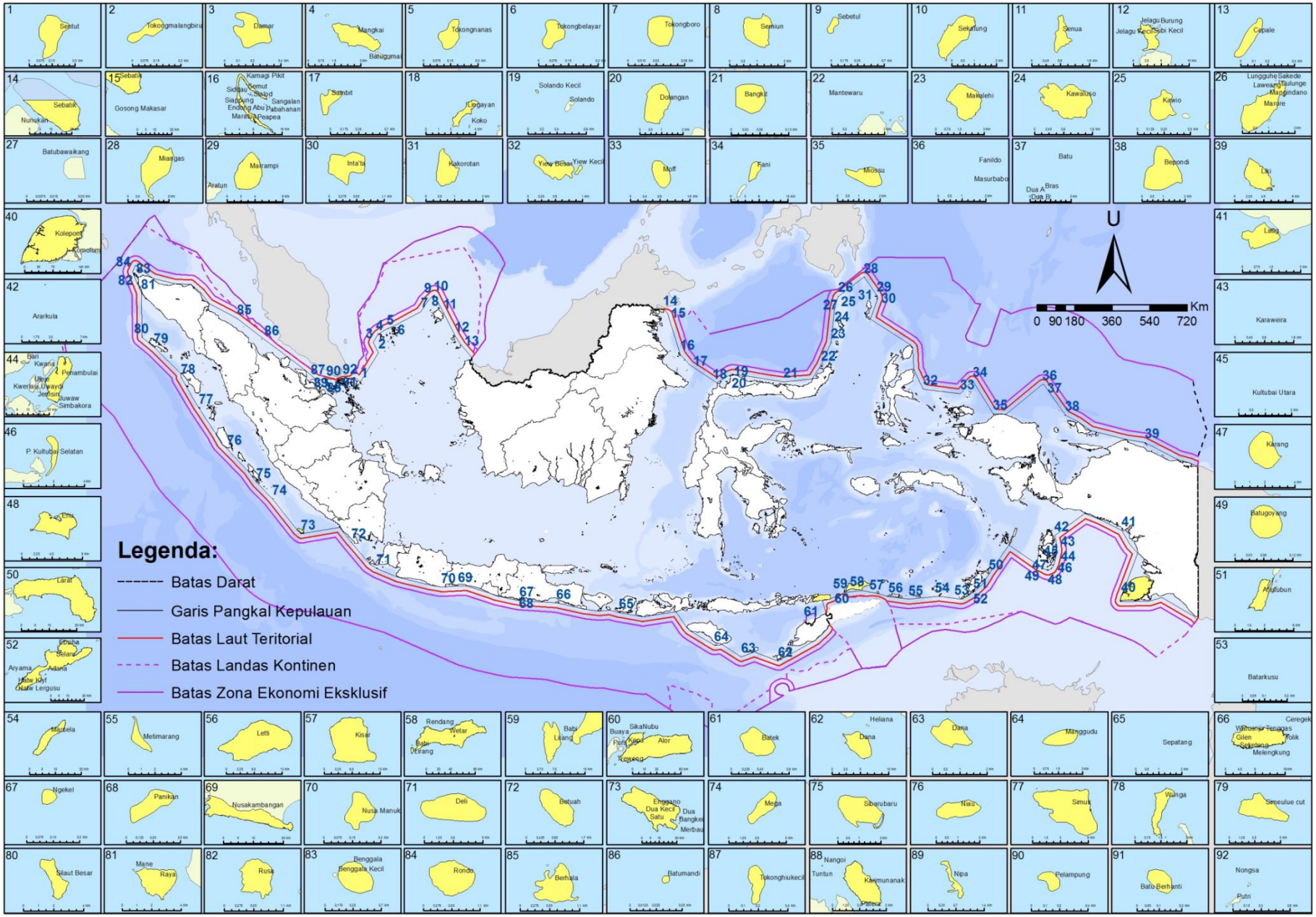
U
Km
0 90 180 360 540 720
Legenda:
Batas Darat
Garis Pangkal Kepulauan
Batas Laut Teritorial
Batas Landas Kontinen
Batas Zona Ekonomi Eksklusif

1. Sebaran Program Utama di WPS Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang Sabang-Banda Aceh-Langsa

TA 2015-2019

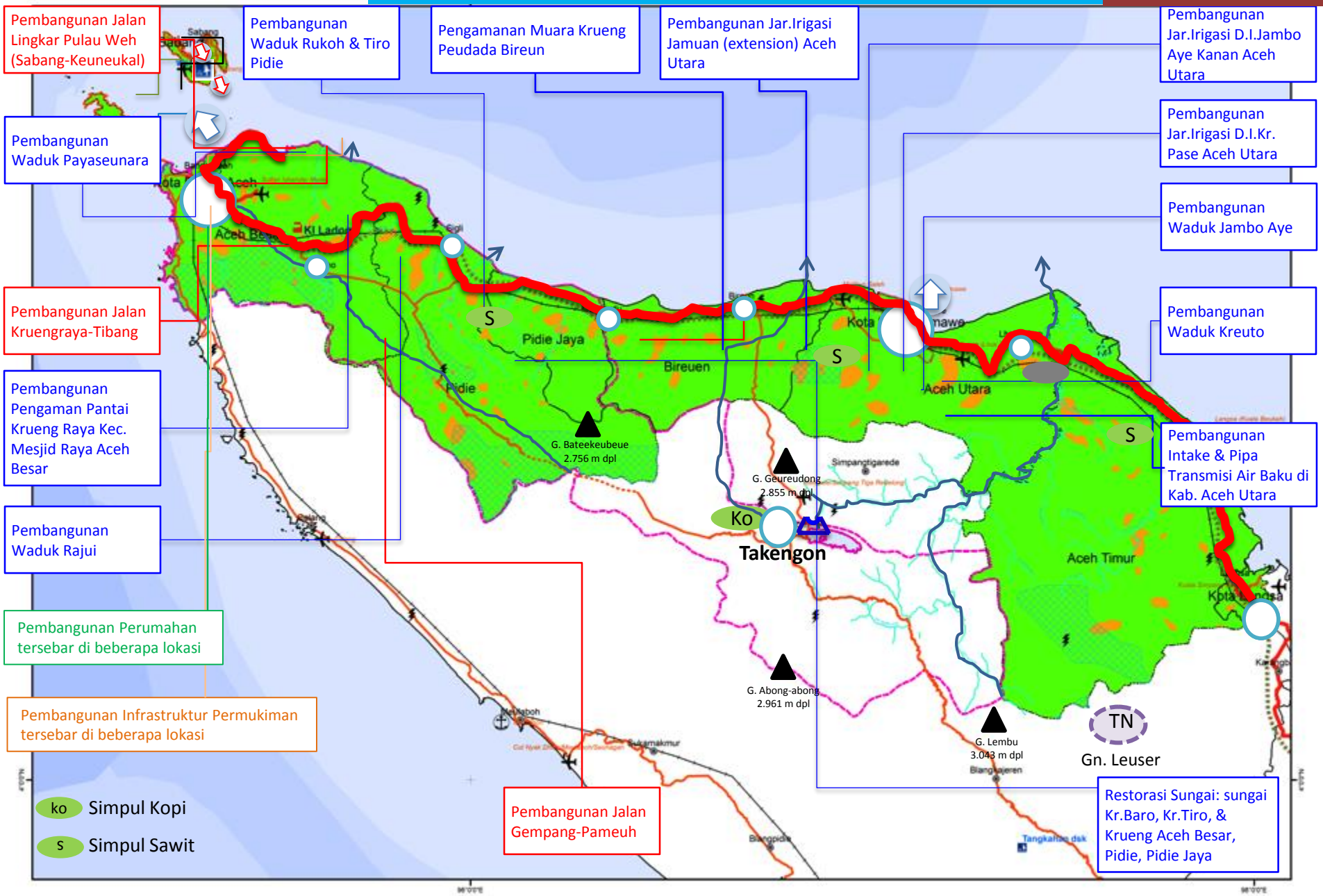

2. Sebaran Program Utama di WPS Pusat Pertumbuhan Terpadu Metro Medan-Tebing Tinggi-Dumai-Pekanbaru

TA 2015-2019

a. Pembangunan Jalan Tol Medan – Binjai
b. Pembangunna Jalan Tol Medan-Kualnamu- Tebing Tinggi
c. Pemabngunan Fly Over Pinang Baris, Katamso dan Gatot Subroto

Pembangunan Akses Bandara Kuala Namu

a. Pengendali Banjir S. Sabura, S. Kera Medan
b. Pengendali Banjir Deli Hilir
c. Pembangunan Transmisi Air Baku Metro Medan

a. Pembangunan Jalan Sei. Balai- Ujung Kubu
b. Pemabngunan jalan ujung kubu. K. Tanjung

a. Pembangunan Jalan KISM-Sp. Mayang – LimaPuluh -Sp. Inalum-K.Tanjung
b. Pemb Jalan Akses K. Tanjung

Pembangunan Waduk Lausimeme

Pembangunan Waduk Lau Gunung Kab. Karo

Pembangunan Jalan Tele-Pangururan

Pembangunan Waduk Lompatan Harimau

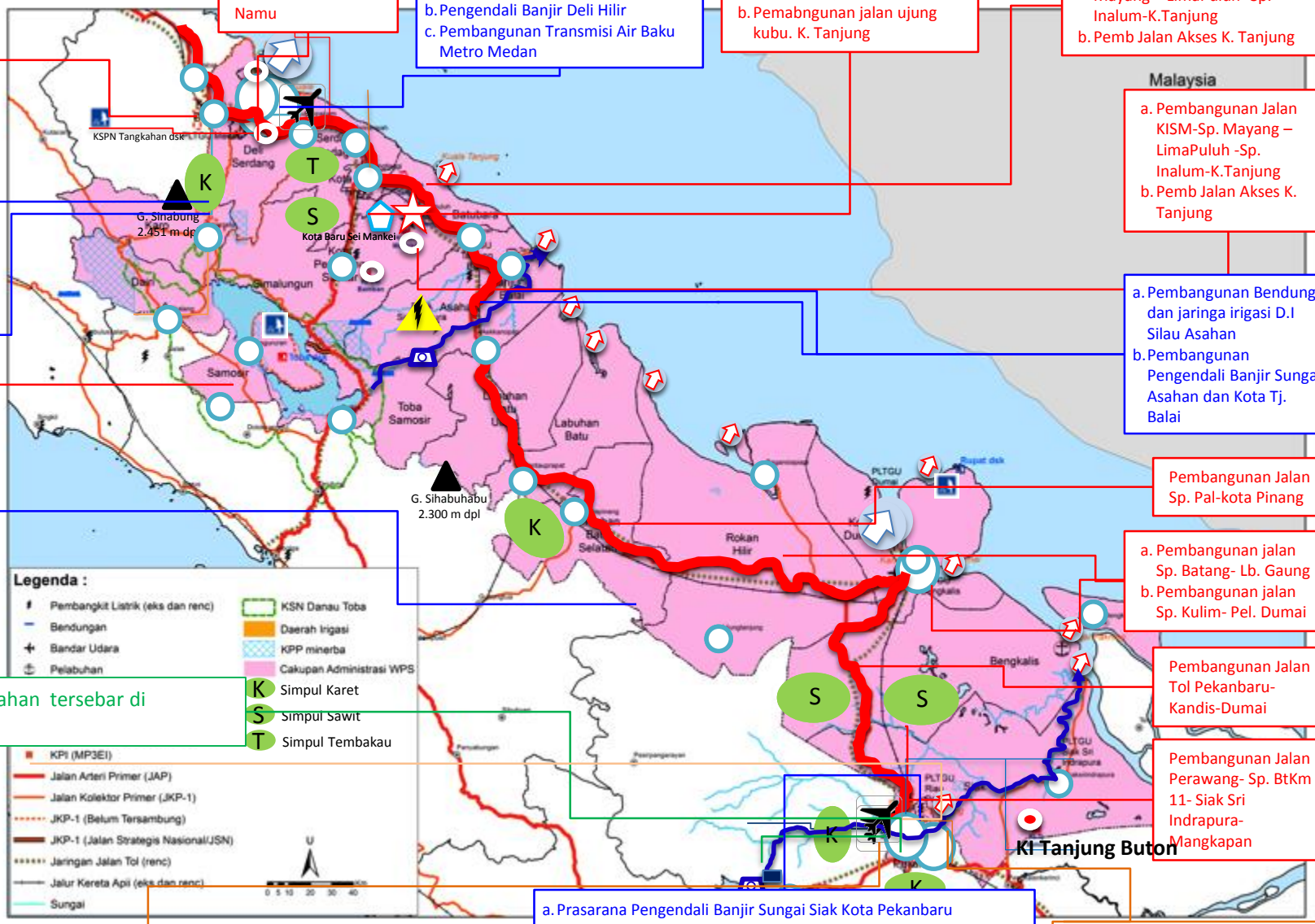

a. Pembangunan Bendung dan jaringa irigasi D.I Silau Asahan
b. Pembangunan Pengendali Banjir Sungai Asahan dan Kota Tj. Balai

Pembangunan Jalan Sp. Pal-kota Pinang

a. Pembangunan jalan Sp. Batang- Lb. Gaung
b. Pembangunan jalan Sp. Kulim- Pel. Dumai

Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Kandis-Dumai

Pembangunan Jalan Perawang- Sp. BtKm 11- Siak Sri Indrapura-Mangkapan

KI Tanjung Buton

Pembangunan Perumahan tersebar di beberapa lokasi

Pembangunan Infrastruktur Permukiman tersebar di beberapa lokasi

a. Prasarana Pengendali Banjir Sungai Siak Kota Pekanbaru
b. Pembangunan pompa banjir S. Senapelan, S. Pengembang dan S. Belanda
c. Pembangunan Turap Pengendali Banjir Jl. Yos Sudarso
d. Pembanguna Intake dan Jar Transmisi PAB Pekanbaru

Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Kota Pekanbaru

3. Sebaran Program Utama di WPS Pusat Pertumbuhan Terpadu Batam-Tanjung Pinang

TA 2015-2019

a. Pembangunan Estuari Dam Sei Gong Kota Batam
b. Pembangunan Estuari Dam Rempang Utara Kota Batam
c. Pembangunan Estuari Dam Teluk Nongsa Kota Batam
d. Pembangunan Estuari Dam Pulau Kepala Jeri Kota Batam
e. Pembangunan waduk Sie Gong Batam

a. Pembangunan Jalan Sei Tenan-Sp. Limbung-Tj.Buton
b. Pembangunan Jalan Simpang Jam - Batu Ampar
c. Pembangunan Jalan Tol Batu Ampar - Muka Kuning - Hang Nadim
d. Pembangunan Flyover Sp. Kabil dan Sp. Jam

Pembangunan Estuari Dam Dompak Kota Tanjungpinang

- Pembangunan Tampungan Air Baku DAS Kawal Kab. Bintan
- Pembangunan Estuari Dam Busung Kab. Bintan

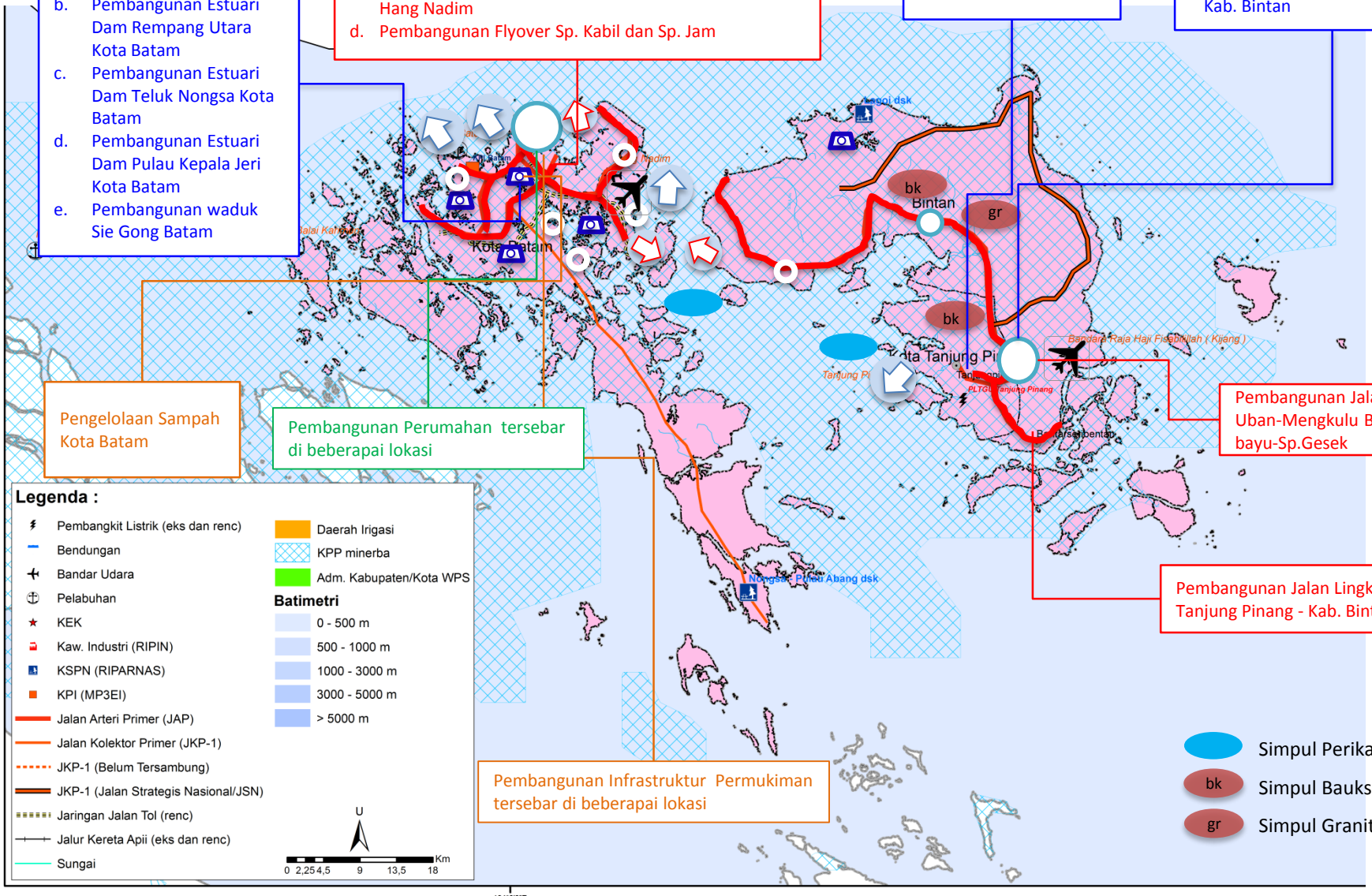

Pengelolaan Sampah Kota Batam

Pembangunan Perumahan tersebar di beberapai lokasi

Pembangunan Jalan Tj Uban-Mengkulu Bantan bayu-Sp.Gesek

Pembangunan Jalan Lingkar Kota Tanjung Pinang - Kab. Bintan

Pembangunan Infrastruktur Permukiman tersebar di beberapai lokasi

4. Sebaran Program Utama di WPS Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang Sibolga-Padang-Bengkulu

TA 2015-2019

a. Pemb.D.I. Kawasan Lubuk Buaya (3362 Ha)
b. Anai River Channel Improvement From River Mouth to Section50 M Up Strem Bypass Bridge di Kab. Padang Pariaman (0,15 Km)
c. Pembangunan Prasarana Pengendalian Banjir Batang Tapakis
d. Pembangunan Prasarana Pengendalian Banjir Batang Tandikek
e. Pembangunan Sarana/Prasarana Pengamanan Pantai Padang Pariaman

Pembangunan Jalan Tiku-Sasak-Air Bangis-Bts.Prov Sumut

a. Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir Batang Pasaman
b. Pembangunan Sarana/Prasarana Pengamanan Pantai Sasak Pasaman Barat

a. Pembangunan Jalan Sicincin-Lb.Alung
b. Pembangunan Jalan Sieberut - Muara Sigep

a. Pemb.D.I. Kawasan Lubuk Buaya (3362 Ha)
b. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Prasarana Pengendali Banjir Batang Kuranji
c. Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir Batang Lurus Kota Padang
d. Pembangunan Check Dam dan Perkuatan Tebing Bt. Kuranji-Limau Manis Kota Padang
e. Pembangunan Bangunan Terjun dan Perkuatan Tebing Bt. Timbalun Bungus Kota Padang
f. Pembangunan Sarana/Prasarana Pengamanan Pantai Bungus Padang
g. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengamanan Pantai Padang di Kota Padang

a. Pembangunan DI. Sawah Laweh Tarusan (3273 Ha)
b. Pemb. DI Kawasan Batang Bayang
c. Peningkatan DI. Koto Salapan (Areal Air Tambang-Sungai Tunu)
d. Pembangunan Prasarana Pengendalian Banjir Batang Lumpo Pesisir Selatan
e. Pembangunan Sarana/Prasarana Pengamanan Pantai luhung-bayang-Apiapi- Ketaping-Sago Pesisir Selatan
f. Pembangunan Sarana/Prasarana Pengamanan Pantai Sumedang Pesisir Selatan
g. Pembangunan Sarana/Prasarana Pengamanan Pantai Air Haji Pesisir Selatan
h. Pembangunan Sarana/Prasarana Pengamanan Pantai Amping Parak Pesisir Selatan

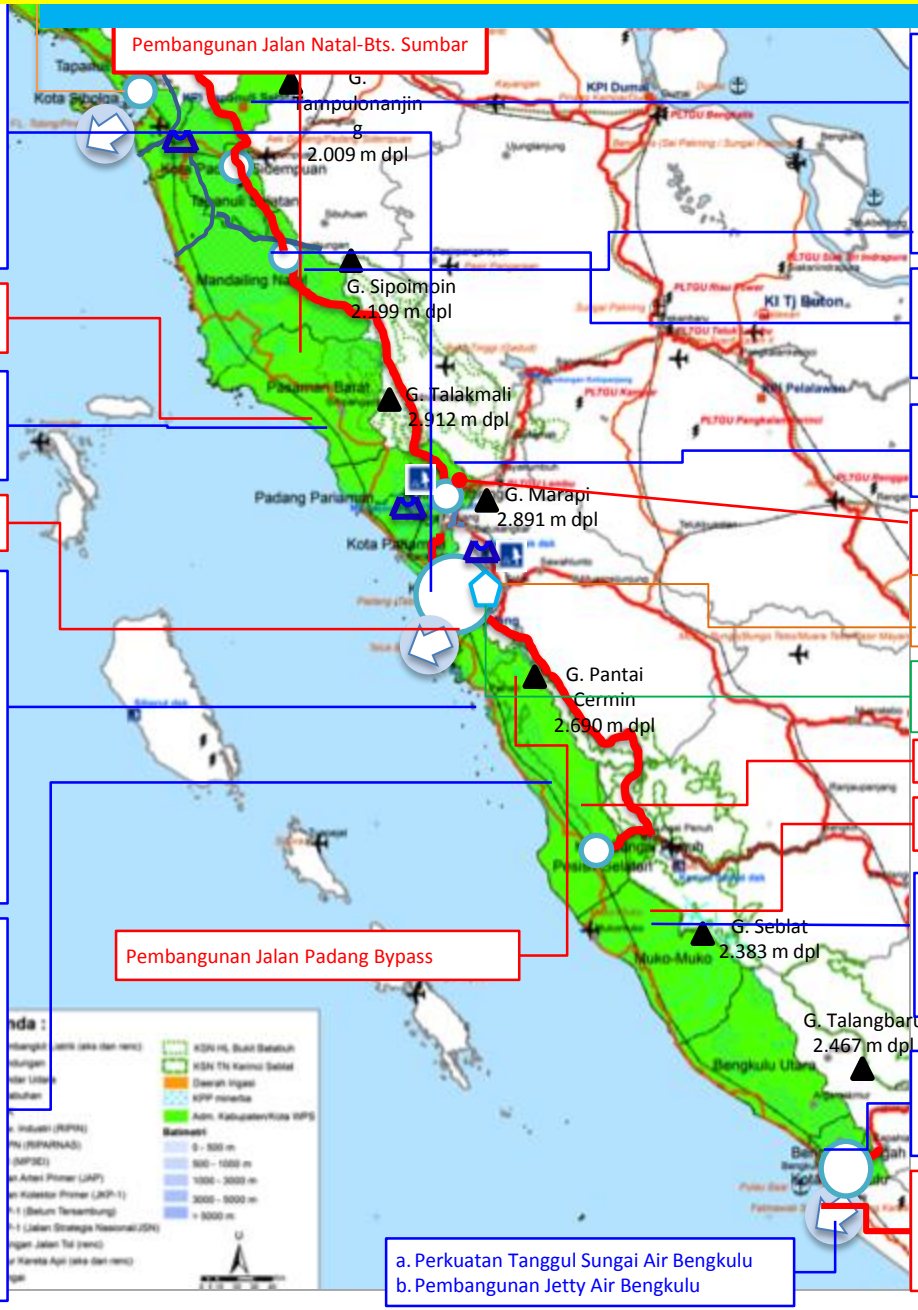

a. Pembangunan Bendung Suplesi Sungai Batang Pane D.I Batang Ilung Tapanuli Selatan/Madina
b. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Paya Sordang 4.350 Ha Kota P.Sidempuan dan Kab. Tap. Selatan
c. Normalisasi Pertemuan Sungai Batang Angkola - Sungai Batang Gadis Kab. Tapsel / Madina
d. Pembangunan Embung Napa Sibual Buali di Kab. Tapanuli Selatan Kab Tapanuli Selatan

a. Pembangunan Bendung, Jaringan Irigasi dan Drainase D.I Batang Batahan Madina
b. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Batang Gadis 6,628 Ha Madina

a. Pengendalian Banjir Batang Sianok Kab. Agam
b. Pembangunan Prasarana Pengendali Sedimen Batang Sanipan

Pembangunan Jalan Balinka-Matur-Ngarai Sihanouk (Jembatan & Terowongan)

Pembangunan Permukiman tersebar di beberapa lokasi

Pembangunan di Perumahan tersebar berapa lokasi

Pembangunan Jalan Tapan-Bts Jambi

Pembangunan Jalan Padang - Mukomuku

a. Pembangunan Pengendali Banjir Mukomuko
b. Pembangunan Bangunan Pengaman Pantai Punggur-Air Dikit Mukomuko
c. Pembangunan Bangunan Pengaman Pantai Desa Ipuh Mukomuko

Pembangunan Sarana Penyediaan Air Baku Regional Kota Karang Tinggi Seluma Kab. Bengkulu Tengah (MYC) Bengkulu Tengah

a. Pembangunan Jalan Lingkar Kota Bengkulu
b. Pembangunan Jalan Bengkulu-Kepahyang-Curup-Lubuk Linggau

a. Perkuatan Tanggul Sungai Air Bengkulu
b. Pembangunan Jetty Air Bengkulu

5. Sebaran Program Utama di WPS Pusat Pertumbuhan Terpadu Jambi-Palembang-Pangkal Pinang-Tanjung Pandan

TA 2015-2019

a. Pembangunan Jalan Lingkar Jambi-Talang Duku
b. Pembangunan Jalan Talang Duku-Muara Sabak

Pembangunan Pengendali Banjir Kota Jambi

Pembangunan Pengendali Banjir Kota Pangkal Pinang

a. Pembangunan Jembatan Teluk Belinyu
b. Pembangunan Jalan Tanjung Kelian-Petaling-Pangkalpinang
c. Pembangunan Jalan Petaling-Namang-Toboali

Pembangunan Bendung Pice Besar DI Selingsing di Belitung Timur

Pembangunan Perumahan tersebar di beberapa lokasi

Pembangunan Infrastruktur Permukiman tersebar di beberapa lokasi

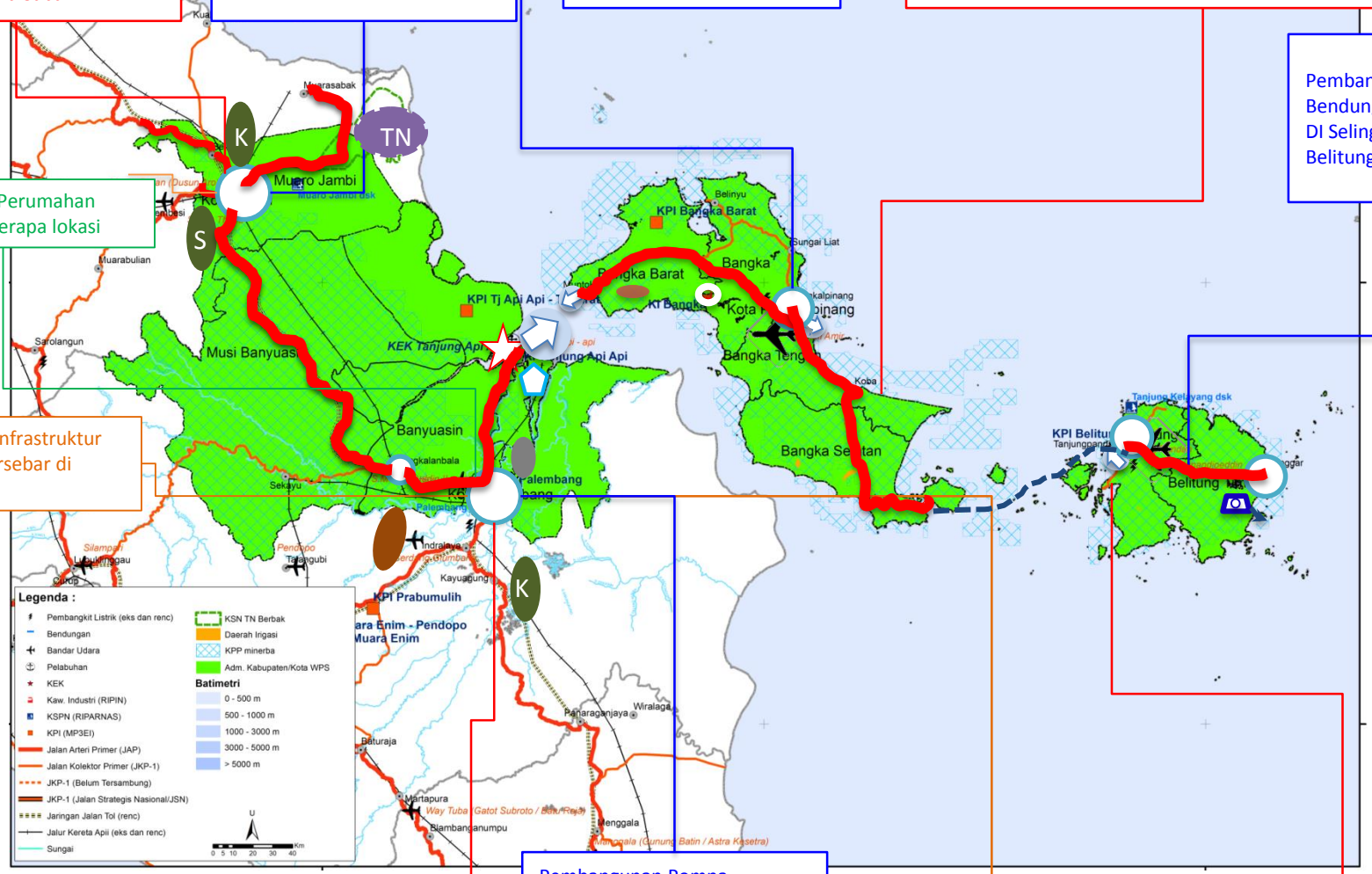

a.Pembangunan Jalan Pasanglaya
b.Pembangunan Jalan Tol Palembang-Indralaya
c.Pembangunan Jalan Tol Kayu Agung-Palembang-Betung
d.Pembangunan Jembatan Musi III dan Jalan Akses

Pembangunan Pompa Pengendali Banjir Sub DAS Bendung di Kota Palembang (lanjutan)

Infrastruktur Kawasan Kumuh Perkotaan di Kota Palembang

Pembangunan Jalan mendukung KSPN Belitung

6. Sebaran Program Utama di WPS Pusat Pertumbuhan Terpadu Merak-Bakauheni-Bandar Lampung-Palembang-Tanjung Api-Api

TA 2015-2019

Pembangunan Jalan Palembang-Tanjung Api-Api

a. Pembangunan Pompa Pengendali Banjir Sub DAS Bendung di Kota Palembang (lanjutan)
b. Pembangunan Bangunan Pengendali Banjir Sungai Lempuing Kayuagung

a. Pembangunan Jalan Pasanglaya
b. Pembangunan Jembatan Musi III dan Jalan Akses

Infrastruktur Kawasan Kumuh Perkotaan di Kota Palembang

Pembangunan Jalan Mesuji-Blambangan Umpu

a. Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar
b. Pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar- Kayu Agung
c. Pembangunan Jalan Tol Kayu Agung-Palembang-Betung
d. Pembangunan Jalan Tol Palembang-Indralaya

a. Pembangunan Waduk Segalamider
b. Pembangunan Waduk Sukaraja III

Infrastruktur Kawasan Kumuh Perkotaan di Kota Cilegon

Pembangunan Jalan Lingkar Bandarjaya

a. Pembangunan Flyover Sp. Pelabuhan Panjang
b. Pembangunan Jalan Cikande-Serang-Cilegon

Pembangunan Infrastruktur Permukiman tersebar di beberapa lokasi

Pembangunan Waduk Sindang Heula

Pembangunan Perumahan tersebar di beberapa lokasi

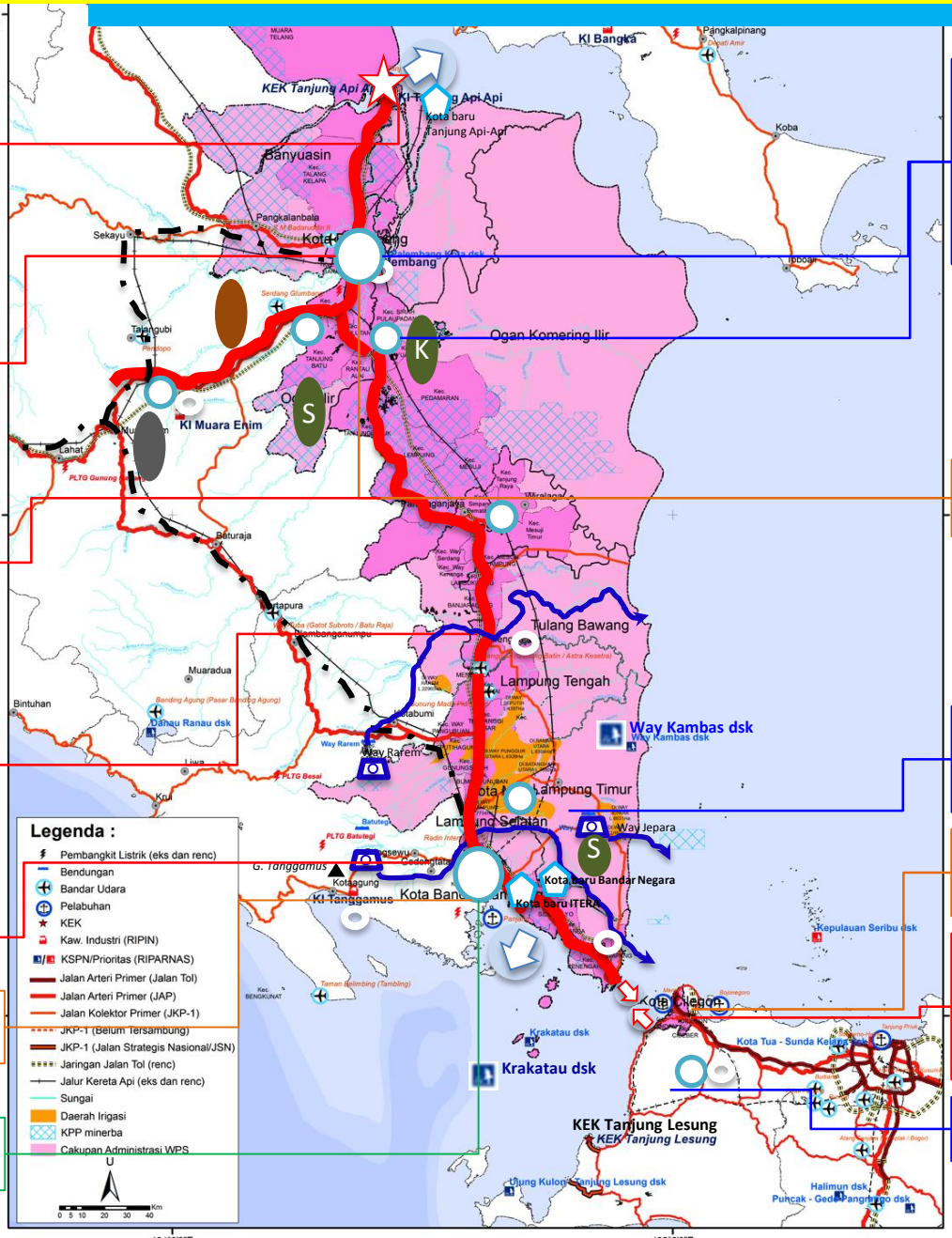

7. Sebaran Program Utama di WPS Konektivitas Keseimbangan Pertumbuhan Terpadu Jakarta-Bogor-Ciawi-Sukabumi

TA 2015-2019

Pembangunan Infrastruktur Permukiman tersebar di beberapa lokasi

Pembangunan Perumahan tersebar di beberapa lokasi

a.Pembangunan Sudetan Kali Ciliwung ke KBT Jakarta
b.Pembangunan Cengkareng Drain 2 Jakarta

Pembangunan Jalan Tol JORR2:
a. Tol Depok-Antasari
b. Tol Cinere-Jagorawi
c. Tol Cimanggis-Cibitung

Pembangunan Jalan Tol Ciawi-Sukabumi

1.Pembangunan Waduk Ciawi (2015-2018) Bogor
2.Pembangunan SPAM Air Baku Kali Baru Barat dan Kali Baru Timur Bogor
3.Pembangunan Check Dam di Sungai Cipamingkis Bogor

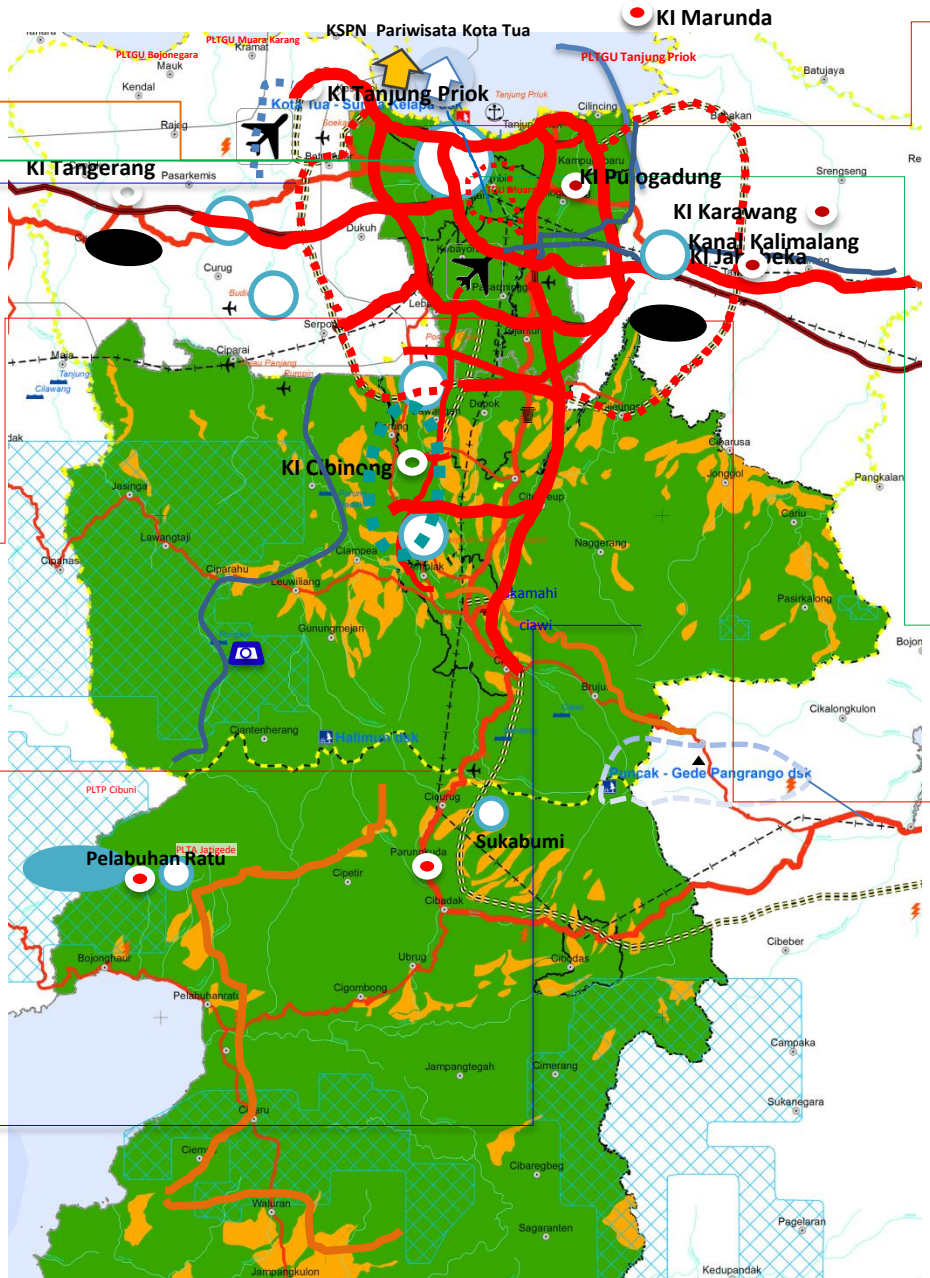

a.Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Akses Tanjung Priok (E2, E2 A, dan NS) dan Akses Dry Port Cikarang
b.Pembangunan Flyover Dalam Kota (Semanggi, RE Martadinata, Pinang Baris, Pancoran, Kuningan, Sudirman)
c.Pembangunan FO/Underapass Perlintasan KA
d.Pembangunan 6 (enam) Ruas Jalan Tol DKI Jakarta (Semanan – Sunter, Sunter – Pulo Gebang, Duri Pulo-Kampung Melayu, Kemayoran- Kampung Melayu, Ulujami-Tanah Abang, Pasar Minggu –Cassablanca)

Pembangunan Rusunawa di Pasar MInggu dan Pasar Rumput

a.Pembangunan Jalan Tol Cibitung – Cilincing
b.Pembangunan Flyover Bulak Kapal (Bekasi)

8. Sebaran Program Utama di WPS Pusat Pertumbuhan Terpadu Jakarta-Cirebon-Semarang

TA 2015-2019

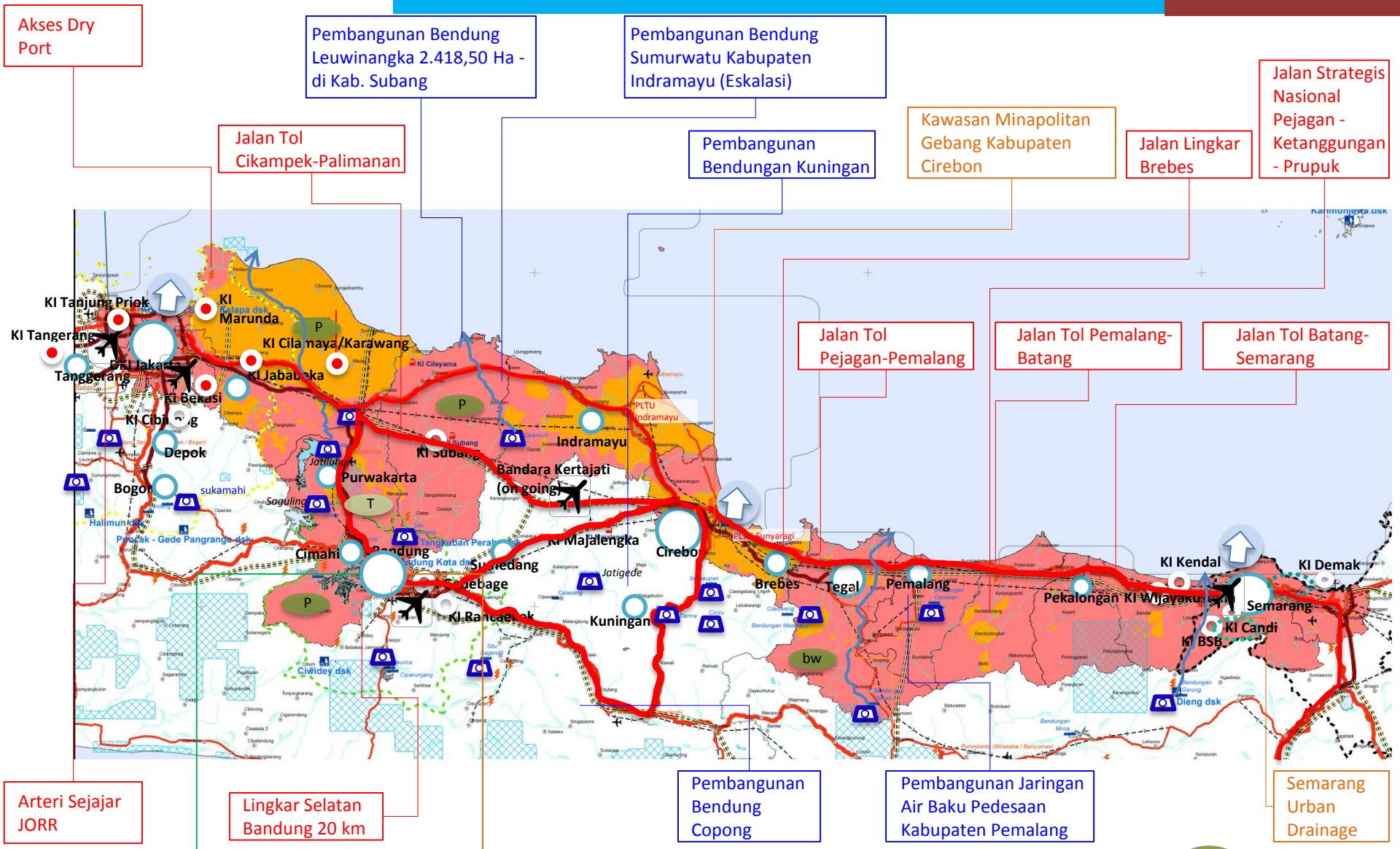

9. Sebaran Program Utama di WPS Pertumbuhan Baru Tanjung Lesung-Sukabumi-Pangandaran-Cilacap

TA 2015-2019

Pembangunan Jaringan Irigasi Teluk Lada

a.Pembangunan Waduk Karian
b.Pembangunan Saluran Pembawa Air Baku Karian

Pembangunan Waduk Sukahurip

Pembangunan Jalan Tol Ciawi - Sukabumi

Pembangunan Waduk Matenggeng

Pembangunan Acces Road Matenggeng Cilacap

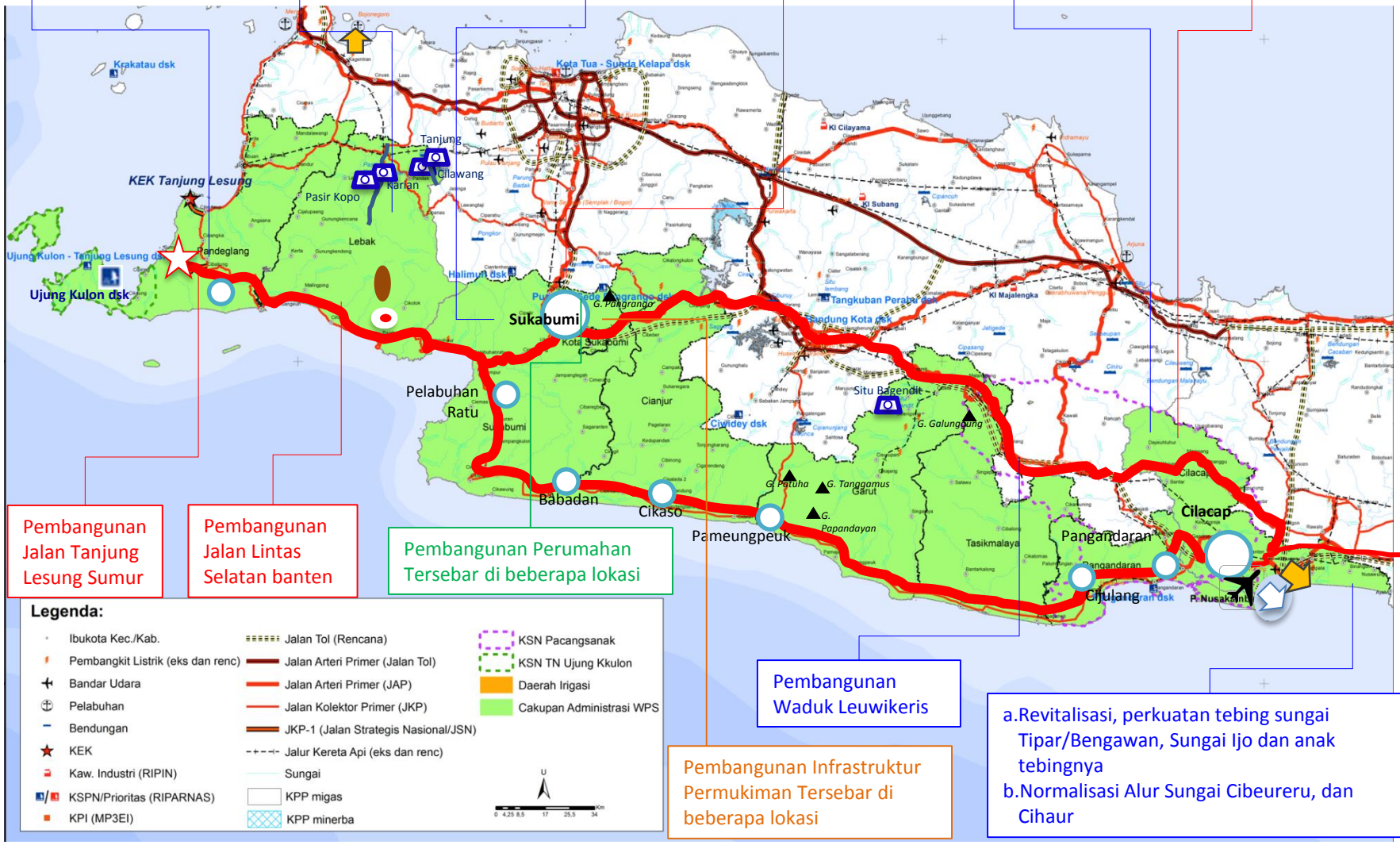

Pembangunan Jalan Tanjung Lesung Sumur

Pembangunan Jalan Lintas Selatan banten

Pembangunan Perumahan Tersebar di beberapa lokasi

Pembangunan Waduk Leuwikeris

Pembangunan Infrastruktur Permukiman Tersebar di beberapa lokasi

a.Revitalisasi, perkuatan tebing sungai Tipar/Bengawan, Sungai Ijo dan anak tebingnya
b.Normalisasi Alur Sungai Cibeureru, dan Cihaur

10. Sebaran Program Utama di WPS Pusat Pertumbuhan Terpadu Yogyakarta-Solo-Semarang

TA 2015-2019

Pembangunan Fly Over Kali Banteng (menuju Pelabuhan Tanjung Emas)

Pembangunan Jalan Tol Batang-Semarang

Pembangunan Jaringan Air Baku Semarsalat Kab Semarang dan Kota Salatiga

a. Pembangunan Waduk Pasuruan
b. Pembangunan Sabo/DAM Pengendali Sedimen Magelang
c. Pembangunan Diversion Channel Kali Putih Magelang

a. Pembangunan Sabo/DAM Pengendali Sedimen Sleman
b. Pembangunan Kantong Lahar Kali Gendol Sleman
c. Pembangunan Waduk Karang Talun Sleman

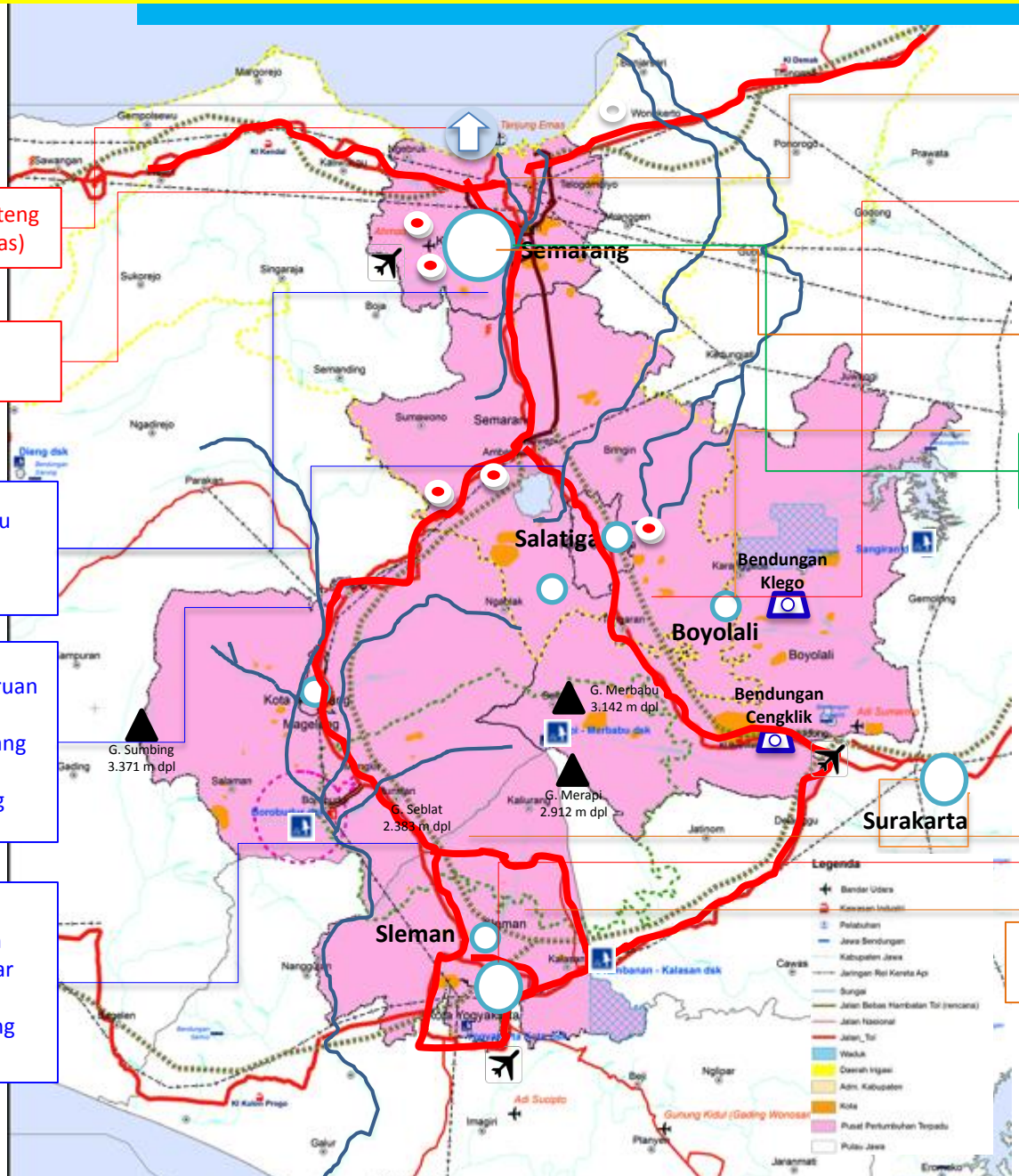

Semarang Urban Drainage

Pembangunan Jalan Tol Semarang-Solo

Pembangunan Infrastruktur Permukiman Tersebar di beberapa lokasi

Pembangunan Perumahan Tersebar di beberapa lokasi

SPAM Regional Kartamantul

Pembangunan Jalan Lingkar Kota Yogyakarta

Pembangunan Penyediaan Air Baku SPAM Bantar

11. Sebaran Program Utama di WPS Pusat Pertumbuhan Terpadu Semarang-Surabaya

TA 2015-2019

Pembangunan Fly Over Kali Banteng (Menuju Pelabuhan Tanjung Emas))

Penyempurnaan SAB Klambu Kudu Kab Demak, Grobogan, Semarang

Pembangunan Jalan Tol Semarang-Surabaya:
a. Bawen-Solo
b. Solo-Ngawi
c. Ngawi-Kertosono,
d. Kertosono-Mojokerto,
e. Mojokerto-Surabaya

Persiapan Pembangunan Bendungan Kedung Warak Kab. Nganjuk

Pembangunan Jalan Lingkar (Mohoagung, Banyuwangi, Lamongan)

Pembangunan Waduk Gondang

Pembangunan Infrastruktur Permukiman tersebar di beberapa lokasi

Pembangunan Perumahan tersebar di beberapa lokasi

Revitalisasi Irigasi Tambak WS Pemali Juana

Pengamanan Konstruksi Bendung Simongan

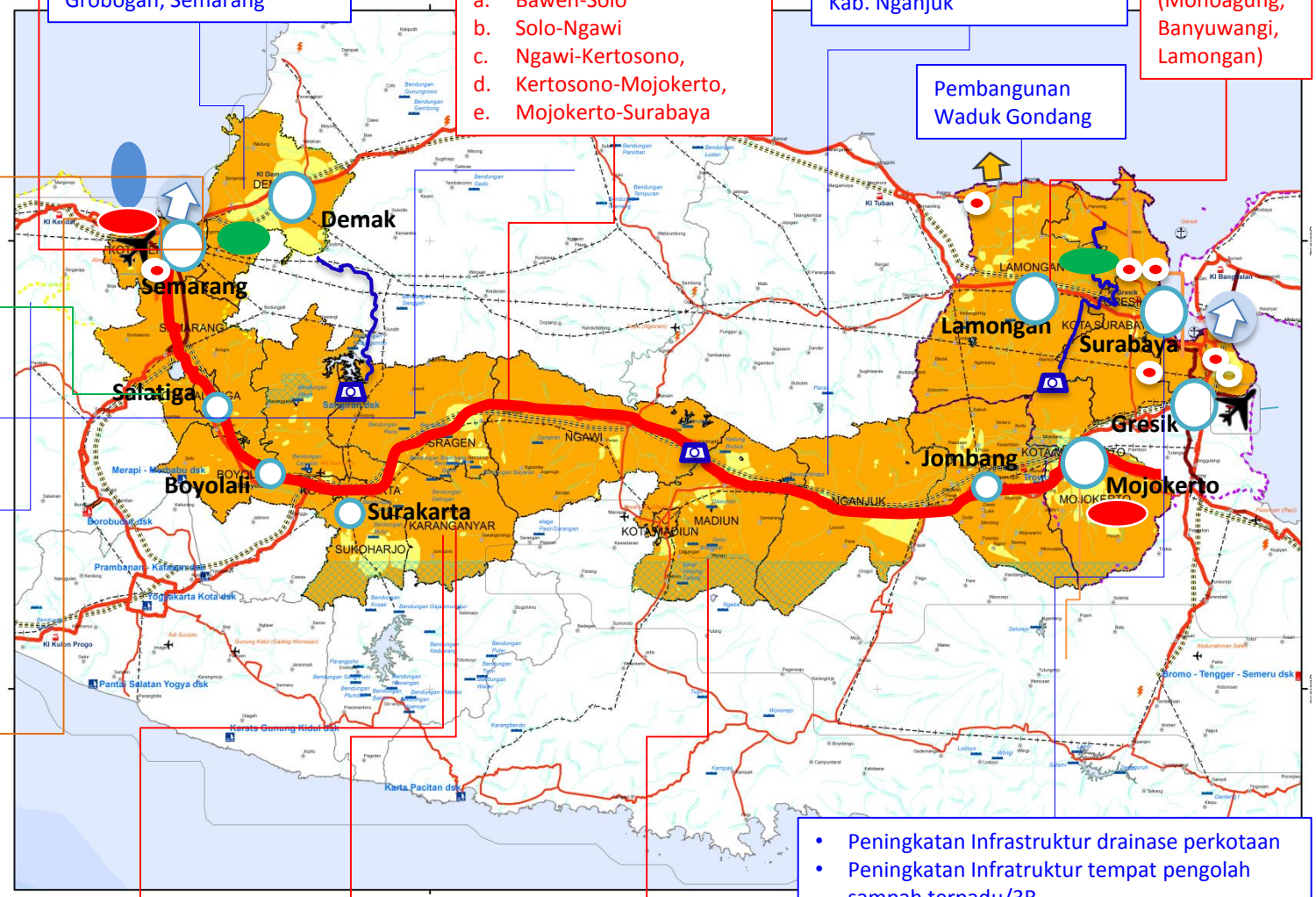

- Peningkatan Infrastruktur drainase perkotaan
- Peningkatan Infratruktur tempat pengolah sampah terpadu/3R
- Peningkatan SPAM Regional

Penggantian Jembatan Grompol

Pembangunan Fly Over Palur

Pembangunan Jalan Trenggalek-Dengok-Ponorogo-Madiun

- Peningkatan Infrastruktur drainase perkotaan
- Peningkatan Infratruktur tempat pengolah sampah terpadu/3R
- Peningkatan SPAM di kawasan MBR
- Peningkatan SPAM perdesaan

12. Sebaran Program Utama di WPS Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang Yogyakarta-Prigi-Blitar-Malang

TA 2015-2019

Pembangunan Jalan Lingkar Kota Yogyakarta

Rehabilitasi Muara sungai dan Jetty di WS POS Bantul

Peningkatan kapasitas, perkuatan tebing dan pintu klep Sungai Opak dan anak sungainya Bantul

Pembangunan Bendungan Tugu, Bagong dan Kampak, Trenggalek

Pembangunan Jalan Prigi - Durenan

Pembangunan Jalan Tol Pandaan - Malang

Pembangunan Infrastruktur Perumahan Tersebar di beberapa lokasi

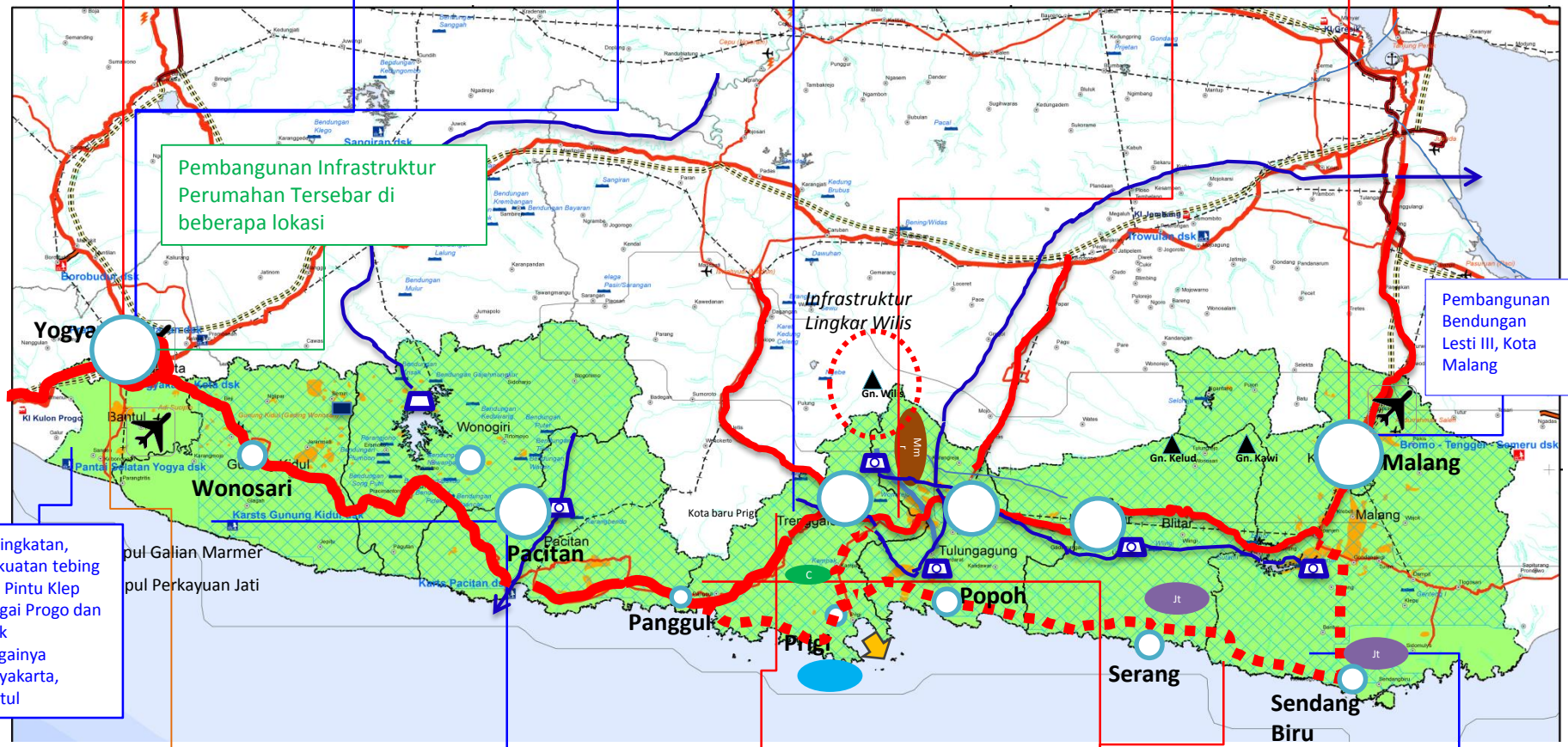

Pembangunan Bendungan Lesti III, Kota Malang

Peningkatan, perkuatan tebing dan Pintu Klep Sungai Progo dan anak sungainya Yogyakarta, Bantul

Pembangunan Infrastruktur Permukiman Tersebar di beberapa lokasi

Pembangunan Waduk Gari dan embung/telaga di Gunung Kidul

Pembangunan Jalan Trenggalek – Dengok – Ponorogo - Madiun

Pembangunan Jalan Lintas Pantai Selatan Jawa Timur (Talok – Wonorogo – Ngrejo – Prigi – Panggul)

Pembangunan Bendungan Kali Genteng I, Kab. Malang

13. Sebaran Program Utama di WPS Pusat Pertumbuhan Terpadu Malang-Surabaya-Bangkalan

TA 2015-2019

Lower Solo River Improvement Project Phase 2 Kab. Bojonegoro, Lamongan, dan Gresik

Pengembangan dan pengelolaan rusunawa, Provinsi Jawa Timur

Pembangunan Jalan Lintas Utara Madura (Bangkalan - Tj Bumi-Ketapang-Sotobar-Sumenep)

Pembangunan Jalan Tol :
a. Gempol-Pandaan
b. Pandaan-Malang
c. Gempol-Pasuruan

Rehabilitasi Pengendali Lahar/Sedimen Gunung Kelud

Pembangunan Bendungan Lesti III Kab. Malang

Persiapan Pembangunan Bendungan Genteng I Kab. Malang

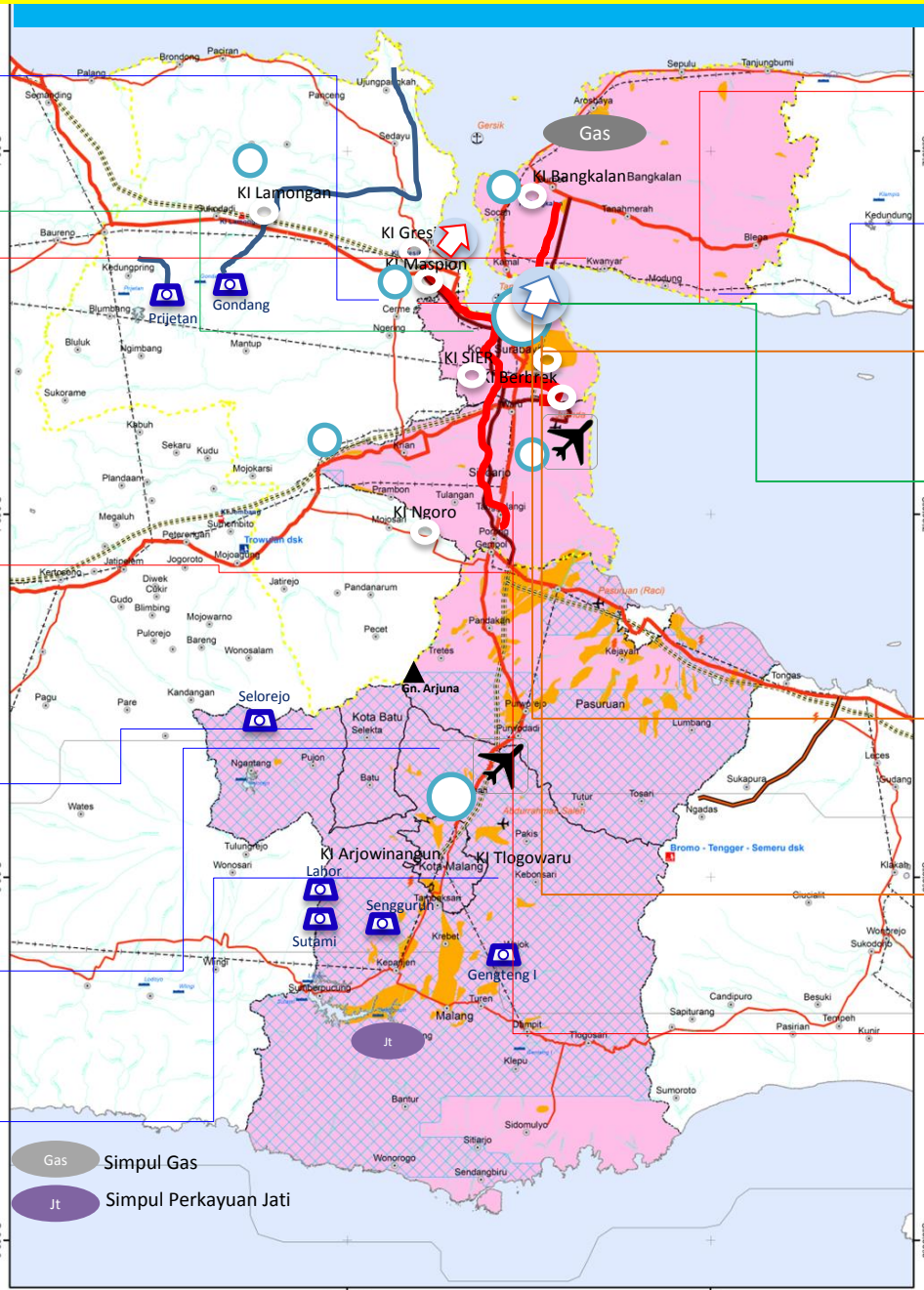

Pembangunan Jalan Lingkar (Mohoagung, Banyuwangi, Lamongan)

Persiapan Pembangunan Waduk Blega Kab. Bangkalan

Pembangunan Infrastruktur Permukiman Tersebar di beberapa lokasi

Pembangunan Perumahan Tersebar di beberapa lokasi

Pengembangan dan revitalisasi kawasan agropolitan, Provinsi Jawa Timur

Pembangunan sarpras pengelolaan air limbah komunal, Provinsi Jawa Timur

Pembangunan Jalan Frontage Sisi Barat A. Yani (Menanggal)

14. Sebaran Program Utama di WPS Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang Surabaya-Pasuruan-Banyuwangi

TA 2015-2019

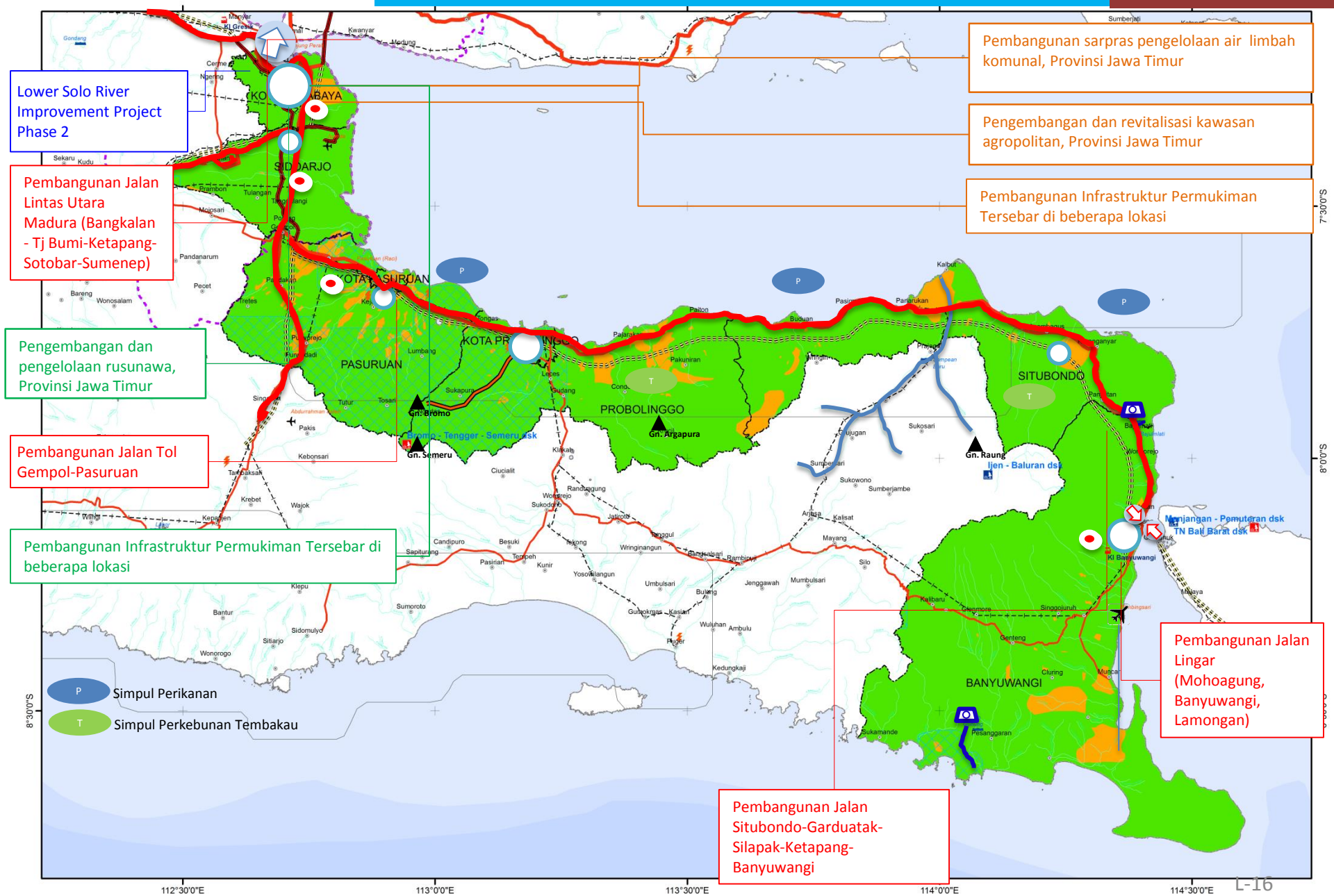

15. Sebaran Program Utama di WPS Konektivitas dan Pusat Pertumbuhan Wisata Gilimanuk-Denpasar-Padang Bay

TA 2015-2019

a. Pembangunan Jalan Mengwitani-Singaraja
b. Pembangunan Jalan Penulisan-Blandingan
c. Pembangunan Jalan Antosari-Bts Kota Tabanan

Pembangunan Infrastruktur Permukiman Tersebar di beberapa lokasi

a. Pembangunan Waduk Telagawaja
b. Pembangunan Waduk Sidan

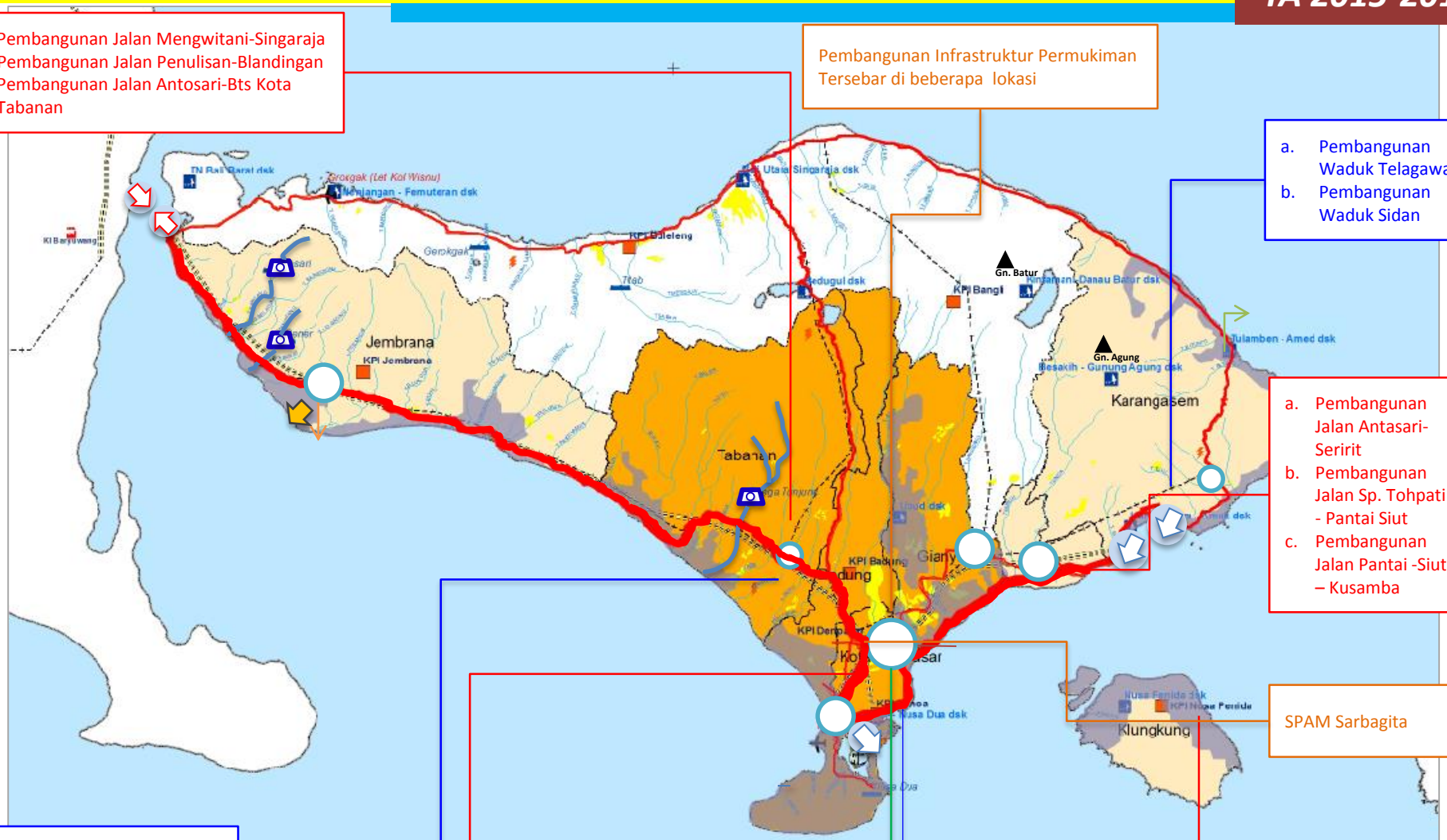

a. Pembangunan Jalan Antasari-Seririt
b. Pembangunan Jalan Sp. Tohpati - Pantai Siut
c. Pembangunan Jalan Pantai -Siut – Kusamba

SPAM Sarbagita

Pembangunan Waduk Lambuk

a. Pembangunan Flyover Ngurah Rai
b. Pembangunan Jalan Denpasar-Tuban
c. Pembangunan Jalan Sp Ngurah Rai
d. Pembangunan Jalan Bebas Hambatan dalam kota Canggu-Beringkit-Batuan-Purnama

Pembangunan perumahan Tersebar di beberapa lokasi

Pembangunan Waduk Telagawaja

Pembangunan Jalan P Nusa Penida

16. Sebaran Program Utama di WPS Pusat Pertumbuhan Wisata dan Hinterland Tanjung-Mataram-Mandalika

TA 2015-2019

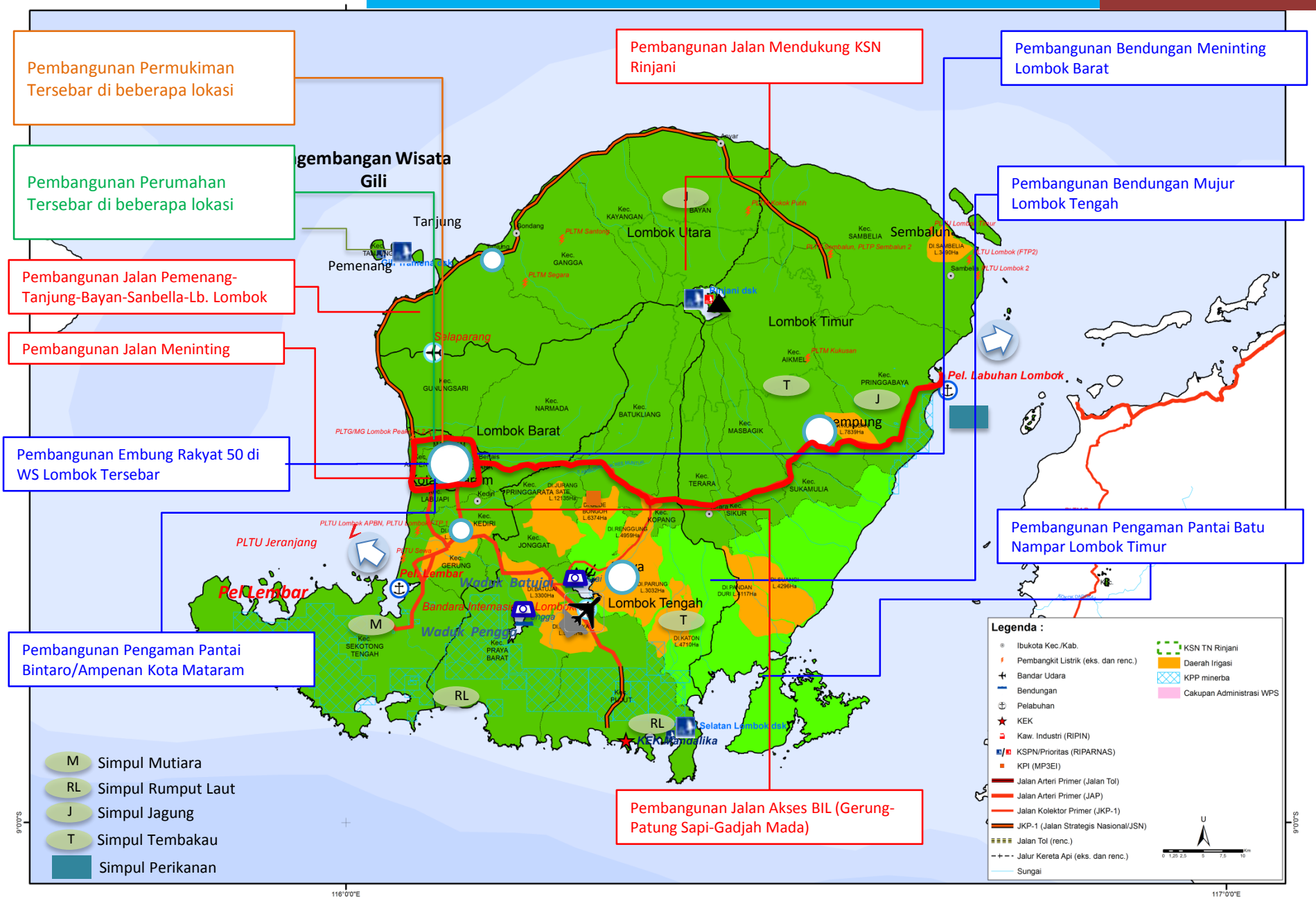

17. Sebaran Program Utama di WPS Pusat Pertumbuhan Wisata dan Hinterland Sumbawa Besar-Dompu-Bima

TA 2015-2019

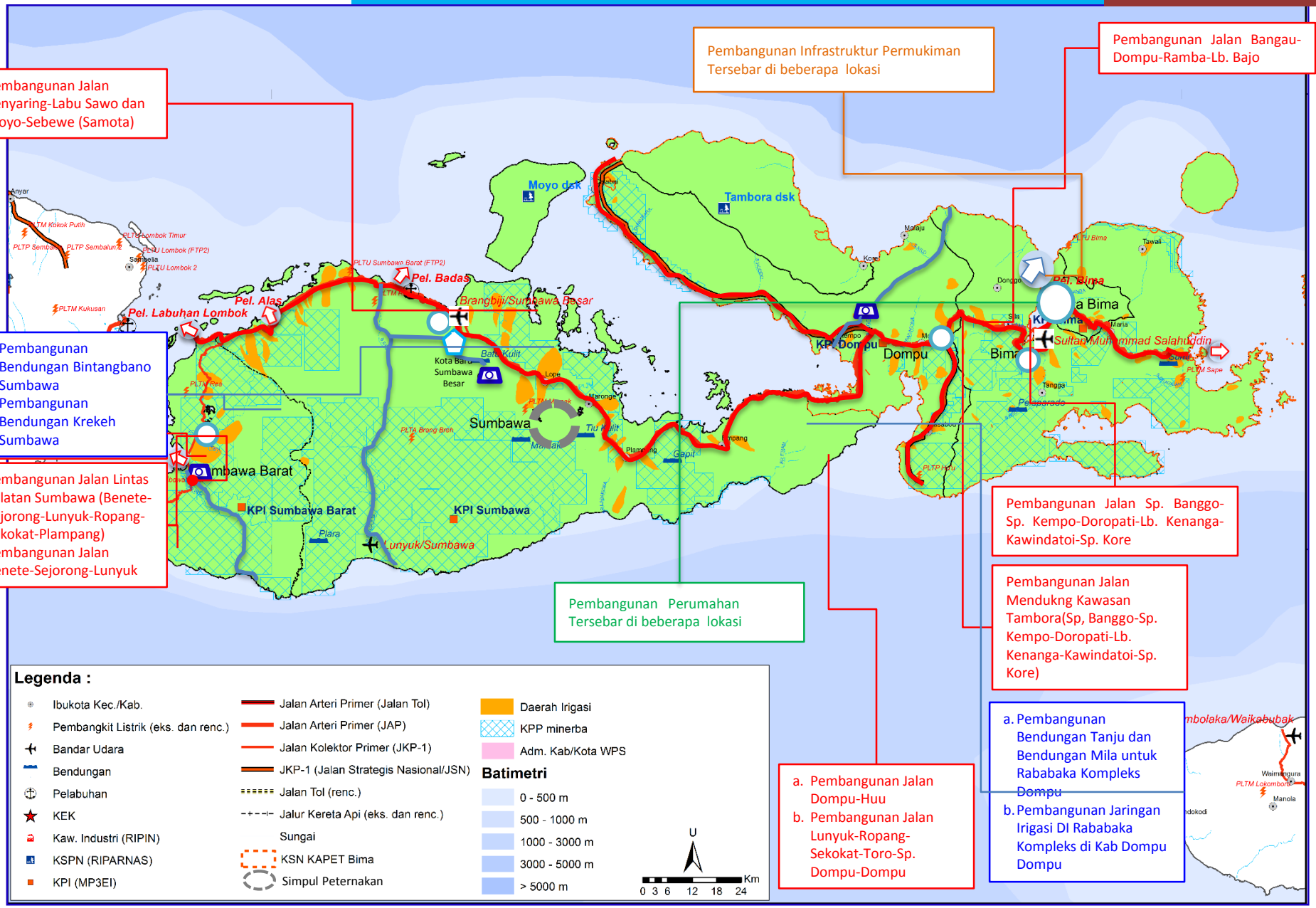

18. Sebaran Program Utama di WPS Pertumbuhan Baru Waingapu-Labuan Bajo-Ende-Maumere

TA 2015-2019

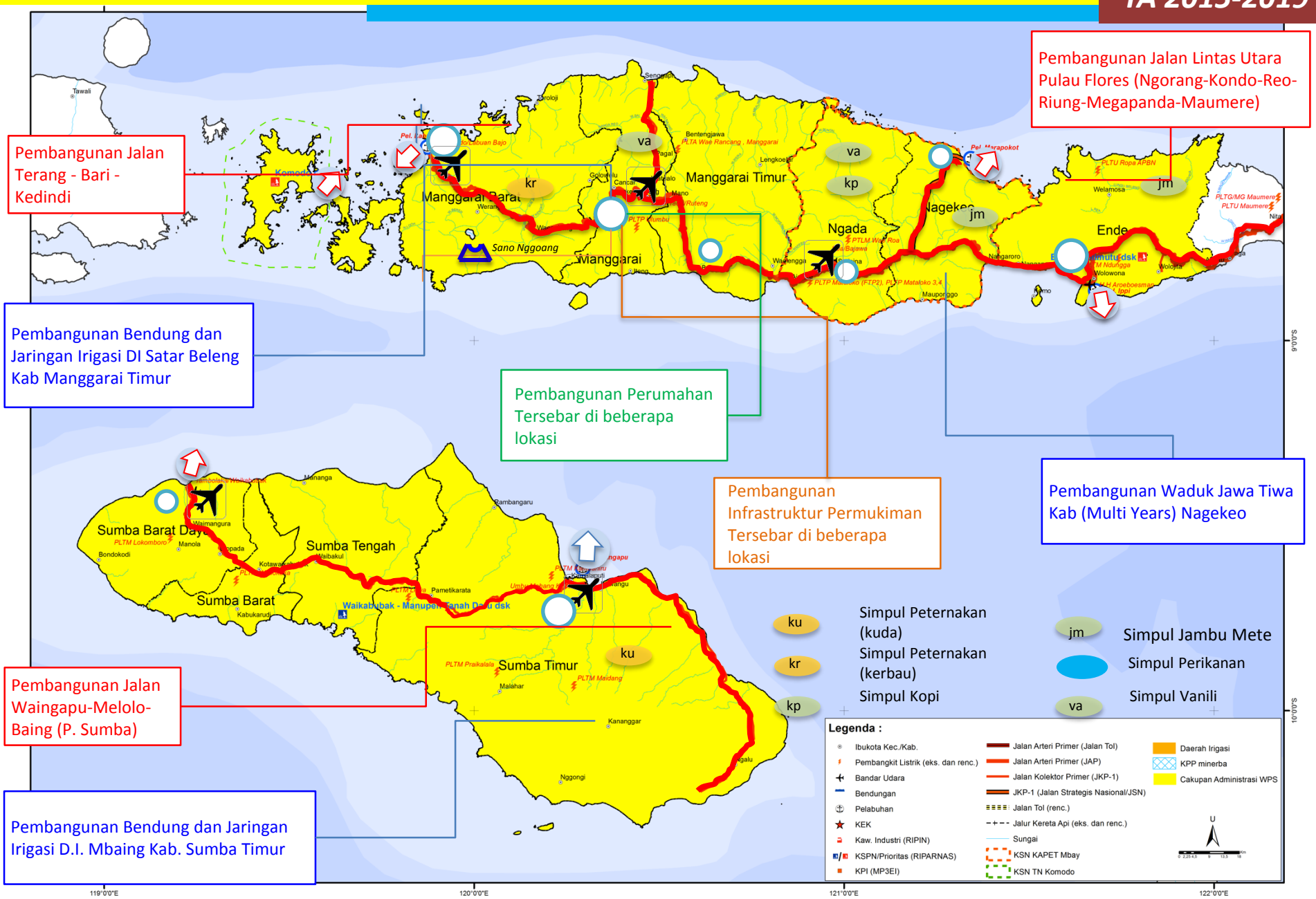

19. Sebaran Program Utama di WPS Pertumbuhan Baru dan Perbatasan Kupang-Atambua

TA 2015-2019

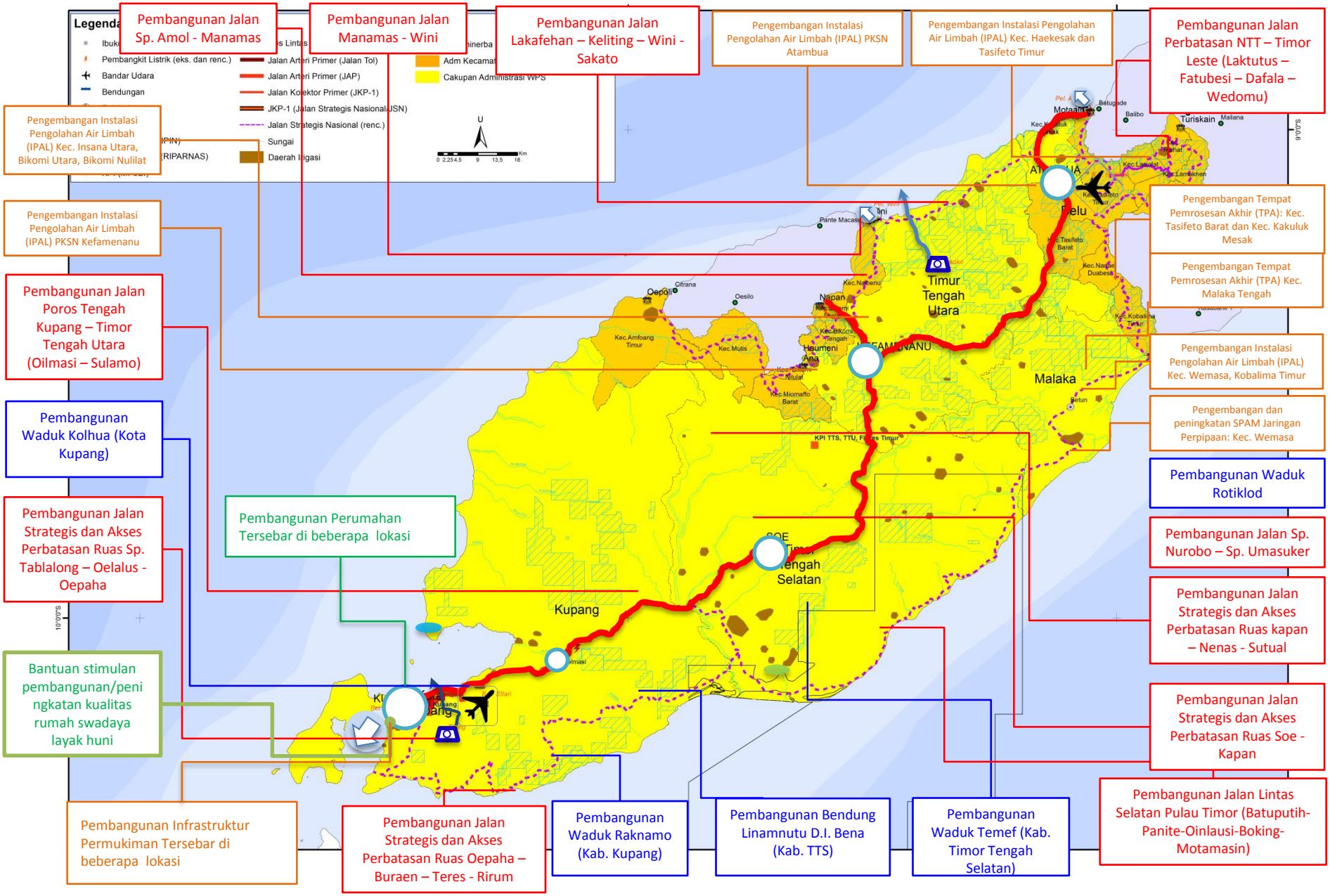

20. Sebaran Program Utama di WPS Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang Ketapang – Pontianak – Singkawang – Sambas

TA 2015-2019

Pembangunan Jalan Tn.Hitam - Sp.Bantanan - Galing - Aruk

Pembangunan Jalan Tebas - Sentebang - Tn.Hitam – Jeruju - Liku - Merbau - Temajok

Pembangunan Jalan Baru Rasau - Sepalau 1 (Rasau-Badau) "A1"

Pembangunan Bendungan Segedong

Pembangunan Jalan Lingkar Luar Pontianak

Pembangunan Jembatan Kapuas II

Pembangunan Outer Ring Canal Kota Metropolitan Pontianak

Pembangunan Jalan Siduk - Sei Keli - Nangatayap

Pembangunan Perumahan tersebar di beberapa lokasi

Pembangunan Infrastruktur Permukiman tersebar di beberapa lokasi

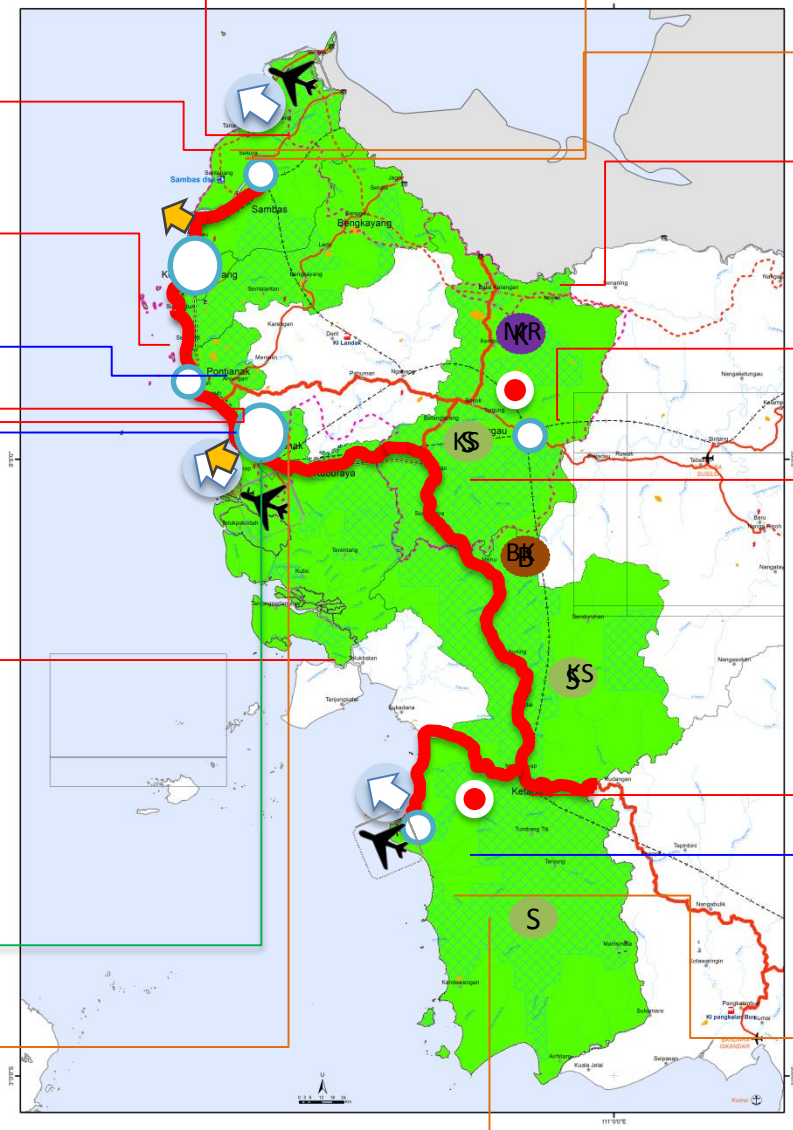

Infrastruktur Kawasan Permukiman Perdesaan

Infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir Sampah

Pembangunan Jalan Baru Rasau - Sepalau 2 (Rasau-Badau) "O2"

a. Pembangunan Jalan Akses Jembatan Tayan
b. Pembangunan Jalan Baru Bts.Kota Sanggau - Sekadau (Relokasi)
c. Pembangunan Jembatan Tayan

Pembangunan Jalan Perbatasan Ruas Teberau - Bts. Kec. Siding - Bts. Kab. Sanggau – Bts. Kec. Sekayam - Bts. Kab. Sintang

Pembangunan Jalan Ketapang - Siduk - Sukadana - Teluk Batang

Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa Air Baku Kota Ketapang

Infrastruktur Kawasan Permukiman Perkotaan

Infrastruktur Drainase Perkotaan

S = Simpul Kelapa Sawit B = Simpul Bahan Galian Bauksit K = Simpul Perkayuan Mahoni

21. Sebaran Program Utama di WPS Pertumbuhan Baru dan Perbatasan Temajuk – Sebatik

TA 2015-2019

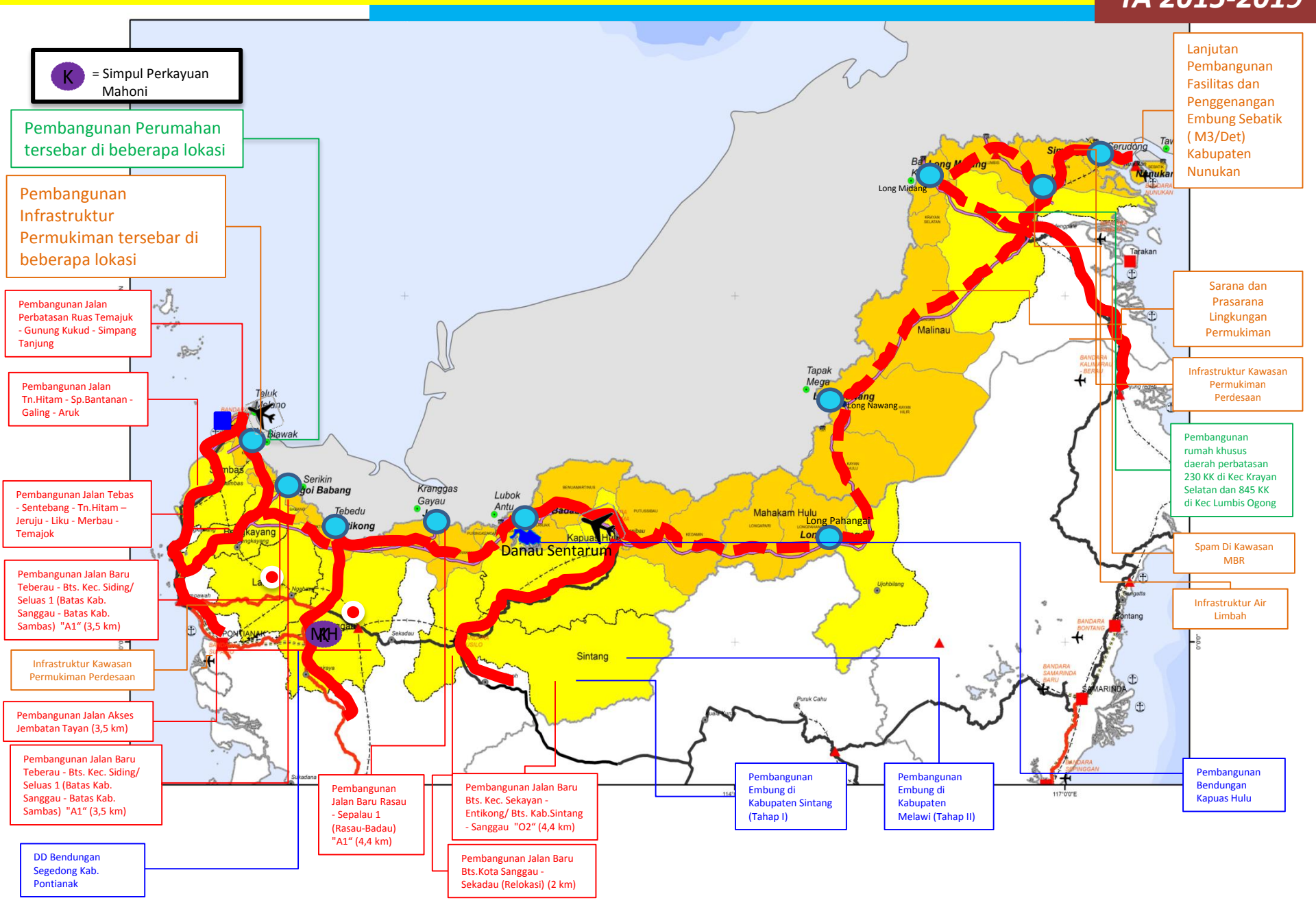

22. Sebaran Program Utama di WPS Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang Palangkaraya – Banjarmasin – Batulicin

TA 2015-2019

Pembangunan Jembatann Maluenn Kab. Kapuas

a. Infrastruktur Air Limbah diKabupaten Kapuas
b. SPAM Perdesaan Kab. Kapuas

a. Infrastruktur Kawasan Perkotaan Kota Palangkaraya
b. Infrastruktur Air Limbah Kota Palangkaraya
c. Infrastruktur Drainase Perkotaan kota Palangakaraya
d. SPAM di Kawasan MBR Kota Palangkaraya

Pembangunan Jalan Palangkaraya-Bukittliti-Bkt.Batu-Buntok-Ampah

Pembangunan SPAM Banjar Bakula

a. Pembangunan Embung Tala
b. Pembangunan Air Baku Banjar Bakula

a. Pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Trisakti (Pelabuhan Trisakti - Liang Anggang)
b. Pembangunan Jembatan Sei Basirih
c. Pembangunan Fly Over Gatot Subroto

Pembangunan Jalan akses menuju Pelabuhan Pelaihari di Kabupaten Tanah Laut

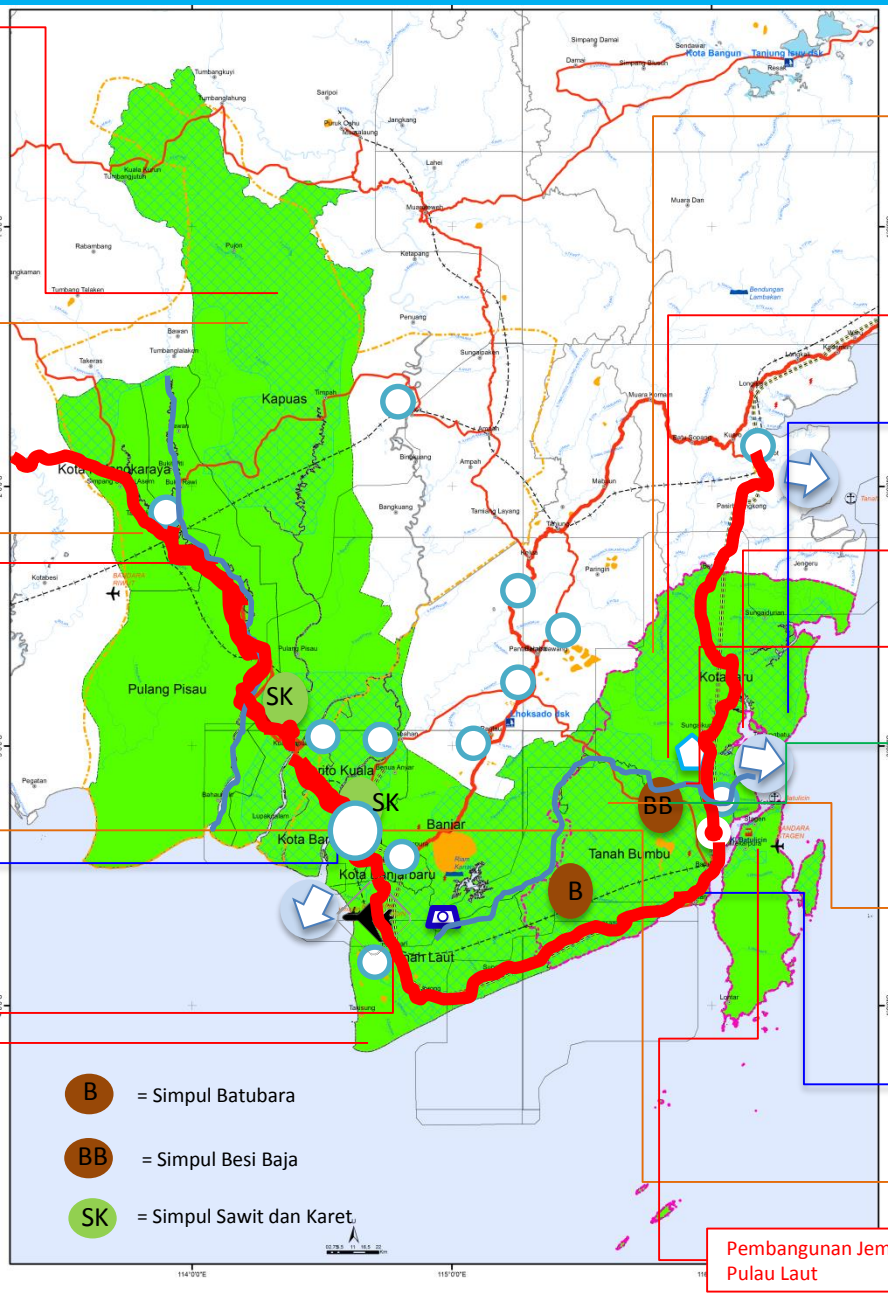

a. Infrastruktur Air Limbah Kab Tanah Bumbu
b. Infrastruktur Drainase Perkotaan Kab. Tanah Bumbu
c. Pembangunan SPAM Kawasan MBR Kab. Tanah Bumbu
d. Pembangunan SPAM IKK di Kabupaten Tanah Bumbu

Pembangunan Jalan Lingkar dalam Batulicin

Pembangunan Penyediaan Air Baku Kab. Kota Baru

Pembangunan Jalan akses Kawasan Industri Batulicin ke Pelabuhan Batulicin

Pembangunan Jalan Kandangan - Hampang-Batu Licin

Pembangunan Perumahan tersebar di beberapa lokasi

a. Infrastruktur Kawasan Permukiman Perkotaan Kab. Kotabaru
b. Infrastruktur Air Limbah Kab Kota Baru
c. Pembangunan SPAM di Kabupaten Kotabaru
d. Pembangunan SPAM IKK di Kabupaten Kotabaru
e. Pembangunan SPAM di Kab. Kotabaru
f. Spam Perdesaan Kab. Kotabaru

Pembangunan Pengaman Pantai Rindu Alam

Pembangunan Infrastruktur Permukiman tersebar di beberapa lokasi

Pembangunan Jembatan Penghubung Pulau Laut

23. Sebaran Program Utama di WPS Pusat Pertumbuhan Terpadu Balikpapan – Samarinda – Maloy

TA 2015-2019

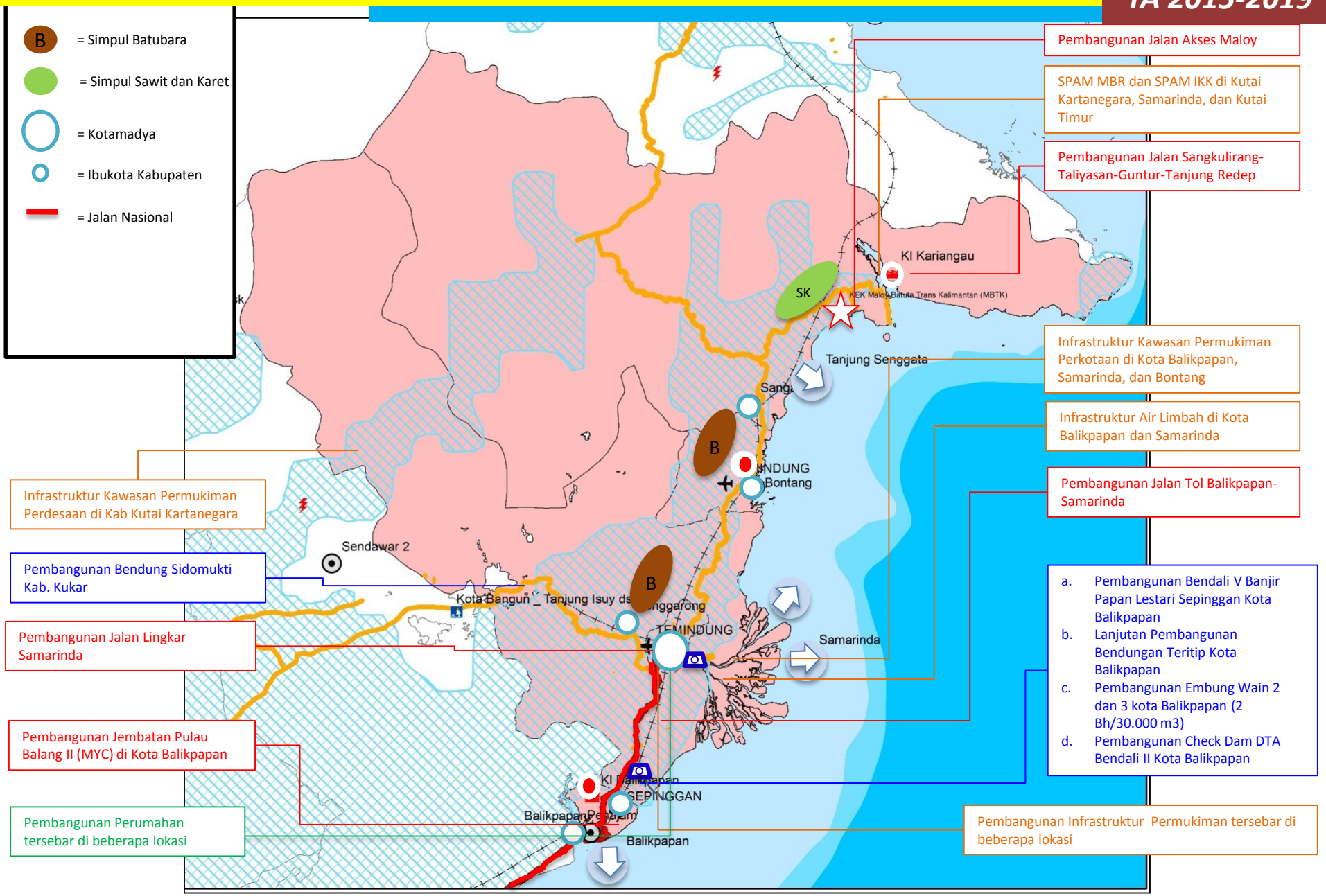

24. Sebaran Program Utama di WPS Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang Bitung – Manado – Amurang – Kotamobagu

TA 2015-2019

Pembangunan Jalan By Pass Manado

Pembangunan Bendungan Kuwil

Pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung

Pengamanan Pantai Amurang

Pembangunan Bendungan Lolak Kab Bolaang Mongondow

Pembangunan Infrastruktur Permukiman Tersebar di beberapa lokasi

Pembangunan Perumahan tersebar di beberapa lokasi

Revitalisasi Danau Tondano Kab. Minahasa Utara

Perkuatan Tebing dan Tanggul Banjr Sungai Tondano Manado

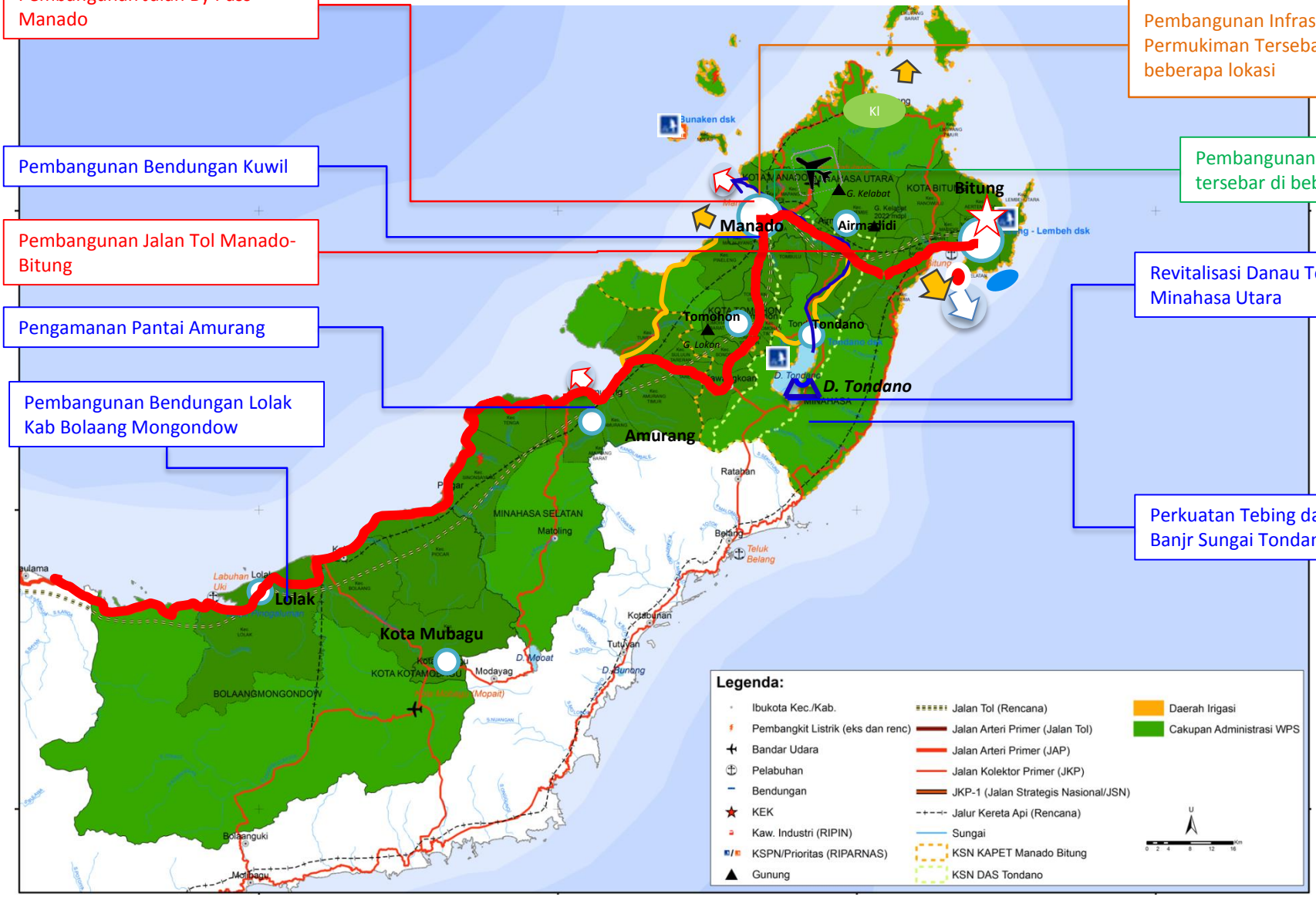

KI Simpul Perkebunan Kelapa

Simpul Perikanan

25. Sebaran Program Utama di WPS Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang Gorontalo – Kotamobagu

TA 2015-2019

Pembangunan Bendungan Pilohaynga

Revitalisasi Danan Limboto

Pembangunan Jalan Gorontalo Outer Ring Road

Pembangunan Jalan Lintas Timur (Pentadu-Bilato-Biluhu Barat-Gorontalo)

Pembangunan Jalan Penghubung Gorontalo-Manado)

Pengamanan Pantai Leato Kota gorontalo

Pengamanan Pantai Biluhu barat dan Timur

Pembangunan Wadukk Bonehulu

Pembangunan Infrastruktur Permukiman Tersebar di beberapa lokasi

Pembangunan Perumahan tersebar di beberapa lokasi

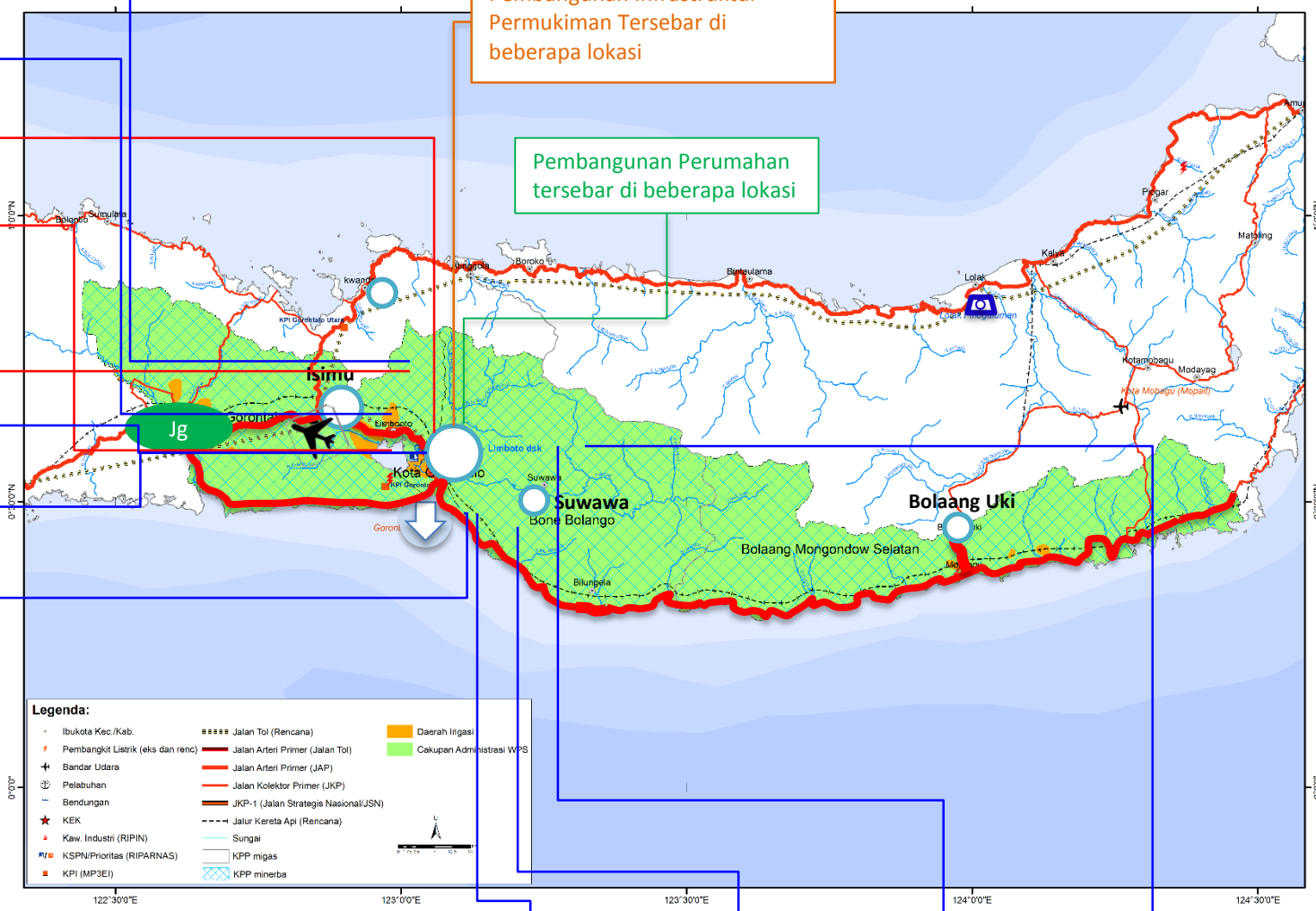

Revitalisasi Danau Perintis

Pembangunan Waduk Kayu Merah

Pengendalian Banir Sunga Bane bolango

Pembangunan Waduk Dumbaya Bulan

Jg Simpul Pertanian Jagung

26. Sebaran Program Utama di WPS Pusat Pertumbuhan Baru Palu – Banggai

TA 2015-2019

Pembangunan Perumahan tersebar di beberapa lokasi

Pembangunan Infrastruktur Permukiman tersebar di beberapa lokasi

a. Pembangunan Jalan Palu-Parigi
b. Pembangunan Flyover Pantoloan
c. Pembangunan Jalan Lingkar Kota Palu

Rusunawa KEK Palu 2 TB

TPA Regional Kota Palu

a.Pembangunan DI Meko
b.Pembangunan Tanggul Sungai Puna

Pembangunan DI Binsil

Pembangunan Jalan Luwuk-Batul-Moilong-Rata-Baturube

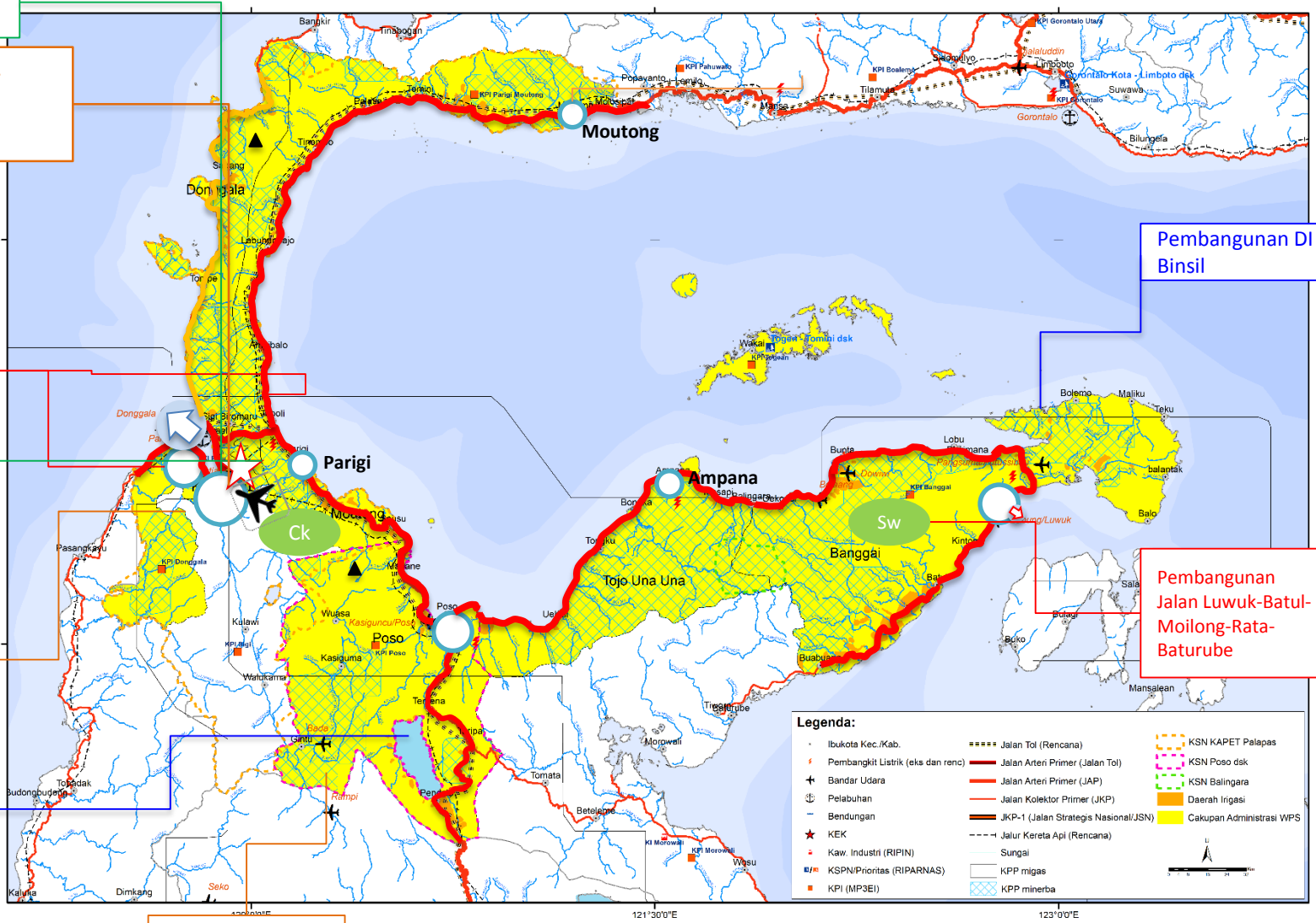

SPAM IKK Tangkuran

Ck Simpul Perkebunan Cokelat

Sw Simpul Perkebunan Cokelat

27. Sebaran Program Utama di WPS Pusat Pertumbuhan Baru Mamuju – Makale – Palopo – Kendari – Bau Bau – Wangi Wangi

TA 2015-2019

Pembangunan Infrastruktur Permukiman tersebar di beberapa lokasi

Pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Belang-Belang

Pembangunan Jalan Akses Bandara Tampa Padang

Pembangunan Jalan Salubatu - Tibo - Kalumpang - Bts Sulsel (Tanah Toraja)

Pembangunan Jalan Salubatu - Mambi - Malabo - Mamasa - Tandung

Pembangunan Jalan Polewali - Tabone - Malabo

Pembangunan Perumahan tersebar di beberapa lokasi

Pembangunan Embung Air Baku di Kab. Luwu Utara (7 buah) Luwu Utara

Pembangunan Tanggul Sungai Konaweha Konawe

Pembangunan Bendungan Pelosika di Kabupaten Konawe

Pembangunan Jalan Akses Pendukung Kawasan Industri Konawe

Pembangunan Jalan Tinanggea-Alangga-Punggaluku-Ambesia

Pembangunan Jalan Tampo-Raha

Pembangunan Pengaman Pantai Bahari Buton

Pembangunan Bendungan Ladongi di Kab. Kolaka

Pembangunan Jalan Lingkar Kota Kendari

Pembangunan Jembatan Teluk Kendari

Pembangunan Jalan Raha - Wakuru - Wara

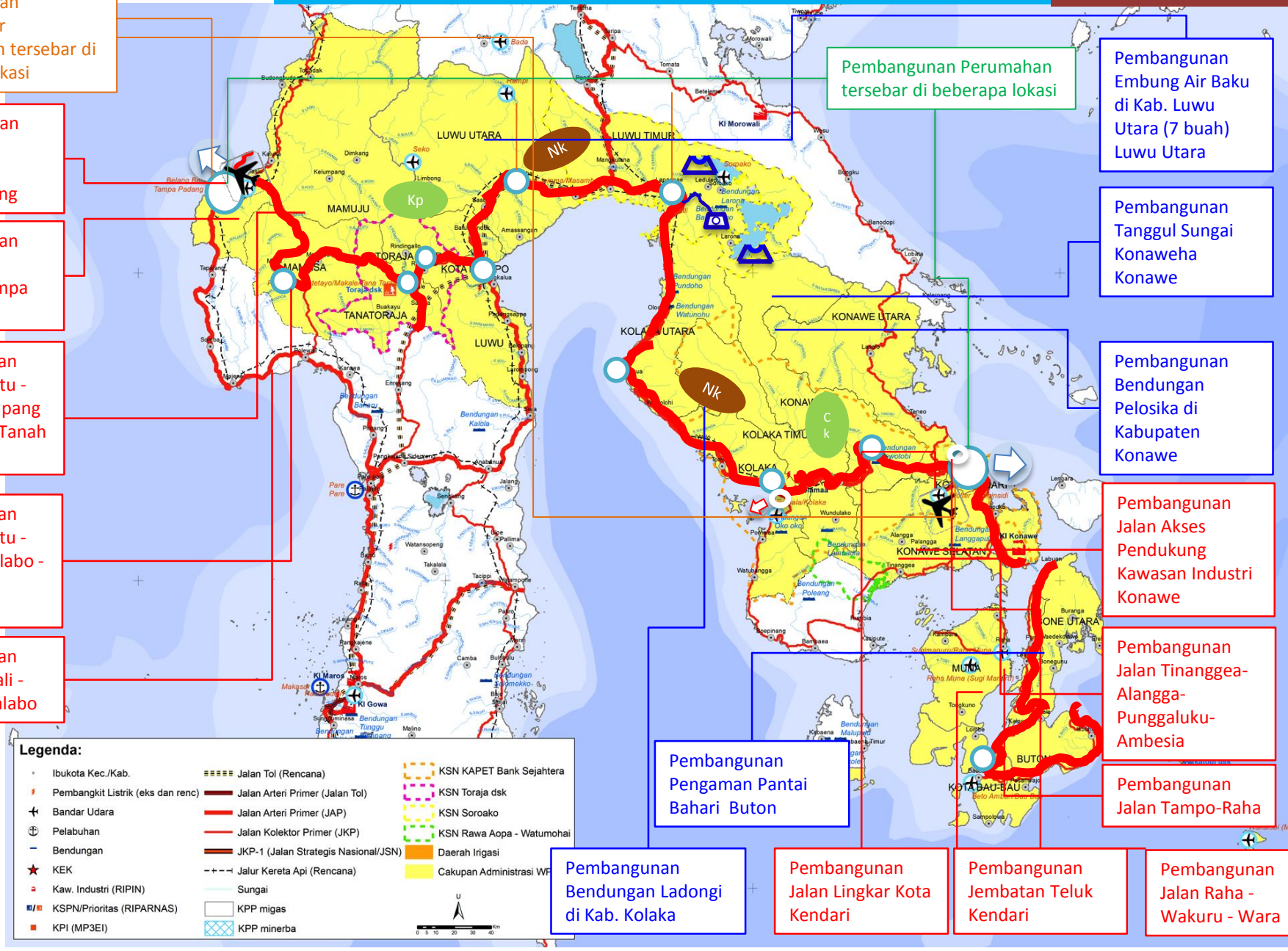

28. Sebaran Program Utama di WPS Pusat Pertumbuhan Terpadu Makassar – Pare Pare – Mamuju

TA 2015-2019

a. Pembangunan Jalan Akses Bandara Tampa Padang
b. Pembangunan Jalan Salubatu-Mambi-Malabo-Mamasa-Tandungfa
c. Pembangunan Jalan Salubatu - Tibo - Kalumpang - Bts Sulsel (Tanah Toraja)
d. Pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Belang-Belang
e. Pembangunan Jalan Polewali-Tabone-Malabo

a. Pembangunan Flyover Akses Bandara Internasional Sultan Hasanuddin
b. Pembangunan Jalan bypass Maminsata
c. Pembangunan Trans Sulawesi Mamminasata (Middle Ring Road)
d. Pembangunan Under Pass A.P. Pettarani

Pembangunan Infrastruktur Permukiman tersebar di beberapa lokasi

Pembangunan Perumahan tersebar di beberapa lokasi

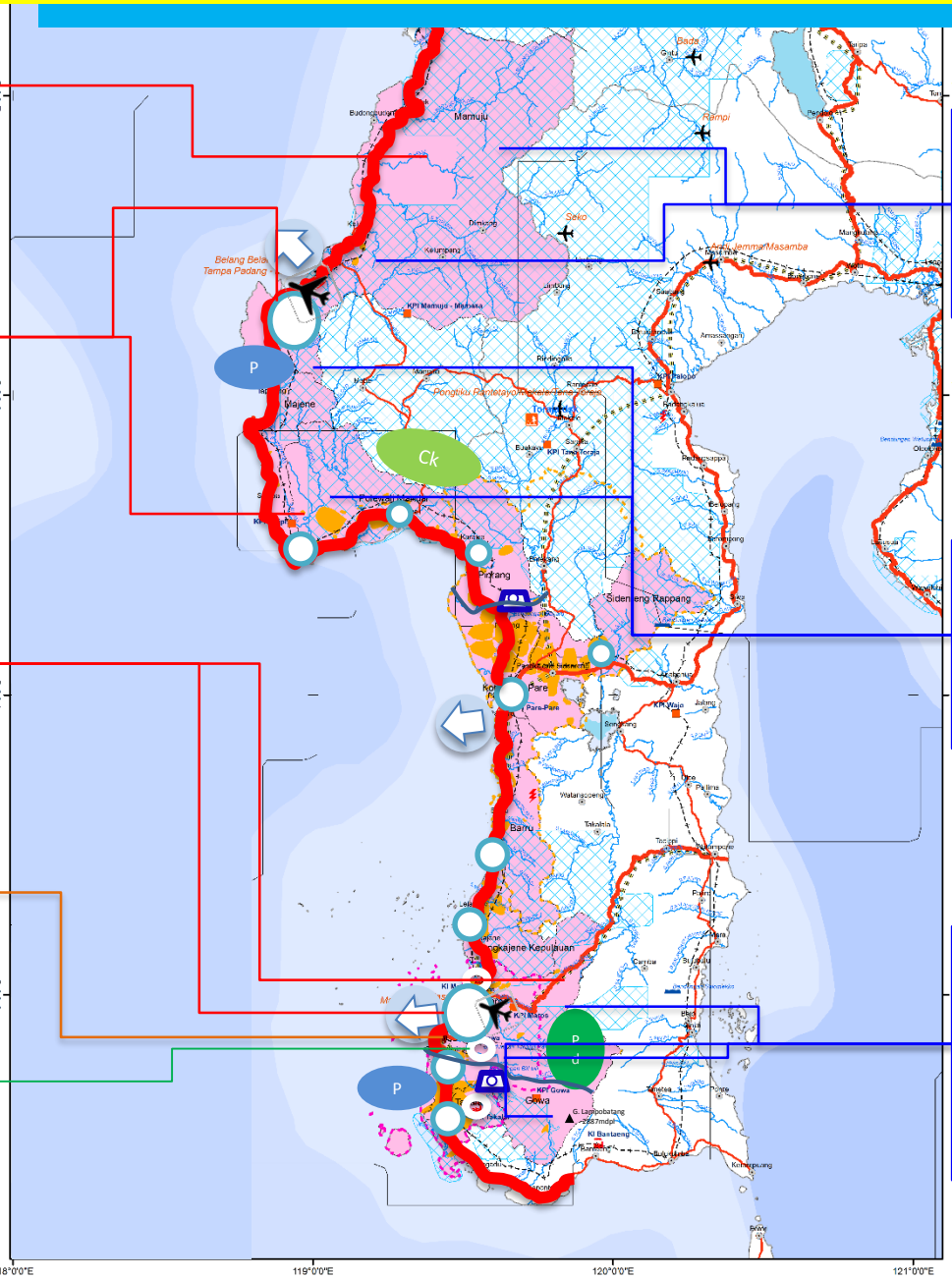

a. Pembuatan Pengendalian Banjir Sungai Lumu Kab Mamuju
b. Pembuatan Pengendalian Banjir Sungai Kalukku, Kab Mamuju
c. Pembuatan Pengendalian Banjir Sungai Papalang Kab Mamuju

a. Pembuatan Pengendalian Banjir Sungai Deking Kab Majene
b. Pembuatan Pengendalian Banjir Sungai Palattoang Kab Majene
c. Pembuatan Pengendalian Banjir Sungai Mandar Kab Polman

a. Pembangunan Bendungan Karalloe Gowa
b. Pembangunan Waduk Pamukulu Takalar
c. Pembangunan Waduk Pasellorang Gowa
d. Pembangunan Bendungan Jenelata Gowa

29. Sebaran Program Utama di WPS Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang Ternate – Sofifi – Daruba

TA 2015-2019

a. Pembangunan Pengaman Pantai Jailolo Tahap I
b. Pembangunan Bendung dan DI Halmahera Barat

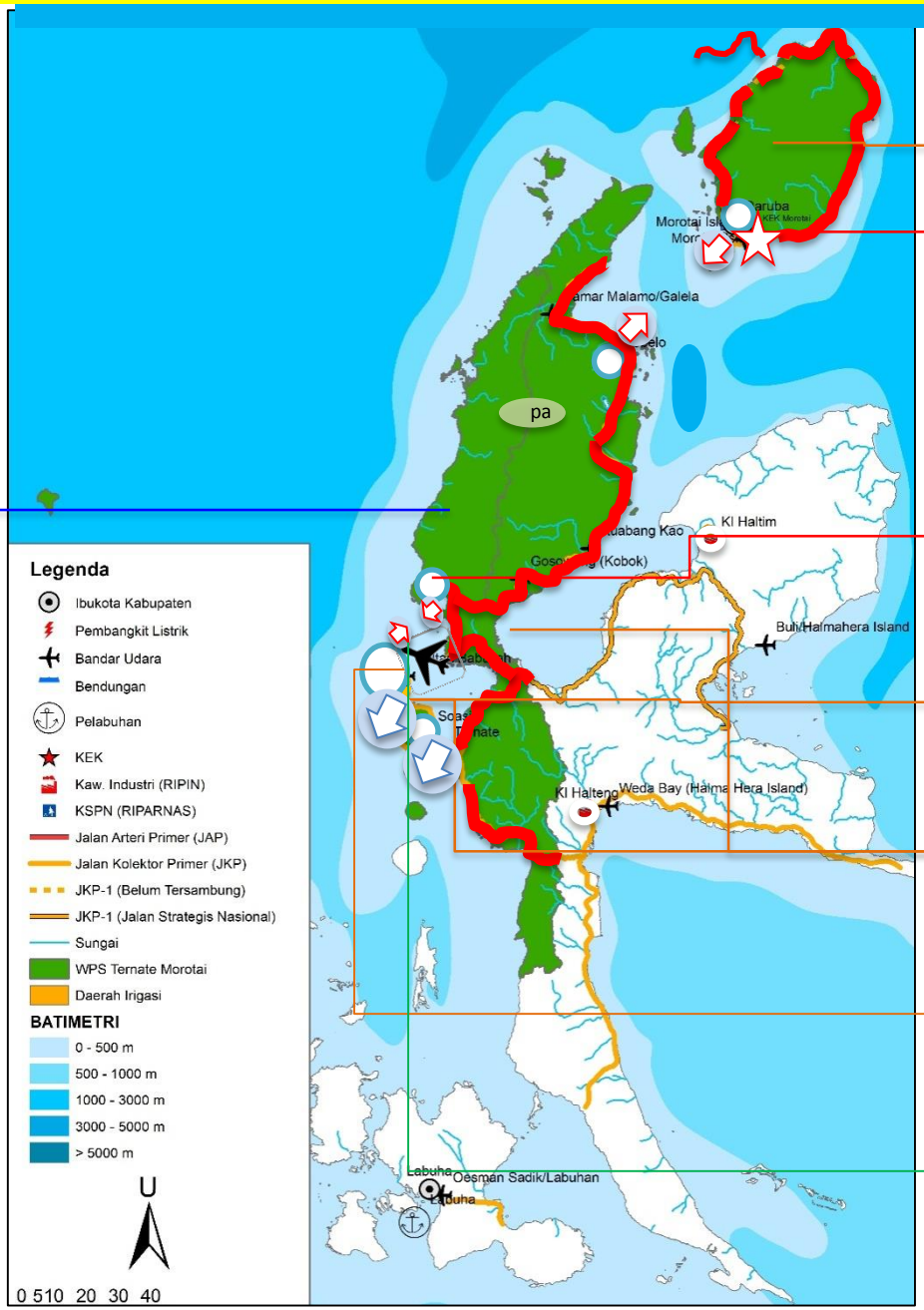

SPAM Khusus Pulau Morotai

Pembangunan Jalan Daruba-Wayabula-Sopi-Barebare

Pembangunan Jalan Lingkar Halmahera Bagian Utara (Sidangoli-Jailolo- Goal-Kedi-Galela)

SPAM Ternate

Rusunawa di Sofifi, Ternate, Buli

Pembangunan Infrastruktur Permukiman tersebar di beberapa lokasi

Pembangunan Perumahan tersebar di beberapa lokasi

Simpul Perikanan

30. Sebaran Program Utama di WPS Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang Ambon – Masohi

TA 2015-2019

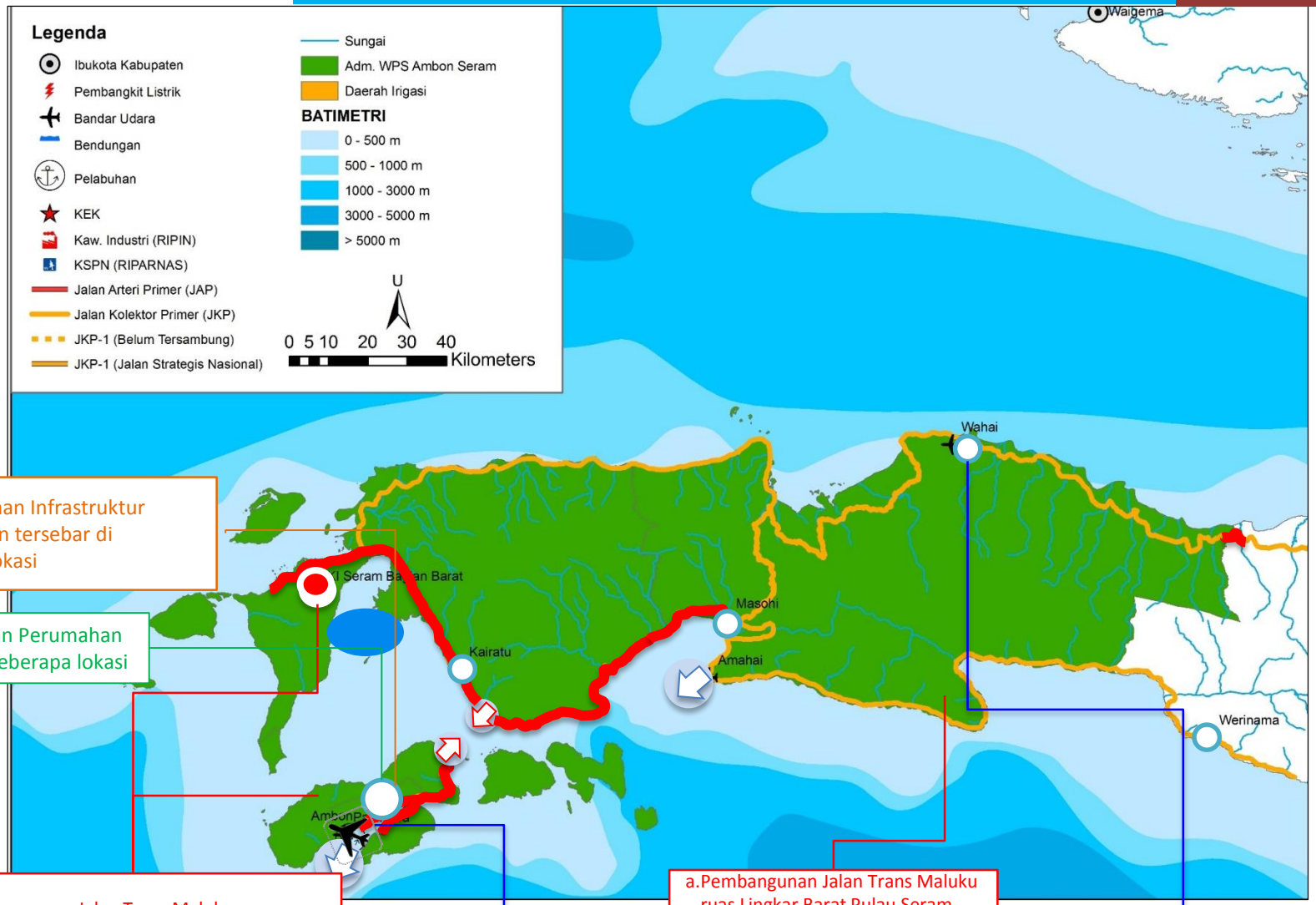

Pembangunan Infrastruktur Permukiman tersebar di beberapa lokasi

Pembangunan Perumahan tersebar di beberapa lokasi

a. Pembangunan Jalan Trans Maluku ruas Lingkar Barat Pulau Seram (Kairatu-Piru-Traniwei-Lisabota-Saleman)
b. Pembangunan Jalan Trans Maluku ruas Lingkar Pulau Ambon (Laha-Alang-Wukasibu-Asilulu-Kaitetu-Hitu-Morela-Liang)

Waduk Way Apu

a. Pembangunan Jalan Trans Maluku ruas Lingkar Barat Pulau Seram (Haya-Tehoru-Warin-Kotabaru-Airnanang
b. Pembangunan Jalan Trans Maluku ruas Lingkar Timur Pulau Seram(Airnanang-Musiwang-Waru-Bula)

Pembangunan Waduk Way Sapalewa

31. Sebaran Program Utama di WPS Pusat Pertumbuhan Baru Sorong – Manokwari

TA 2015-2019

a. Infrastruktur Kawasan Permukiman Perkotaan
b. Infrastruktur Kawasan Permukiman Perdesaan
c. Infrastruktur Drainase Perkotaan
d. Infrastruktur TPA
e. SPAM MBR

Pembangunan Perumahan tersebar di beberapa lokasi

Pembangunan Pengaman Pantai Pulau Fani Kab. Raja Ampat

Pengamanan Pantai Sausapor Kab. Tambrauw

Pembangunan Embung di Kabupaten Raja Ampat (tersebar)

a. Infrastruktur Kawasan Permukiman Perkotaan
b. SPAM MBR

Pembangunan Jalan Lingkar Raja Ampat

a. Pembangunan Jalan Saukorem-Sausafor
b. Pembangunan Jembatan Kebar IX Tahap Akhir

a. Pembangunan Jalan Lingkar Sorong-Pelabuhan Arar
b. Pembangunan Jembatan Klasam

Pembangunan Jalan Manokwari- Mameh-Windesi-Yaur

Pembangunan Jalan Manokwari-Sorong

Pembangunan Infrastruktur Permukiman tersebar di beberapa lokasi

a. Pembangunan Jembatan Warmasi
b. Pembangunan Jembatan Kali Ayai

a. Pembangunan Talud Pengendali Banjir S. Klagison Kota Sorong (0,4 km)
b. Pembangunan Tanggul Pengendali Banjir S. Klamalu (0,6 km)
c. Pembangunan Tanggul Pengendali Banjir Sungai Remu (0,6 km)
d. Pembangunan Breakwater Tj Kasuari (0,4 km)

a) Pembangunan Bendung Wariori di Kab Manokwari
b) Pengendalian Banjir Sungai Aimasi Kab. Manokwarii
c) Pengendalian Banjir Sungai Wariori Kab. Manokwari
d) Pengamanan Pasir Putih di Kab. Manokwari

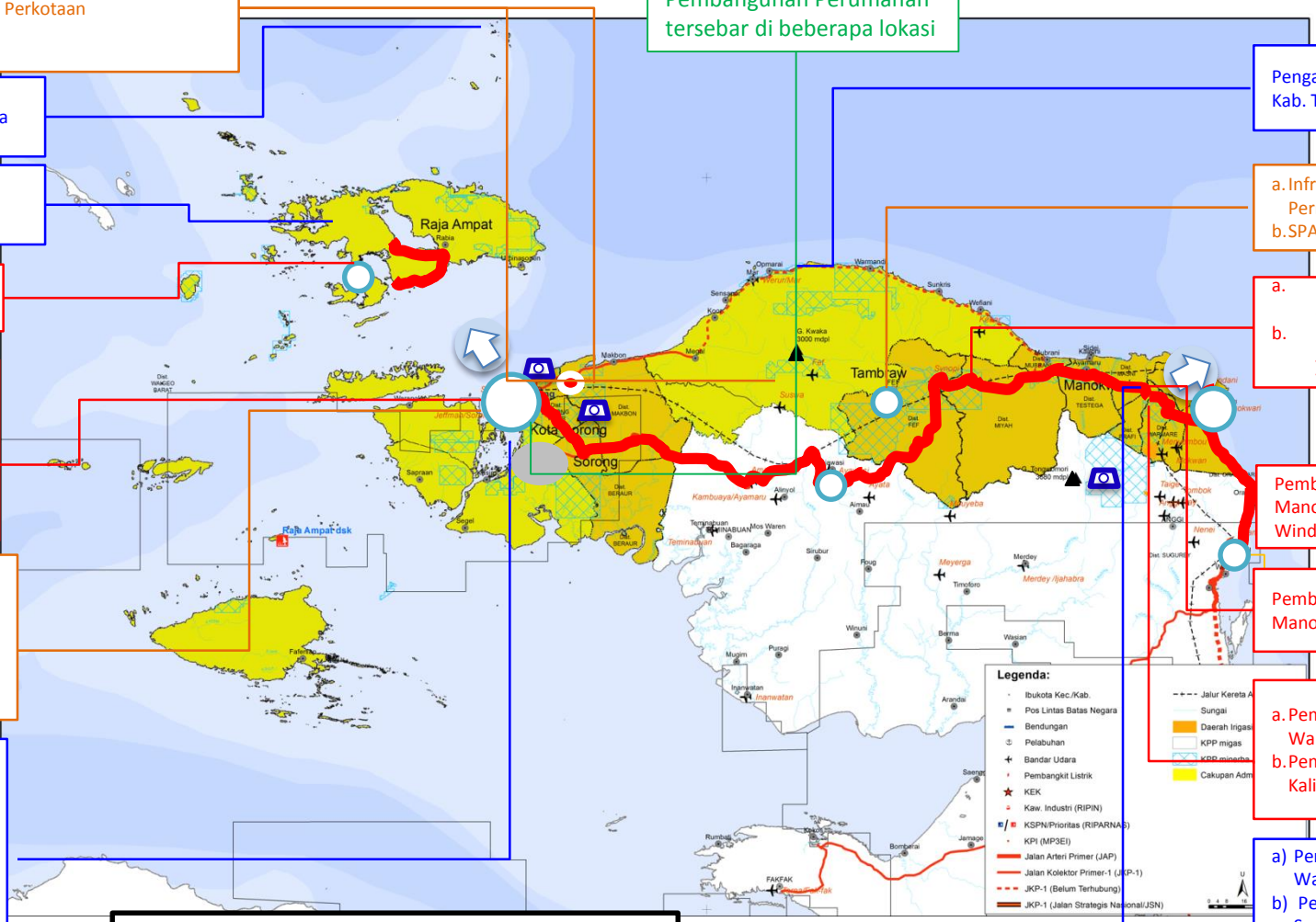

M = Simpul Migas

= Kotamadya

= Jalan Nasional

= Ibukota Kabupaten

= Waduk

32. Sebaran Program Utama di WPS Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang Biak – Manokwari – Bintuni

TA 2015-2019

Pengendalian Banjir Sungai Aimasi Kab. Manokwari

Pengendalian Banjir Sungai Wariori Kab. Manokwari

Pengamanan Pantai Biriosi Wirsi Kab. Manokwari

Pengamanan Pantai Maruni Maripi Kab. Manokwari

Pengamanan Pantai Oransbari

Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Oransbari

Pembangunan Infrastruktur Permukiman tersebar di beberapa lokasi

Pembangunan Embung (tersebar)

Pengamanan Pantai (tersebar)

Pembangunan Jalan Manokwari - Sorong

Pengamanan Pantai Wosi dan Rendani

Lanjutan Pembangunan Bendung Wariori

Pengamanan Pantai Pasir Putih

Pengamanan Pantai Ransiki

Pembangunan Pengaman Pantai Warbefondi

Pembangunan Pengaman Pantai Biak

Pembangunan Jalan Lingkar Kota Biak

Pembangunan Pengaman Pantai Animi

Pembangunan Pengaman Pantai Anggopi

Pembangunan Bendung dan Jaringan Air Baku

Pembangunan Jalan Yaur – Windesi – Mameh – Manokwari

Pembangunan Jalan Manokwari - BIntuni

Pembangunan Perumahan tersebar di beberapa lokasi

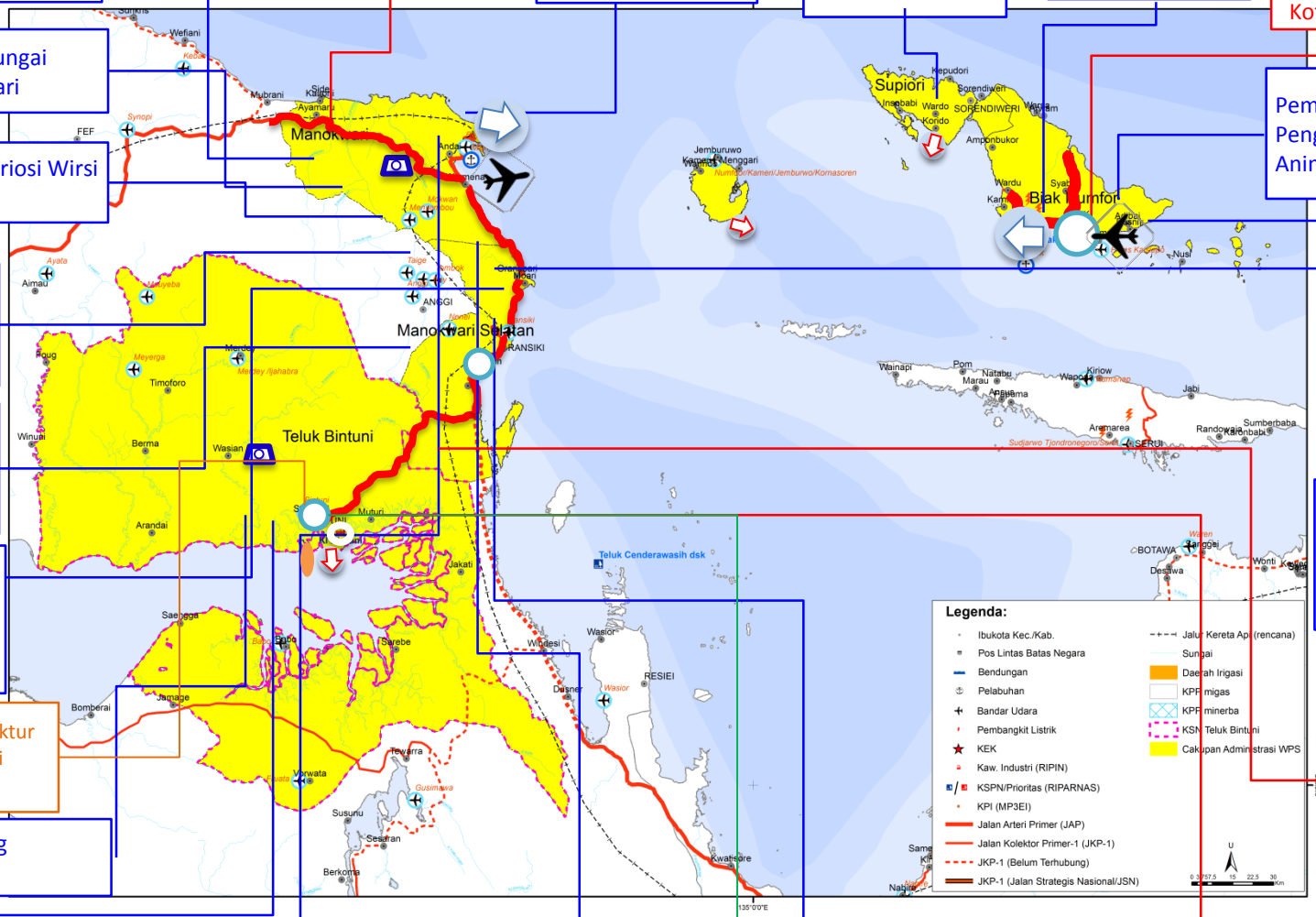

33. Sebaran Program Utama di WPS Pusat Pertumbuhan Baru Nabire – Enarotali – Wamena

TA 2015-2019

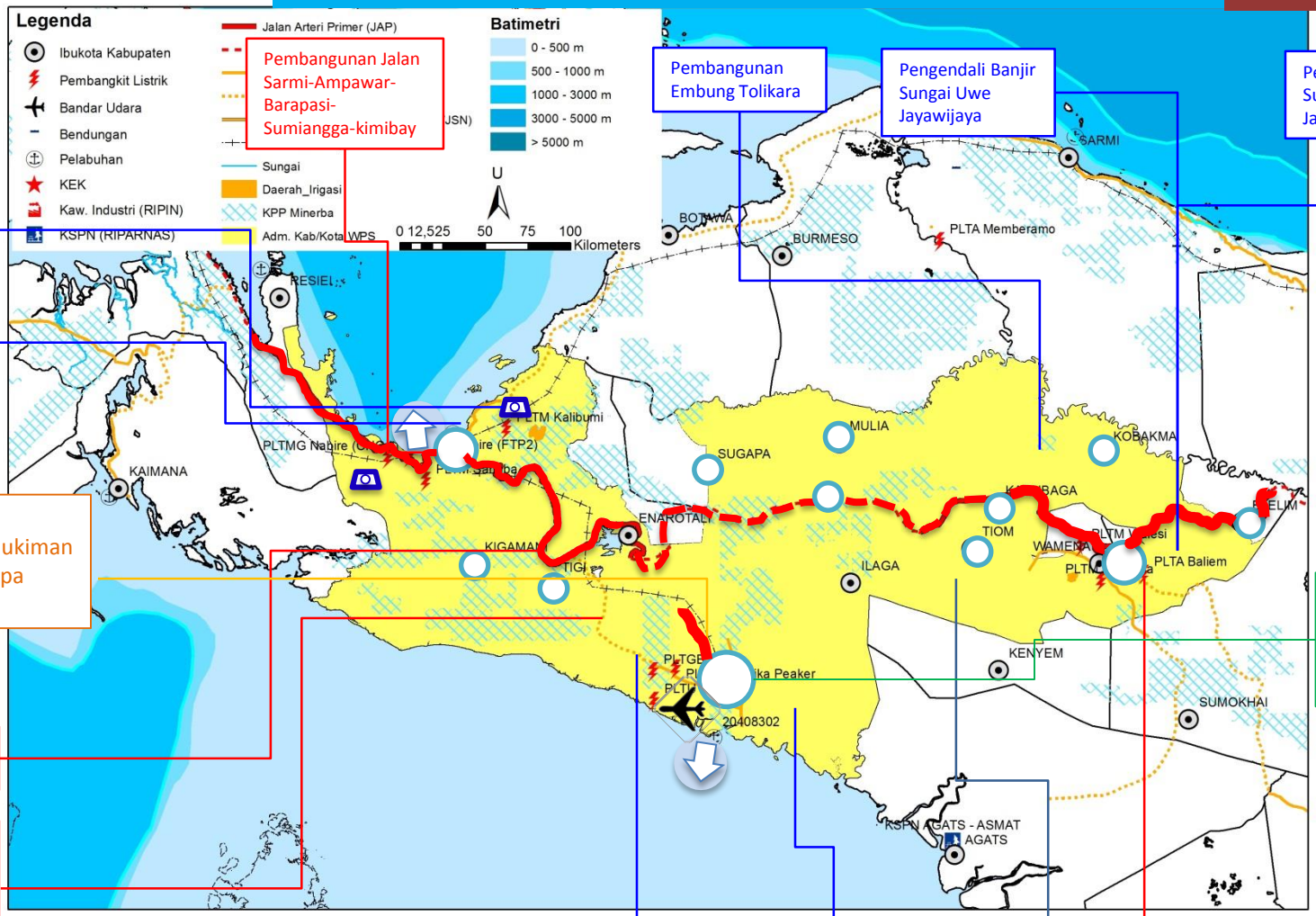

Pembangunan Jalan Sarmi-Ampawar-Barapasi-Sumiangga-kimibay

Pembangunan Embung Tolikara

Pengendali Banjir Sungai Uwe Jayawijaya

Pengendali Banjir Sungai Elokorak Jayawijaya

Pembangunan Bendung Wanggar Nabire

Pengaman Pantai Maff Nabire

Pembangunan Infrastruktur Permukiman tersebar di beberapa lokasi

Pembangunan Perumahan tersebar di beberapa lokasi

Pembangunan Jalan Enarotali-Tiom

Pembangunan Jalan Timika-Potowaibaru-Wagete-Nabire

Pembangunan Embung Timika

Pembangunan Embung Lanny Jaya

Pembangunan Jalan Wabena-Habema-Kenyam

Pembangunan Embung Kab. Mimika

34. Sebaran Program Utama di WPS Perbatasan Negara Jayapura – Merauke

TA 2015-2019

PP = Simpul Pertanian Pangan

= Kotamadya

= Ibukota Kabupaten

= Jalan Nasional

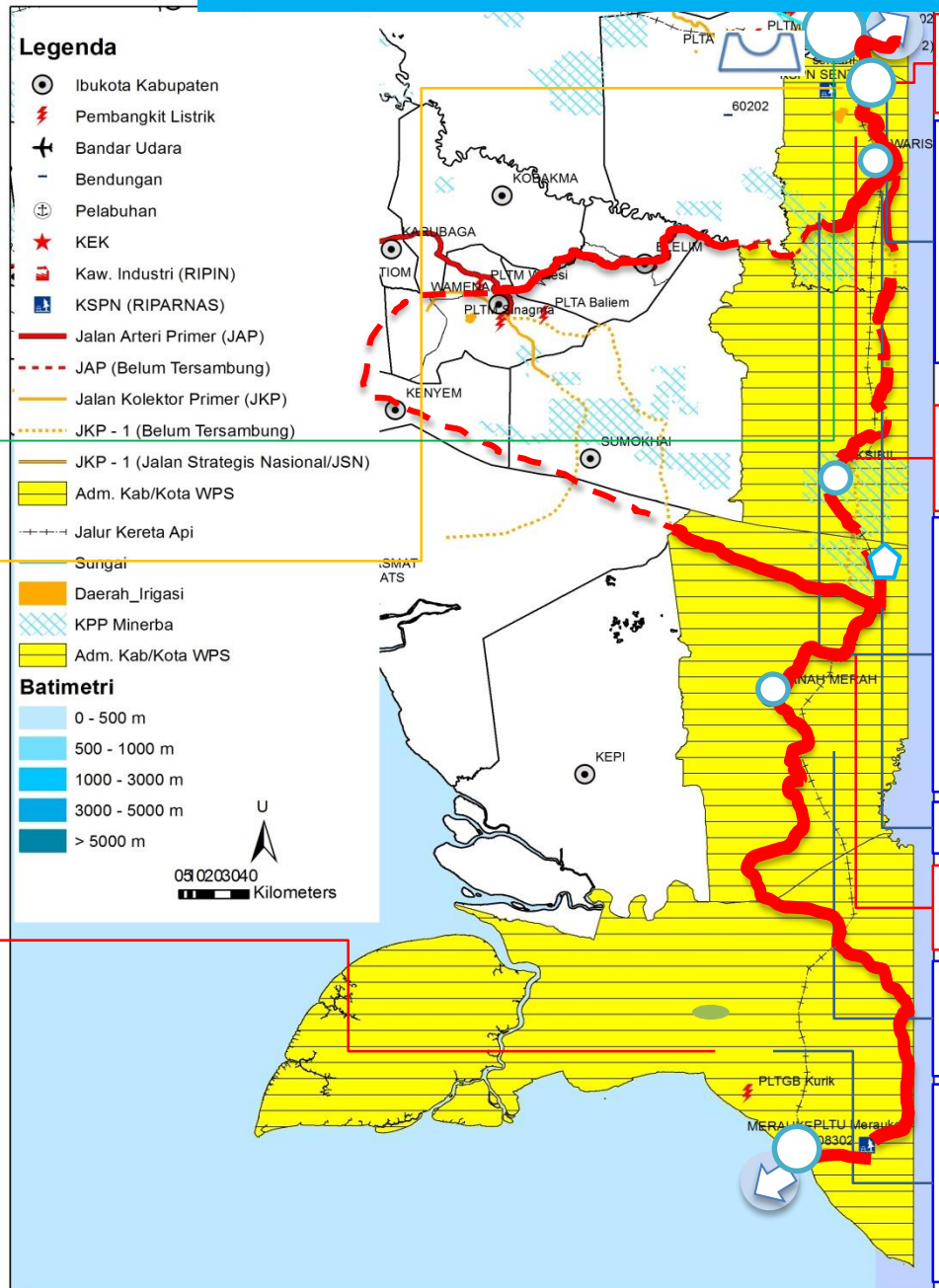

Pembangunan Perumahan tersebar di beberapa lokasi

Pembangunan Infrastruktur Permukiman tersebar di beberapa lokasi

a. Pembangunan Jalan Okaba – Sanomere – Bade
b. Pembangunan Jalan Merauke - Okaba - Buraka - Wanam - Bian – Wogikel
c. Pembangunan Jalan Merauke - Okaba - Buraka - Wanam - Bian - Wogikel

a. Pembangunan Jalan Jayapura – Wamena – Mulia
b. Pembangunan Jalan Ring Road Kota Jayapura
c. Pembangunan Jembatan Holtekam

a. Pembangunan Pengaman Pantai Skouw Sae Kota Jayapura
b. Pembangunan Pengaman Pantai Skow
Pembangunan Pengaman Pantai Holtekamp
Pembangunan jaringan dan intake Danau Sentani untuk kota Jayapura dan Kota Sentani tahap III (lanjutan) Kota Jayapura

a. Pembangunan Jalan Depapre – Bongkrang
b. Pembangunan Jalan Warumbaim – Taja – Lereh - Tengon

a. Pengendalian Banjir Sungai Yahim Kabupaten Jayapura
b. Pengendalian Banjir Sungai Dobokurung Kabupaten Jayapura
c. Pengendalian Banjir Distrik Lereh Kabupaten Jayapura Jayapura
d. Pengendalian Banjir Distrik Nimbokrang Kabupaten Jayapura

Pengendalian Banjir Kabupaten Keerom

Pembangunan Jalan Sumohai - Dekai – Oksibil – Iwur - Waropko

a. Pengendalian Banjir Sungai Digoel Kabupaten Boven Digoel
b. Pembangunan Embung di Kabupaten Boven Digul

a. Pembangunan Pengaman Pantai Lampu Satu Kabupaten Merauke (Lanjutan)
b. Pembangunan KTA/PAH/Bendali di Kabupaten Merauke
c. Pembangunan Embung di Kabupaten Merauke
d. Pembangunan Long Storage di Kabupaten Merauke
e. Pembangunan sarana tampungan air baku rawa Biru distrik Sota Merauke

35. Sebaran Program Utama di WPS Pusat Pertumbuhan Baru Pulau-Pulau Kecil Terluar

TA 2015-2019

- Pembangunan Infrastruktur Kws Permukiman Perkotaan Kota Sabang
- Pembangunan TPST/3R

Peningkatan Struktur Jalan Lingkar Pulau Sebatik

Pembangunan Bangunan Pengaman Pantai Miangas (Lanjutan)

Peningkatan jalan Pusat Kota Sabang-COT Damar-Km 0 P.weh (27,32 KM)

Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh di Ranai Kota, Bunguran Timur

Pembangunan Pengaman Pantai & SID pembangunan Infrastruktur Pantai

Pelebaran Jalan & rehabilitasi minor di P.Sangihe

Pembangunan waduk Rayaseunara

Pembangunan infrastruktur permukiman di Kawasan Pelabuhan bebas Sabang

PBL di Kawasan Pelabuhan bebas Sabang

Sanimas & Spam Kawasan Rawan Air Kec.Pagai Selatan

Pembangunan perumahan di Kawasan Pelabuhan bebas Sabang

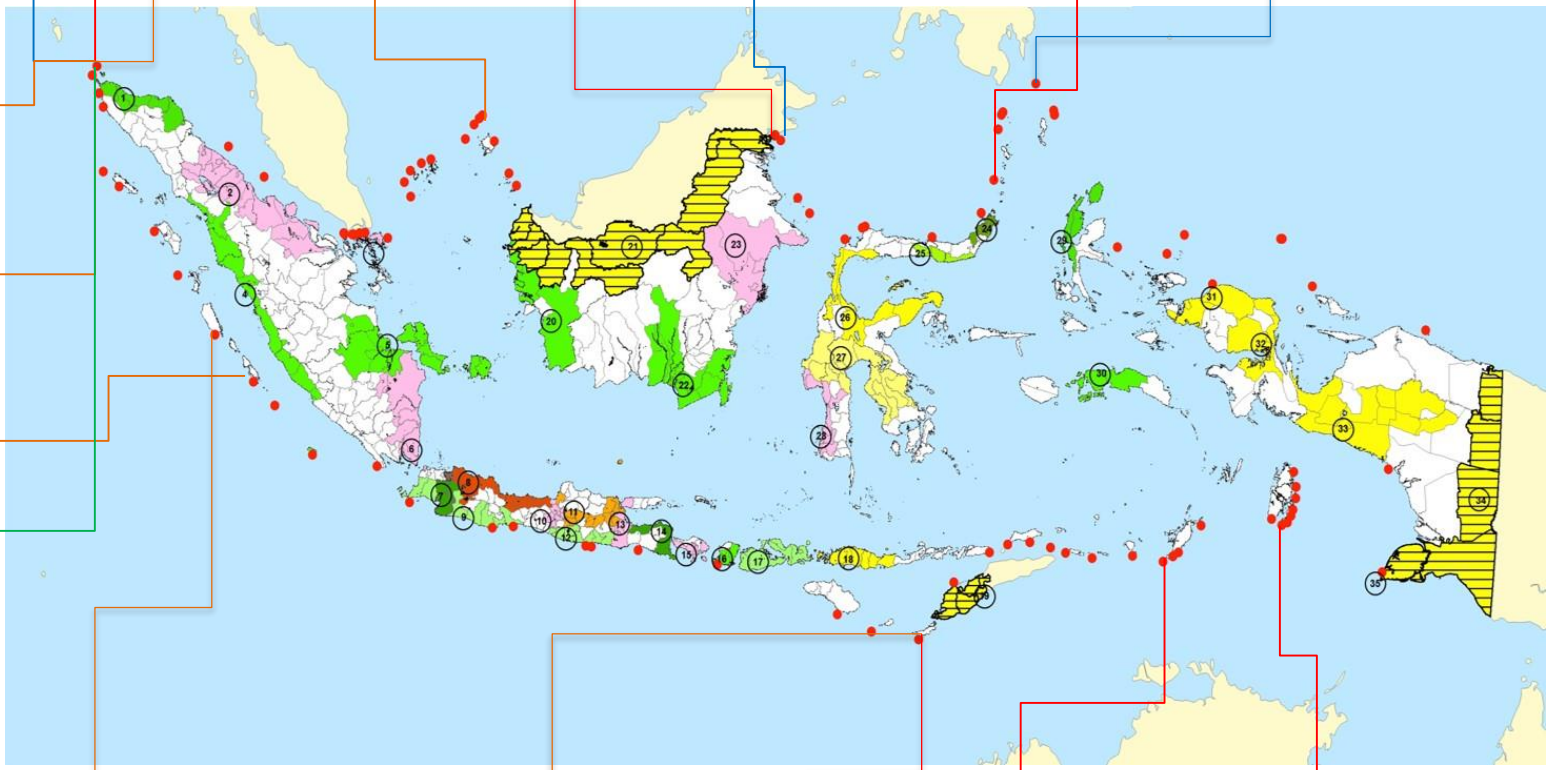

Pembangunan SPAM IKK Baa dan IKK Rote Barat Laut

Pelebaran jalan Dobo-Dermaga

Pembangunan SPAM Di Kws Khusus Kep. Mentawai

Peningkatan Struktur Jalan Di Pulau Rote

- Pelebaran jalan di P.Yamdena
- Peningkatan Jembatan Wear Aruibab Besar

Lampiran III

MATRIKS RENCANA STRATEGIS BPIW

TABEL L-2 MATRIKS PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN TUJUAN BPIW

TUJUAN 1: Menyelenggarakan pembangunan pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan

		SASARAN/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	LOKASI	TARGET						ANGGARAN (JUTA)					
					2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
SASARAN STRATEGIS																
1		**Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR antardaerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan**														
	(1)	Indeks rasio dukungan infrastruktur PUPR terhadap keterpaduan pengembangan kawasan	%	35 WPS	80	85	90	95	100	100						
2		**Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran.**														
	(1)	Tingkat keterpaduan kebijakan, perencanaan,pemrograman terhadap penganggaran pembangunan bidang PUPR	%	7 Pulau	80	85	90	95	100	100						
3		**Meningkatnya kapasitas dan kualitas konstruksi nasional**														
	(1)	Tingkat pengendalian pelaksanaan konstruksi nasional	%		75	78	82	86	90	90						
PROGRAM 1 : PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH																
SASARAN PROGRAM											**525.500**	**948.840**	**1.187.616**	**1.302.616**	**1.420.616**	**5.385.189**
1		**Meningkatnya keterpaduan infrastruktur PUPR dengan pengembangan Kawasan Strategis baik di perkotaan, kluster industri maupun perdesaan**														
	1	Tingkat keterpaduan infrastruktur PUPR dalam kawasan	%	35 WPS	78	84	89	95	100	100						
	2	Tingkat keterpaduan infrastruktur PUPR antar kawasan di dalam WPS	%	35 WPS	78	83	89	94	100	100						
	3	Tingkat keterpaduan infrastruktur PUPR antar WPS	%	35 WPS	76	82	88	94	100	100						
2		**Meningkatnya keterpaduan perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR dengan pengembangan Kawasan Strategis baik di perkotaan, kluster industri maupun perdesaan**														
	1	Tingkat keterpaduan perencanaan dengan pelaksanaan (deviasi) dalam kawasan, antar kawasan dan antar WPS	%	35 WPS	80	85	90	95	100	100						
	2	Tingkat sinkronisasi program (waktu, fungsi, lokasi, besaran) disparitas kebutuhan dengan pemrograman	%	35 WPS	79	84	90	95	100	100						
KEGIATAN 1.1: DUKUNGAN MANAJEMEN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH																
UNIT ORGANISASI : SEKRETARIAT BADAN																
SASARAN KEGIATAN											**140.342**	**165.000**	**180.000**	**190.000**	**200.000**	**875.342**
1		**Layanan Administrasi Kepegawaian**	**Laporan**	**Jakarta**	**7**	**8**	**7**	**11**	**12**	**45**	**11.475**	**14.000**	**16.100**	**18.515**	**21.292**	**81.382**
	1	Jumlah layanan administrasi kepegawaian	Laporan	Jakarta	7	8	7	11	12	45						
2		**Layanan Perencanaan Program Anggaran dan Evaluasi Kinerja serta Pengelolaan Data Informasi**	**Laporan**	**Jakarta**	**7**	**9**	**10**	**11**	**12**	**49**	**10.730**	**13.000**	**14.950**	**17.193**	**19.771**	**75.644**
	1	Jumlah kegiatan perencanaan program dan anggaran serta evaluasi kinerja	Laporan	Jakarta	4	4	6	6	7	27						
	2	Jumlah layanan data informasi	Laporan	Jakarta	3	5	4	5	5	22						

SASARAN/ INDIKATOR KINERJA		SATUAN	LOKASI	TARGET						ANGGARAN (JUTA)					
				2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	**Layanan Hukum,Kerjasama, dan Informasi**	**Laporan**	**Jakarta**	9	9	12	13	14	57	**21.533**	**25.000**	**28.750**	**29.601**	**30.041**	**134.925**
1	Jumlah layanan produk dan bantuan hukum	Laporan	Jakarta	3	3	4	4	4	18						
2	Jumlah fasilitasi kerjasama	Laporan	Jakarta	3	3	4	5	5	20						
3	Jumlah layanan informasi	Laporan	Jakarta	3	3	4	4	5	19						
4	**Layanan Administrasi Keuangan, Umum dan BMN**	**Laporan**	**Jakarta**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**50**	**9.660**	**11.109**	**12.775**	**14.692**	**16.895**	**65.131**
1	Jumah layanan administrasi keuangan, umum dan BMN	Laporan	Jakarta	8	9	10	11	12	50						
5	**Layanan Perkantoran**	**Laporan**	**Jakarta**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**20**	**86.944**	**101.891**	**107.425**	**110.000**	**112.000**	**518.260**
1	Jumlah layanan perkantoran	Laporan	Jakarta	4	4	4	4	4	20						
KEGIATAN 1.2: PERENCANAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT															
UNIT ORGANISASI: PUSAT PERENCANAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT															
SASARAN KEGIATAN										**72.380**	**100.000**	**137.154**	**147.154**	**157.154**	**613.842**
1	**Kebijakan dan strategi keterpaduan pembangunan infrastruktur wilayah bidang PUPR antar sektor/ wilayah**	**Dokumen Rumusan** **Pedoman**	**Jakarta**	**4** **1**	**3** **4**	**4** **3**	**4** **3**	**4** **3**	**19** **14**	**10.500**	**13.500**	**18.000**	**19.576**	**18.000**	**79.576**
1	Jumlah dokumen rumusan kebijakan dan strategi keterpaduan pembangunan infrastruktur wilayah bidang PUPR antar sektor/ wilayah yang disusun dan difasilitasi	Dokumen	Jakarta	4	3	4	4	4	19						
2	Jumlah pedoman perencanaan dan pengembangan infrastruktur terpadu bidang PUPR yang disusun dan difasilitasi penerapannya	Pedoman	Jakarta	1	4	3	3	3	14						
2	**Rencana jangka panjang dan rencana strategis pembangunan infrastruktur terpadu bidang PUPR**	**Dokumen**	**Jakarta**	**4**	**9**	**11**	**12**	**12**	**48**	**3.400**	**14.000**	**19.623**	**20.160**	**24.192**	**81.375**
1	Jumlah dokumen rencana strategis serta rumusan rencana jangka panjang dan menengah pembangunan infrastruktur bidang PUPR yang disusun dan difasilitasi	Dokumen	Jakarta	4	9	11	12	12	48						
3	**Rencana induk dan rencana pengembangan infrastruktur bidang PUPR terpadu antarsektor, antar wilayah pengembangan strategis, antartingkat pemerintahan, dan antarpulau**	**Dokumen**	**Jakarta**	**13**	**12**	**12**	**13**	**14**	**64**	**30.600**	**29.000**	**30.450**	**31.973**	**32.515**	**154.537**
1	Jumlah dokumen rencana induk dan rencana pengembangan infrastruktur bidang PUPR terpadu antarsektor, antar wilayah pengembangan strategis, antartingkat pemerintahan, dan antarpulau yang disusun dan difasilitasi	Dokumen	Jakarta	13	12	12	13	14	64						
4	**Layanan data dan informasi pengembangan infrastruktur terpadu bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat**	**laporan**	**Jakarta**	**0**	**2**	**4**	**4**	**4**	**14**	**0**	**3.000**	**5.200**	**5.720**	**6.292**	**20.212**
1	Jumlah laporan data dan informasi pengembangan infrastruktur terpadu bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang disebarluaskan	laporan	Jakarta	0	2	4	4	4	14						
5	**Fasilitasi kerjasama regional dan global yang dilaksanakan**	**laporan**	**Jakarta**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**20**	**7.500**	**12.000**	**14.231**	**15.111**	**16.079**	**64.921**
1	Jumlah fasilitasi kerjasama regional dan global yang dilaksanakan	laporan	Jakarta	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**20**						
6	**Rekomendasi hasil analisis dampak dan manfaat keterpaduan pengembangan infrastruktur PUPR**	**Dokumen**	**Jakarta**	**4**	**1**	**5**	**5**	**5**	**20**	**12.000**	**3.000**	**15.000**	**16.500**	**18.150**	**64.650**

SASARAN/ INDIKATOR KINERJA			SATUAN	LOKASI	TARGET						ANGGARAN (JUTA)					
					2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1	Jumlah dokumen rekomendasi hasil analisis kesesuaian dengan kebutuhan pengembangan infrastruktur PUPR	Dokumen	Jakarta	4	1	5	5	5	20						
7	**Program jangka panjang dan jangka menengah keterpaduan yang telah disinkronisasi**		**Dokumen**	**Jakarta**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**5**	**2.000**	**4.000**	**4.400**	**4.840**	**5.324**	**20.564**
	1	Jumlah dokumen program jangka panjang dan jangka menengah keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang sinkron	Dokumen	Jakarta	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**5**						
8	**Skema pembiayaan pengembangan yang disusun dan difasilitasi**		**Dokumen**	**Jakarta**	**1**	**2**	**2**	**2**	**2**	**9**	**2.000**	**6.000**	**6.600**	**7.260**	**7.986**	**29.846**
	1	Jumlah dokumen rumusan skema pembiayaan pengembangan yang disusun dan difasilitasi	Dokumen	Jakarta	1	2	2	2	2	9						
9	**Layanan teknis terkait kebijakan teknis perencanaan pengembangan kawasan dan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat**		**laporan**	**Jakarta**	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**	**4**	**0**	**3.000**	**3.300**	**3.630**	**3.993**	**13.923**
	1	Jumlah layanan teknis yang diaplikasikan oleh stakeholders	laporan	Jakarta	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**	**4**						
10	**Rekomendasi hasil evaluasi keterpaduan perencanaan, pemrograman dan pengembangan infrastruktur PUPR dalam kawasan, antar kawasan, antar WPS**		**Dokumen**	**Jakarta**	**0**	**1**	**4**	**4**	**4**	**13**	**0**	**2.000**	**8.800**	**9.680**	**10.648**	**31.128**
	1	Jumlah dokumen rekomendasi hasil evaluasi keterpaduan pemrograman, penganggaran dan pengembangan infrastruktur PUPR dalam kawasan, antar kawasan, antar WPS yang dilaksanakan	Dokumen	Jakarta	0	1	4	4	4	13						
11	**Layanan perkantoran**		**Laporan**	**Jakarta**	**3**	**7**	**7**	**7**	**7**	**31**	**4.380**	**10.500**	**11.550**	**12.705**	**13.976**	**53.111**
	1	Jumlah laporan layanan perkantoran yang dilaksanakan	Laporan	Jakarta	**3**	**7**	**7**	**7**	**7**	**31**						
KEGIATAN 1.3: PEMROGRAMAN DAN EVALUASI KETERPADUAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT																
UNIT ORGANISASI : PUSAT PEMROGRAMAN DAN EVALUASI KETERPADUAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT																
SASARAN KEGIATAN											**89.664**	**120.000**	**162.154**	**177.154**	**192.154**	**741.126**
1	**Pedoman teknis sinkronisasi program jangka pendek dan tahunan keterpaduan pembangunan infrastruktur wilayah bidang PUPR**		**Pedoman**	**Jakarta**	**2**	**3**	**7**	**8**	**9**	**29**	**2.750**	**4.000**	**8.000**	**9.000**	**10.000**	**33.750**
	1	Jumlah pedoman teknis sinkronisasi program jangka pendek dan tahunan keterpaduan pembangunan infrastruktur wilayah bidang PUPR	Pedoman	Jakarta	2	3	7	8	9	29						
2	**Program tahunan keterpaduan yang telah disinkronisasi untuk 35 WPS**		**dokumen rumusan**	**Jakarta**	**51**	**26**	**30**	**31**	**32**	**170**	**57.384**	**63.750**	**60.000**	**62.000**	**63.000**	**306.134**
	1	Jumlah rumusan program tahunan untuk 35 WPS yang sinkron	dokumen rumusan	Jakarta	51	26	30	31	32	170						
3	**Layanan teknis terkait sinkronisasi program jangka pendek dan tahunan keterpaduan pembangunan infrastruktur wilayah bidang PUPR**		**dokumen**	**Jakarta**	**5**	**15**	**19**	**21**	**23**	**83**	**10.000**	**18.750**	**20.000**	**21.000**	**25.000**	**94.750**
	1	Jumlah layanan teknis yang diaplikasikan oleh stakeholders	dokumen	Jakarta	5	15	19	21	23	83						

SASARAN/ INDIKATOR KINERJA			SATUAN	LOKASI	TARGET						ANGGARAN (JUTA)					
					2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	**Rekomendasi hasil evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan dan program keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang PUPR**		**dokumen rekomendasi**	**Jakarta**	**2**	**3**	**27**	**32**	**34**	**98**	**4.750**	**4.000**	**33.000**	**41.000**	**45.000**	**127.750**
	1	Jumlah Rekomendasi hasil evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan dan program keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang PUPR yang susun	dokumen rekomendasi	Jakarta	2	3	27	32	34	98						
5	**Kinerja pelaksanaan kebijakan dan program keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang PUPR**		**dokumen**	**Jakarta**	**2**	**9**	**10**	**11**	**12**	**44**	**6.900**	**16.250**	**20.000**	**21.000**	**23.000**	**87.150**
	1	Jumlah dokumen kebijakan keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang PUPR yang dilaksanakan	dokumen	Jakarta	2	9	10	11	12	44						
6	**Layanan data dan informasi keterpaduan antara pengembangan kawasan dan infrastruktur bidang PUPR**		**dokumen**	**Jakarta**	**2**	**6**	**7**	**8**	**9**	**32**	**2.100**	**7.250**	**7.000**	**8.000**	**10.000**	**34.350**
	1	Jumlah dokumen data dan informasi keterpaduan antara pengembangan kawasan dan infrastruktur bidang PUPR yang disebarluaskan	dokumen	Jakarta	2	6	**7**	**8**	**9**	**32**						
7	**Layanan Perkantoran**		**%**	**Jakarta**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**5.780**	**6.000**	**14.154**	**15.154**	**16.154**	**57.242**
	1	Tingkat layanan perkantoran	%	Jakarta	100	100	100	100	100	100						
KEGIATAN 1.4: PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS																
UNIT ORGANISASI : PUSAT PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS																
SASARAN KEGIATAN											**111.210**	**313.840**	**408.308**	**458.308**	**508.308**	**1.799.974**
1	**Kebijakan teknis keterpaduan pengembangan kawasan strategis dan antar kawasan strategis dengan pembangunan infrastruktur bidang PUPR**		**Pedoman Teknis** **Dokumen**	**Jakarta**	**3** **2**	**3** **2**	**4** **2**	**4** **3**	**4** **3**	**15** **10**	**20.957**	**9.020**	**12.420**	**14.029**	**16.736**	**73.162**
	1	Jumlah pedoman teknis perencanaan dan pemrograman keterpaduan pengembangan kawasan strategis dan antar kawasan strategis dengan pembangunan infrastruktur PUPR yang disusun dan difasilitasi	Pedoman Teknis	Jakarta	3	3	4	4	4	18						
	2	Jumlah kebijakan teknis keterpaduan pengembangan kawasan strategis dan antar kawasan strategis dengan pembangunan infrastruktur bidang PUPR yang disusun dan	Dokumen	Jakarta	2	2	2	3	3	12						
2	**Rencana keterpaduan pengembangan kawasan strategis dan antar kawasan strategis dengan pembangunan infrastruktur bidang PUPR**		**Rencana**	**Jakarta**	**9**	**9**	**10**	**11**	**11**	**99**	**37.431**	**48.000**	**63.641**	**65.600**	**67.000**	**281.672**
	1	Jumlah rencana keterpaduan pengembangan kawasan strategis dan antar kawasan strategis dengan pembangunan infrastruktur bidang PUPR yang disusun dan difasilitasi	Rencana	Jakarta	21	21	16	20	21	99						
3	**Layanan data dan informasi keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat**		**laporan**	**Jakarta**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**10**	**3.500**	**10.000**	**14.230**	**17.000**	**20.000**	**64.730**
	1	Jumlah laporan layanan data informasi	laporan	Jakarta	2	2	2	2	2	10						

SASARAN/ INDIKATOR KINERJA		SATUAN	LOKASI	TARGET						ANGGARAN (JUTA)					
				2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	**Area inkubasi pada kawasan strategis yang dibangun**	**Rencana Teknis** **Area Inkubasi**	**Jakarta**	**7** **4**	**7** **4**	**7** **7**	**8** **7**	**9** **9**	**31** **27**	**25.440**	**200.000**	**235.177**	**266.000**	**292.519**	**1.019.136**
1	Jumlah rencana teknis area inkubasi pada kawasan strategis yang ditetapkan	Rencana Teknis	Jakarta	7	7	7	8	9	38						
2	Jumlah area inkubasi pada kawasan strategis yang dibangun	Area Inkubasi	Jakarta	4	4	7	7	9	31						
5	**Fasilitasi pencadangan dan pengadaan tanah yang dilaksanakan untuk 35 WPS**	**lokasi**	**Jakarta**	**20**	**20**	**29**	**33**	**37**	**139**	**14.800**	**37.738**	**66.050**	**73.971**	**89.350**	**281.909**
1	Jumlah pencadangan tanah yang difasilitasi	lokasi	Jakarta	2	2	2	2	2	10						
2	Jumlah pengadaan tanah yan difasilitasi	lokasi	Jakarta	2	2	2	2	2	10						
3	Jumlah lokasi pengadaan tanah yang dilaksanakan untuk area inkubasi di 35 WPS	lokasi		18	18	27	31	35	129						
6	**Layanan Perkantoran**	**Laporan**	**Jakarta**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**25**	**9.082**	**9.082**	**16.790**	**21.708**	**22.703**	**79.365**
1	Jumlah layanan perkantoran yang dilaksanakan	Laporan	Jakarta	5	5	5	5	5	25						
KEGIATAN 1.5: PENGEMBANGAN PERKOTAAN															
UNIT ORGANISASI : PUSAT PENGEMBANGAN PERKOTAAN															
SASARAN KEGIATAN										**111.904**	**250.000**	**300.000**	**330.000**	**363.000**	**1.354.904**
1	**Kebijakan teknis keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat**	**Dokumen**	**Jakarta**	**10**	**4**	**4**	**4**	**4**	**26**	**23.074**	**45.937**	**54.471**	**60.756**	**67.636**	**251.874**
1	Jumlah kebijakan teknis keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang disusun dan difasilitasi	Dokumen	Jakarta	10	4	4	4	4	26						
2	**Rencana keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat**	**dokumen**	**Jakarta**	**17**	**22**	**21**	**21**	**21**	**102**	**42.119**	**115.000**	**125.000**	**135.000**	**139.515**	**556.634**
1	Jumlah dokumen rencana keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang disusun dan difasilitsi	dokumen	Jakarta	17	22	21	21	21	102						
3	**Layanan data dan informasi keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat**	**laporan**	**Jakarta**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**10**	**4.135**	**4.961**	**5.953**	**7.144**	**8.572**	**30.765**
1	Jumlah layanan data dan informasi	laporan	Jakarta	2	2	2	2	2	10						
4	**Program jangka pendek keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat**	**dokumen rumusan**	**Jakarta**	**1**	**2**	**2**	**2**	**2**	**9**	**2.330**	**4.495**	**6.849**	**8.274**	**10.911**	**32.859**
1	Jumlah rumusan progam yang disinkronkan	dokumen rumusan	Jakarta	1	2	2	2	2	9						

SASARAN/ INDIKATOR KINERJA		SATUAN	LOKASI	TARGET						ANGGARAN (JUTA)					
				2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	**Area inkubasi pada kawasan perkotaan yang dibangun**	**Rencana Teknis** **Area Inkubasi**	**Jakarta**	**5** **13**	**5** **12**	**5** **12**	**5** **12**	**5** **11**	**25** **60**	**20.192**	**55.668**	**79.000**	**84.354**	**95.000**	**334.214**
1	Jumlah dokumen rencana teknis area inkubasi pada kawasan perkotaan yang disususn dan ditetapkan	Rencana Teknis	Jakarta	5	5	5	5	5	25						
2	Jumlah area inkubasi pada kawasan perkotaan yang dibangun	Area Inkubasi	Jakarta	13	12	12	12	11	60						
6	**Pedoman teknis, rencana, dan program keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat**	**Pedoman**	**Jakarta**	**3**	**4**	**6**	**6**	**6**	**25**	**4.955**	**10.140**	**12.168**	**14.602**	**17.522**	**59.387**
1	Jumlah pedoman teknis, rencana, dan program keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat	Pedoman	Jakarta	3	4	6	6	6	25						
7	**Layanan Teknis keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat**	**laporan**	**Jakarta**	**9**	**9**	**9**	**10**	**11**	**48**	**13.299**	**11.639**	**13.967**	**16.760**	**20.112**	**75.777**
1	Jumlah Layanan Teknis keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat	laporan	Jakarta	9	9	9	10	11	48						
8	**Layanan Perkantoran**	**laporan**	**Jakarta**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**5**	**1.800**	**2.160**	**2.592**	**3.110**	**3.732**	**13.394**
1	Jumlah layanan perkantoran	laporan	Jakarta	1	1	1	1	1	5						